

ANALISIS PENGARUH LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN  
PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI INVESTOR  
(Studi Kasus Pada Perusahaan-perusahaan High Profile di BEJ)

DIANA ZUHROH  
Universitas Merdeka Malang

I PUTU PANDE HERI SUKMAWATI  
Universitas Merdeka Malang

## Pendahuluan

Badan usaha sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan perekonomian dan masyarakat luas, sehingga suatu badan usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan kreditor, tetapi juga kepada masyarakat luas. Badan usaha yang besar sebenarnya merupakan semacam lembaga masyarakat yaitu wadah untuk bekerjasama dalam menjalankan perusahaan bersekala besar (Suwardjono dalam Sualdiman, 2000:67).

Perusahaan menarik dana dari berbagai individu dalam masyarakat, dengan berbagai hak yang melekat di dalamnya, hal ini menjadikan perusahaan bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat yang terdiri atas para investor dan kreditor. Perusahaan memperkerjakan sejumlah besar pegawai dan buruh, hal ini menjadikan perusahaan bertanggung jawab kepada pekerja dan organisasinya (serikat pekerja). Perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan konsumen, hal ini menjadikan perusahaan bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat konsumen yang peka terhadap kualitas dan perubahan harga. Perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini menjadikan perusahaan bertanggung jawab kepada pemerintah dan kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan pemerintah. Perusahaan dalam beraktivitas menggunakan sumber daya alam, menimbulkan polusi air, tanah dan udara, hal ini menyebabkan perusahaan bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan alam dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat.

Penyediaan informasi yang luas dalam laporan keuangan merupakan kescharusan yang disebabkan adanya permintaan berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Suatu informasi dianggap *informative* jika informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan (*believe*) para investor dalam mengambil keputusan investasi. Adanya suatu informasi baru selain laporan keuangan akan membentuk suatu kepercayaan baru dikalangan para investor. Kepercayaan baru ini akan mengubah harga melalui perubahan *demand* dan *supply* surat-surat berharga.

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas suatu unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Keterkaitan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta manfaat sosial (*social benefits*) dan biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkannya merupakan sisi aspek sosial pertanggungjawaban manajemen.

Sejarah telah mencatat perkembangan hubungan organisasi dengan masyarakat dan berkembangnya akuntansi pertanggungjawaban sosial. Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) di luar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari keuntungan untuk para pemegang saham.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan juga harus dapat mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) paragraf kesembilan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Pernyataan senada juga terdapat dalam tujuan laporan keuangan no.12 dalam Trueblood Report, yaitu:

"Tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempengaruhi komunitas yang mana dapat ditentukan dan dijelaskan atau diukur dan penting bagi perusahaan dalam lingkungan sosialnya". (Ahmed Riahi-Belkaoui, 2000 dalam Indah, 2001)

Tujuan laporan keuangan diatas menuntut fungsi pelaporan tidak hanya mengamankan asset perusahaan tetapi juga mengamankan kesejahteraan sosial. Di sini, disamping juga untuk pengambilan keputusan laporan keuangan juga harus dapat dijadikan sebagai alat menilai pertanggungjawaban manajemen (*accountability*) dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Hasil penelitian di beberapa negara yang sudah maju membuktikan saat ini investor memasukkan variabel *sustainability* (berkaitan dengan masalah kelestarian lingkungan) dalam proses pengambilan keputusan investasi. Para investor cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup atau perusahaan yang mempunyai standar tinggi dalam masalah sosial dan lingkungan hidup. (Djohan Pinnarwan dalam Indah, 2001). Perusahaan-perusahaan yang telah mengungkapkan lebih banyak informasi yang dibutuhkan oleh investor akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pengungkapan diharapkan menjadi pendorong naiknya harga dan volume penjualan saham. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan sosial dalam laporan tahunan dengan reaksi investor dimana reaksi investor dicerminkan melalui volume perdagangan saham. Apakah nantinya investor bereaksi atau tidak dapat terlihat dari adanya *unexpected trading volume*, yaitu selisih antara volume perdagangan sesungguhnya terjadi dengan volume perdagangan normal (Bamber dalam Indah, 2001).

### Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: "Bagaimana pengaruh praktek pengungkapan sosial pada laporan tahunan terhadap reaksi investor yang tercermin dalam volume perdagangan saham perusahaan."

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: "Mengetahui pengaruh luas pengungkapan sosial terhadap reaksi investor, dimana reaksi investor dicerminkan melalui volume perdagangan saham pada perusahaan-perusahaan yang terkategori dalam industri *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta."

### Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.
2. Bagi investor, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter.
3. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.
4. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

## 2. Tinjauan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendriksen, 1996).. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), yang

merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Commission (SEC) dikategorikan menjadi dua yaitu: 1) *protective disclosure* yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) *informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Wolk, Francis, dan Teamey dalam Utomo, 2000).

Setiap unit/pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab terhadap tanggungjawab sosial, dan hal itu perlu diungkap dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh FASB : (dalam Suadilman, 2000) :

*Financial reporting include not only financial statement, but also other means of communicating information that relates, direct or indirectly, to the information provided by the accounting system. New releases, management's forecasts or other descriptions of it plans or expectations, and descriptions of its plans or expectations and descriptions of an enterprise's social or environmental impact are examples or reports giving financial informations other than financial statements (FASB 1978, para.7)*

## 2.2. Tema Pengungkapan Sosial

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary, unaudited, dan unregulated*. Gloutier (dalam Utomo, 2000) menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah:

### a. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni, serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

### b. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi: rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi dan lainnya.

### c. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

### d. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

## 2.3. Perhitungan Indeks Pengungkapan Sosial

Untuk mengetahui apakah informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan diungkapkan dengan benar dan memadai sehingga mencerminkan hasil operasi perusahaan, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indeks pengungkapan perusahaan-perusahaan publik. Indeks pengungkapan yang diukur merupakan persentase/tingkat pengungkapan informasi baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal dalam memenuhi peraturan pengungkapan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dipatuhi maka semakin tinggi harapan terhadap laporan tahunan dalam memberikan informasi yang benar dan memadai.

Pengukuran yang biasa dilakukan untuk mengetahui kelengkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya adalah dengan melakukan *checklist*. *Checklist* merupakan kumpulan item pengungkapan yang diminta oleh suatu peraturan dan/atau standar (SAK) pengungkapan tersebut. *Checklist* disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan, yang masing-masing item disediakan tempat jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan keuangan bersangkutan.

Adapun indeks pengungkapan dapat dirumuskan sebagai berikut (Anonymous, 2001):

Indeks Pengungkapan = Yes : (Yes + No)

- Yes : pengungkapan secara tepat telah dibuat

- No : pengungkapan secara tepat tidak dibuat

## 2.4. Tipe Industri

### a). Tipe Industri High Profile

Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri *high profile* menurut Robert dalam Hacston dan Milne, (dalam Utomo, 2000) adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat resiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Sedangkan Diekers & Preston dalam Hacston dan Milne, 1996 : 81(dalam Lutfi, 2000) menggambarkan industri yang *high profile* sebagai :“.....companies whose economic activities modify the environment, such as extractive industries, are more likely to disclose information about their environmental impact than are companies in order industries”.

Selain itu Cowen et al dalam Hacston dan Milne, 1996 : 82) menyatakan bahwa : “Consumer-oriented companies can be expected to exhibit greater concern with demonstrating their social responsibility to the community, since this likely to enhance image and influence sales”.

Perusahaan-perusahaan *high profile*, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat. Perusahaan *high profile* juga lebih sensitif terhadap keinginan konsumen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap produknya. Adapun perusahaan yang tergolong dalam perusahaan *high profile* pada umumnya mempunyai sifat: memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah cair dan pulusi udara. Contoh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan serta transportasi dan pariwisata.

### b). Tipe Industri Low-Profile

Perusahaan *low profile* adalah perusahaan yang tidak terlalu memperoleh sorotan luas dari masyarakat manakala operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya. Bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan *high profile*, perusahaan yang terkategori dalam industri *low profile* lebih ditoleransi oleh masyarakat luas manakala melakukan kesalahan. Adapun perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri *low profile* antara lain perusahaan bangunan, keuangan, dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil, dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.

## 2.5. Hubungan Pengungkapan Sosial dengan Reaksi Investor

Pengujian terhadap reaksi pasar melalui indikator harga dan volume perdagangan saham lebih dikaitkan dengan pengujian terhadap hipotesis efisiensi pasar. Sebuah pasar yang efisien akan tercermin dari cepatnya investor bereaksi terhadap masuknya informasi baru, yang mana bila pelaku pasar (investor) menganggap informasi tersebut sebagai informasi yang baik (*good news*) maka akan ada reaksi investor yang tercermin melalui peningkatan harga saham maupun volume perdagangan saham. Bentuk efisiensi pasar menurut Jogianto (1998) dapat ditinjau dari dua segi yaitu: 1) ketersediaan informasi dan 2) dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan informasi yang tersedia. Pasar efisien ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan pasar efisien secara informasi (*informationally efficient market*), sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut efisiensi pasar secara keputusan (*decisionally efficient market*).

Dalam perkembangan selanjutnya, informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam pengambilan keputusan menjadi semakin bervariasi yang mencakup informasi keuangan dan non keuangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis dan para pelaku bisnis yang terkait didalamnya, termasuk investor.

Penelitian tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial dan dampaknya terhadap reaksi investor telah banyak dilakukan di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura. Robert et. al. (1995), Adam et. al (1997), Gray et. al. (1995) dan Ince (1997) Tsang (1998)

Andrew *et. Al* (1989) Tilt (1994) dalam Luthfi (2001) meneliti *social reporting* dan pengaruh kelompok penekan (*pressure group*) terhadap kecenderungan perusahaan menyusun *corporate social reporting* dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Gray *et. al.* (1995) dalam Luthfi (2000) diantaranya menyimpulkan bahwa : (1). Tidak ditemukan bukti pengungkapan sosial berhubungan dengan profitabilitas perusahaan, minimal tidak pada tahun yang sama (2). Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pengungkapan sosial dengan ukuran perusahaan dan (3). terdapat hubungan antara tipe industri dan pengungkapan sosial, artinya perusahaan dalam industri *high profile* cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan sosial daripada industri yang *low profile*. (4). Faktor negara asal perusahaan dan negara yang menjadi tempat pelaporan memiliki efek yang signifikan terhadap pengungkapan sosial. (5). Ada beberapa karakteristik khas perusahaan yang mempengaruhi aktivitas *corporate social reporting* suatu perusahaan, seperti adanya komite pertanggungjawaban sosial di dalam perusahaan, sikap eksekutif senior, negara asal atau negara tempat perusahaan menyatakan laporan, dan *capital intensity* perusahaan.

Mathews (1993) dalam Luthfi (2001) juga mengutip beberapa penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dihubungkan dengan pasar modal, penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh:

1. Vance (1975) meneliti tentang pemingkatan tentang bisnis dan tinjauan sosial pada tahun 1972 dengan indikator persentase kenaikan harga saham pada 1 Januari 1975 bila dibandingkan dengan 1 Januari 1974 pada 45 dan 50 perusahaan utama, menyatakan bahwa kenaikan rata-rata pada kedua kelompok perusahaan mempunyai korelasi yang negatif dengan tahun 1974 atau tidak ada hubungan yang signifikan.
2. Belkaoui (1976), dengan sampel 2 kelompok dari 50 perusahaan dari industri yang berbeda. Meneliti tentang biaya pengendalian polusi yang kurang dari 1% dari penjualan dan pengendalian pengungkapan S&P 500 terhadap harga saham bulanan selama 18 bulan sebelum dan sesudah pengeluaran biaya. Penelitian menyatakan bahwa terdapat efek positif yang kuat tetapi bersifat sementara pada harga saham di pasar modal untuk perusahaan yang mengungkapkan data polusi.
3. Shane and Spicer (1983) meneliti tentang pelaporan polusi terhadap harga saham selama 6 hari sebelum dan sesudah penerbitan pelaporan polusi pada 72 perusahaan pada 4 industri yang berbeda. Penelitian tersebut menyatakan sampel perusahaan yang diambil menunjukkan *abnormal return* negatif yang cukup besar dalam dua hari sebelum publikasi dari pelaporan polusi dan terdapat hubungan yang sedikit antara *return* yang negatif pada saat publikasi.

Di Indonesia penelitian tentang pertanggungjawaban sosial terutama yang berkaitan dengan reaksi investor dilakukan oleh Muhammad Muslim Utomo (2000), Andy Prayogo Ika Luthfi (2001), dan Indah Purwati (2001) dan Rasmianti (2002). Penelitian Utomo (2000) memperlihatkan bahwa pengungkapan sosial di Indonesia relatif rendah, namun perusahaan *high profile* ternyata melakukan pengungkapan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan *low profile*. Luthfi (2001) yang meneliti pengaruh praktek pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perubahan harga saham membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari praktek pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perubahan harga saham.

Sedangkan penelitian Indah (2001) memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hubungan (korelasi) yang signifikan antara pengungkapan sosial dengan volume perdagangan saham seputar publikasi laporan tahunan. Tetapi jika dilihat dari angka korelasi yang bernilai positif, maka informasi sosial yang disajikan perusahaan pada laporan tahunan sudah direspon baik oleh para investor. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rasmianti (2002) memberikan kesimpulan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan tidak berhubungan terhadap perubahan volume penjualan saham di BEJ, meskipun perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian telah menambahkan tema lingkungan dalam laporan tahunannya.

Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menggunakan data tahunan antara tahun 1997 sampai dengan 1999, sementara pada periode tahun tersebut kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh krisis moneter dan investor lebih fokus pada situasi ekonomi secara makro. Namun hasil ikutan dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa praktek pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan semakin baik dan investorpun mulai merespon pengungkapan sosial sebagai salah satu **good news**.

## Hipotesis

Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- $H_0$  = Tidak ada pengaruh dari praktek pengungkapan sosial dengan reaksi investor (volume perdagangan saham diluar normal)
- $H_a$  = Terdapat pengaruh dari praktek pengungkapan sosial dengan reaksi investor (volume perdagangan saham diluar normal)

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: pengungkapan sosial sebagai variabel bebas (variabel X) dan reaksi investor yang tercermin melalui volume perdagangan saham sebagai variabel terikat (variabel Y).

#### a. Pengungkapan Sosial

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *high profile* dinotasikan dengan indeks pengungkapan sosial. Indeks pengungkapan sosial merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sample atas pengungkapan sosial yang dilakukannya. Variabel ini tersusun atas empat tema yaitu: tema kemasyarakatan, tema produk dan konsumen, tema ketenagakerjaan dan tema lingkungan. Dalam menentukan indeks pengungkapan digunakan teknik tabulasi untuk setiap perusahaan sample berdasarkan daftar (checklist) pengungkapan sosial. Dalam menentukan skor pengungkapan bersifat dikotomi, dimana sebuah item pengungkapan diberi skor 1 (satu) = Yes jika diungkapkan dan diberi skor 0 (nol) = No jika tidak diungkapkan. Adapun rumus indeks pengungkapan sosial adalah: Indeks Pengungkapan = Yes : ( Yes + No )

#### b. Reaksi Investor

Reaksi investor seputar publikasi laporan tahunan perusahaan diketahui dari *unexpected trading volume* (volume perdagangan saham di luar normal) yaitu kelebihan dari volume perdagangan yang sesungguhnya terjadi terhadap volume perdagangan normal.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ).. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang masuk dalam kategori *high profile* untuk periode tahun 2001.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi:

- a. Laporan tahunan periode tahun 2001, diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEJ.
- b. Tanggal publikasi laporan tahunan (*even date*), diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEJ.
- c. Volume perdagangan saham harian selama periode estimasi dan seputar periode publikasi laporan tahunan, diperoleh dari harian Bisnis Indonesia.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Penghitungan indeks pengungkapan sosial

- 1). Membuat suatu daftar (*checklist*) pengungkapan sosial

Checklist disusun dengan tujuan agar memudahkan bagi peneliti dalam melakukan perhitungan tingkat kepatuhan laporan tahunan suatu perusahaan dalam memenuhi peraturan dan standar pengungkapan tertentu. *Checklist* disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan yang masing-masing item disediakan tempat jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan keuangan yang bersangkutan.

Daftar pengungkapan sosial yang digunakan adalah daftar item yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu oleh Muhammad Muslim Utomo, (2000) sebanyak 3 (tiga) tema yaitu: kemasyarakatan, produk dan konsumen dan ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini juga digunakan tema lingkungan yang telah digunakan oleh Rasmiati (2002). Adapun rincian dari tema pengungkapan sosial dapat dilihat pada lampiran 1.

- 2). Menentukan indeks pengungkapan sosial untuk setiap perusahaan sampel berdasarkan daftar (*checklist*) pengungkapan sosial dengan cara sebagai berikut:
  - Dalam menentukan skor pengungkapan bersifat dikotomi, dimana sebuah item pengungkapan diberi skor 1 (satu) jika diungkapkan dan diberi skor 0 (nol) jika tidak diungkapkan. Selanjutnya indeks pengungkapan dihitung dengan rumus:  

$$\text{Indeks Pengungkapan} = \text{Yes} : (\text{Yes} + \text{No})$$
  - Menggunakan model pengungkapan yang tidak diberi bobot sehingga memperlakukan semua item pengungkapan secara sama.
  - Luas pengungkapan relatif setiap perusahaan diukur dengan indeks, yaitu rasio total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut.

**b. Penghitungan indeks unexpected trading volume**

*Unexpected trading volume* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Bandi dan Jogianto Hartono, 2000:209)

- $V_{At} = PS_{it} - PS_{mt}$

$V_{at}$  = volume perdagangan diluar normal

$PS_{it}$  = persentase saham perusahaan i yang diperdagangkan pada periode t

$PS_{mt}$  = persentase saham yang diperdagangkan di pasar keseluruhan pada periode t

Untuk persentase saham perusahaan i yang diperdagangkan pada periode t ( $PS_{it}$ ) dihitung seperti berikut ini:

- $PS_{it} = \frac{S_{it}}{S_{bit}}$

$PS_{it}$  = persentase saham perusahaan i yang diperdagangkan pada periode t

$S_{it}$  = saham perusahaan i diperdagangkan di pasar pada periode t

$S_{bit}$  = jumlah saham perusahaan i yang beredar pada periode t

Sedangkan persentase saham yang diperdagangkan secara keseluruhan di pasar ( $PS_{mt}$ ) dihitung seperti berikut ini:

- $PS_{mt} = \frac{S_{mt}}{S_{Bmt}}$

$PS_{mt}$  = persentase saham yang diperdagangkan di pasar keseluruhan

$S_{mt}$  = jumlah saham yang diperdagangkan di pasar keseluruhan pada periode t

$S_{Bmt}$  = jumlah saham yang beredar di pasar keseluruhan pada periode t

Adapun periode pengamatan untuk menghitung indeks *unexpected trading volume* setiap perusahaan sampel akan diakumulasikan selama sebelas (11) hari, yaitu dari hari -5 sampai dengan hari +5 tanggal publikasi laporan tahunan. Daftar perusahaan sampel dan tanggal publikasi laporan tahunan disajikan pada lampiran 2.

**c. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan data apakah data yang dianalisis berdistribusi normal. Data disebut berdistribusi normal apabila nilai residual (nilai pengganggu) mendekati angka nol.

**d. Uji Regresi**

Analisis regresi akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows versi 11, dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan prosedur :

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara nyata.

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, berarti bahwa variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara nyata.



Item yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan adalah item kebijakan lingkungan yang diungkapkan oleh 12 perusahaan, serta item pencegahan/pengolahan polusi dan item dukungan pada konservasi lingkungan yang masing-masing diungkapkan oleh 11 perusahaan. Item yang paling sedikit diungkapkan perusahaan adalah pada item rating (penghargaan dibidang lingkungan) yaitu oleh 6 perusahaan. Sedangkan item dukungan pada konservasi satwa tidak ada satupun perusahaan yang mengungkapkannya. Tema lingkungan hidup bisa dikatakan masih jarang diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menganggap bahwa pengungkapan tema lingkungan hidup tidak terlalu penting.

Tabel 1  
Indeks Pengungkapan Sosial Tahun 2001

No	Sampel	Indeks Pengungkapan Sosial
1	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	41%
2	PT. Fastfood Tbk (FAST)	35%
3	PT. Semen Cibinong Tbk (SMCB)	53%
4	PT. Gudang Garam Tbk (GGRM)	41%
5	PT. Barito Pacifil Timber Tbk (BRPT)	65%
6	PT. Internasional Nikel Tbk (INCO)	65%
7	PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM)	59%
8	PT. Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA)	30%
9	PT. Timah Tbk (TINS)	32%
10	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	35%
11	PT. Dankos Laboratoria (DNKS)	32%
12	PT. Semen Gresik Tbk (SMGR)	44%
13	PT. Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)	47%
14	PT. Indocement Tunggul Prakarsa (INTP)	47%
15	PT. Multi Polar Corporation Tbk (MLPL)	32%
16	PT. Suparma Tbk (SPMA)	24%
17	PT. Sumalindo Lestari Jaya (SULI)	35%
18	PT. Indal Aluminium Tbk (INAL)	35%
19	PT. Medco Energi Tbk (MEDC)	50%
20	PT. Astra Internasional Tbk (ASII)	53%
21	PT. Siloam Health Care Tbk (BGMT)	21%
22	PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA)	21%
23	PT. Bentoel Internasional Tbk (RMBA)	41%
24	PT. Smart Tbk (SMAR)	30%
25	PT. Dyna Plast Tbk (DYNA)	18%
26	PT. Surabaya Agung Pulp & Ketas (SAIP)	35%
27	PT. Alumindo Light Metal Indutri Tbk (ALMI)	24%
28	PT. Bimantara Citra Tbk (BMTR)	38%
29	PT. Berlina Tbk (BRNA)	21%
30	PT. Mustika Ratu Tbk (MRAT)	35%

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 2002 (data diolah)

#### 4.2. Indeks Unexpected Trading Volume (variabel Y)

Setelah melakukan perhitungan terhadap *indeks unexpected trading volume* seputar publikasi laporan tahunan perusahaan sample diperoleh 26 perusahaan dengan indeks *unexpected trading volume* yang bernilai positif. *Indeks unexpected trading volume* akan bernilai positif jika prosentase saham perusahaan sample yang diperdagangkan lebih besar dari prosentase saham yang diperdagangkan di pasar keseluruhan. Hal ini berarti pelaku pasar (investor) menganggap pengungkapan sosial yang disajikan pada laporan tahunan sebagai informasi yang baik sehingga volume perdagangan saham perusahaan

mengalami peningkatan. Sedangkan 4 perusahaan lainnya dengan *indeks unexpected trading volume* bernilai negatif.

Adapun tahap-tahap perhitungan *indeks unexpected trading volume* setiap perusahaan sample tampak pada lampiran 4 dan 5. Sedangkan hasil perhitungan *indeks Unexpected Trading Volume* setiap perusahaan tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 2  
Indeks *Unexpected Trading Volume* tahun 2002

No	Sampel	Indeks UTV
1	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	0.0016780
2	PT. Fastfood Tbk (FAST)	0.0000467
3	PT. Semen Cibinong Tbk (SMCB)	0.0017509
4	PT. Gudang Garam Tbk (GGRM)	0.0011106
5	PT. Barito Pacifil Timber Tbk (BRPT)	0.0037865
6	PT. Internasional Nikel Tbk (INCO)	0.0038746
7	PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM)	0.0028035
8	PT. Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA)	-0.0025975
9	PT. Timah Tbk (TINS)	0.0003660
10	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	0.0000265
11	PT. Dankos Laboratoria (DNKS)	-0.0002760
12	PT. Semen Gresik Tbk (SMGR)	0.0017128
13	PT. Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)	0.0014581
14	PT. Indocement Tunggul Prakarsa (INTP)	0.0017694
15	PT. Multi Polar Corporation Tbk (MLPL)	0.0004658
16	PT. Supama Tbk (SPMA)	-0.0007180
17	PT. Sumalindo Lestari Jaya (SULI)	0.0000143
18	PT. Indal Aluminium Tbk (INAI)	0.0000204
19	PT. Medco Energi Tbk (MEDC)	0.0024276
20	PT. Astra Internasional Tbk (ASII)	0.0025022
21	PT. Siloam Health Care Tbk (BGMT)	0.0000390
22	PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA)	0.0007011
23	PT. Bentoel Internasional Tbk (RMBA)	0.0018126
24	PT. Smart Tbk (SMAR)	0.0000621
25	PT. Dyna Plast Tbk (DYNA)	0.0010382
26	PT. Surabaya Agung Pulp & Ketas (SAIP)	-0.0008283
27	PT. Alumindo Light Metal Indutri Tbk (ALMI)	0.0000625
28	PT. Bimantara Citra Tbk (BMTR)	0.0002041
29	PT. Berlina Tbk (BRNA)	0.0022449
30	PT. Mustika Ratu Tbk (MRAT)	0.0000643

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 2002 (data diolah)

#### 4.3. Pengujian Hipotesis

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan data dan berdistribusi normal apabila nilai residual (nilai pengganggu) mendekati angka nol. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan histogram (lampiran 6) dimana nilai residual (nilai pengganggu) rata-rata mendekati angka nol dan kurva membentuk lonceng/genta, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi kenormalan data.

##### b. Uji Regresi

Adapun rekapitulasi hasil analisis regresi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3  
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	T	Sig. t	Keterangan
Indeks Pengungkapan Sosial (X)	0,0079127	5,373	0,000	Signifikan
Konstanta	-0,0020834			
R	0,712			
R <sup>2</sup>	0,508			
F	28,866			
Sig. F	0,000			
Variabel Terikat = Volume Perdagangan di Luar Normal (Y)				
T <sub>tabel</sub> (α = 0,05)	2,048			
F <sub>tabel</sub> (α = 0,05)	4,17			

Sumber: Data sekunder diolah (lampiran)

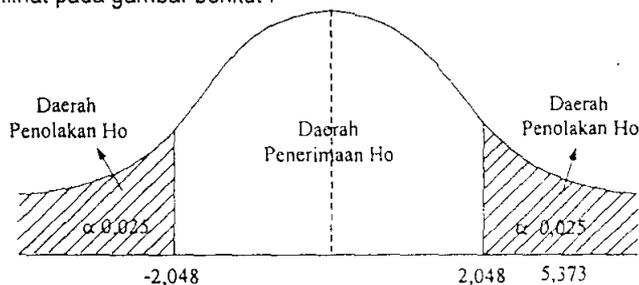
Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil analisis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = -0,0020834 + 0,0079127 X$$

Konstanta sebesar -0,0020834 memiliki arti jika tidak ada pengaruh indeks pengungkapan sosial maka rata-rata volume perdagangan di luar normal adalah sebesar -0,0020834. Koefisien regresi indeks pengungkapan sosial (b) sebesar 0,0079127 menunjukkan besarnya pengaruh pengungkapan sosial terhadap volume perdagangan diluar normal dimana pengaruhnya searah (positif), artinya jika indeks pengungkapan sosial meningkat 1 akan menyebabkan peningkatan volume perdagangan di luar normal sebesar 0,0079127.

Pada tabel 3 tampak bahwa nilai R = 0,712 dimana nilai R bernilai positif dan lebih besar dari 0,5 serta mendekati angka 1 yang berarti bahwa antara pengungkapan sosial dengan volume perdagangan diluar normal memiliki korelasi (hubungan) yang kuat. Hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} = 28,866$  sedangkan nilai  $F_{tabel} = 4,17$  sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05 berarti  $H_0$  ditolak artinya indeks pengungkapan sosial berpengaruh nyata terhadap volume perdagangan diluar normal, dengan kata lain dapat dikatakan perubahan volume perdagangan di luar normal dapat dijelaskan oleh indeks pengungkapan sosial. Adapun kemampuan indeks pengungkapan sosial menjelaskan perubahan volume perdagangan di luar normal ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi = 0,508 jadi sebesar 50,8% perubahan volume perdagangan di luar normal ditentukan oleh indeks pengungkapan sosial sedangkan sisanya sebesar 49,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,373 sedangkan nilai  $t_{tabel} = 2,048$  jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak artinya indeks pengungkapan sosial berpengaruh nyata terhadap volume perdagangan di luar normal, dan hal ini juga dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa indeks pengungkapan sosial berpengaruh nyata terhadap volume perdagangan di luar normal.

## 5. Kesimpulan, Implikasi Hasil Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

### 5.1. Kesimpulan

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa : pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang go public telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori *high profile*.

### 5.2. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini telah memberikan temuan positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu :

#### a. Investor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor sudah mulai merespon dengan baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada seputar publikasi laporan tahunan. Hal ini berarti pengungkapan sosial dalam laporan tahunan sudah direspon positif oleh investor sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Kesimpulan ini juga dapat mengindikasikan makin meningkatnya kesadaran investor akan tanggungjawab sosial yang seharusnya diemban oleh emiten, dan selanjutnya tentu saja harus menjadi kesadaran pula bagi pihak investor dalam memilih emiten dalam melakukan investasi.

#### b. Emiten

Berdasarkan hal tersebut sebaiknya emiten lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas pengungkapan sosial yang dilakukan untuk periode berikutnya, karena informasi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

#### c. Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah, Bapepam dan IAI dalam merumuskan kebijakan, peraturan dan standar yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan- perusahaan di Indonesia, baik yang telah go public maupun belum.

### 5.3. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2000), Lutfi (2001), Indah (2001) dan Rasmianti (2002), kelemahan/keterbatasan pada penelitian ini antara lain:

1. Penyusunan daftar pengungkapan sosial cenderung bersifat subyektif dan memungkinkan terlewatnya item-item tertentu yang seharusnya diungkap oleh perusahaan.
2. Subyektifitas muncul manakala menentukan perusahaan yang terkategori *high profile companies* dan sangat sedikitnya perusahaan-perusahaan yang tergolong *high profile* yang mau menyerahkan laporan tahunannya.
3. Karena menggunakan tema yang beraneka ragam, mengakibatkan sulit membedakan kualitas pengungkapan antara satu perusahaan dengan perusahaan laini.
4. Penggunaan *checklist* mengakibatkan sulit membedakan kualitas pengungkapan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Misalnya bila PT. ABC menjelaskan secara mendetail program-program pendidikan dan latihan karyawannya, akan terlihat sama dengan PT. XYZ yang hanya mengungkap "...telah mengadakan penelitian bagi karyawan".
5. Penelitian ini hanya membatasi pada sisi pengungkapan sosial, bukan pada aktifitas sosial. Bilamana perusahaan tidak memanfaatkan laporan tahunan untuk menjelaskan seluruh aktivitas selama tahun pelaporan, akan muncul kesenjangan antara aktivitas sosial dengan pengungkapan sosial. Akibatnya laporan tahunan gagal menjelaskan seluruh aktivitas sosial perusahaan.

### 5.4. Saran untuk Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan referensi dalam penelitian berikutnya. Adapun instrumen yang perlu ditambahkan dalam penelitian selanjutnya adalah jumlah sample, periode pengamatan lebih diperpanjang dan item pengungkapan sosial sebaiknya lebih disempurnakan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Riaj, Belkaoi. *Teori Akuntansi*. Buku Satu. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. 2000.
- Anonymous,2001; *Modul: Pengukuran Index Pengungkapan Informasi Keuangan Pada Perusahaan-perusahaan Publik di Indonesia*. Makalah disajikan pada Pelatihan Penetapan Angka Index Pengungkapan, Kerjasama SIAGA, PPA Universitas Brawijaya Malang dan IAI Komda Malang, Malang, Oktober.
- Anonymous,2000; *Mengubah Kapitalis Menjadi Sosialis*. Media Akuntansi. No. 7. Maret, pp 46-49.
- Anonymous,2001; *Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan*. Media Akuntansi. No.17. April-Mei, pp 59-65.
- Bandi dan Hartono, J. 1999. *Perilaku: Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Pengumuman Dividen*. Simposium Nasional Akuntansi II. September. Malang.
- Eldon S, Hendriksen,1998; *Teori Akuntansi*. Penerbit Ak Group Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (IAI). 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, N dan Supomo, B,1999; *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Kieso and Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Ketujuh. Jilid Satu. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Lutfi, Andy Prayogo Ika,2001; *Analisis Pengaruh Praktek Pengungkapan Sosial Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEJ*. Skripsi tidak dipublikasikan. FE-UB. Malang.
- Purwati, Indah. 2001. *Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Terhadap Reaksi Investor*. Skripsi tidak dipublikasikan. FE-UB. Malang.
- Rasmiati,2002; *Hubungan Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan Dengan Volume Penjualan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan High Profile di BEJ)*. Skripsi tidak dipublikasikan. FE-Unmer. Malang
- Suwaldiman,2000; *Pentingnya Pertimbangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Penetapan Tujuan Pelaporan Keuangan dalam Conceptual Framework Pelaporan Keuangan Indonesia..* Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Juni.
- Utomo, Muhammad Muslim,2000; *Praktek Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Perusahaan-Perusahaan High Profile dan Low Profile)*. Makalah disajikan pada SNA III.
- Wolk, Harry I. Jere R. Francis, and Michael G. Tearney. 1989. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. Second Edition. Boston.

## Lampiran 1

### DAFTAR PENGUNGKAPAN SOSIAL (SOCIAL DISCLOSURE)

#### Tema Kemasyarakatan

1. Dukungan pada kegiatan seni dan budaya
2. Dukungan pada kegiatan olah raga (termasuk *sponsorship*)
3. Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik
4. Dukungan ke lembaga kerohanian
5. Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk bea siswa, kesempatan manang, kesempatan penelitian)
6. Dukungan ke lembaga sosial lain
7. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
8. Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas & motivasi oleh perusahaan untuk berwiraswasta)

#### Tema Produk dan Konsumen

1. Mutu produk
2. Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan)
3. *Customer Satisfaction* (upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen)
4. Masalah komputer Tahun (MKT) 2000 YTK
5. Lain-lain

#### Tema Ketenagakerjaan

1. Jumlah tenaga kerja
2. Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja)
3. Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan)
4. Koperasi karyawan
5. Gaji/upah
6. Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, kesejahteraan untuk karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi)
7. Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri)
8. Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan karir
9. Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama)
10. Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita)
11. Pensiun (termasuk pembentukan/pemilihan dana pensiun)
12. Serikat pekerja
13. Kesepakatan kerja Bersama
14. *Turn over* pekerja

#### Tema Lingkungan Hidup

1. Kebijakan lingkungan
2. Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
3. Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan)
4. Energi (termasuk *energi saving*, total energi yang digunakan dan sebagainya)
5. Pencegahan/ pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah)
6. Dukungan pada konservasi satwa
7. Dukungan pada konservasi lingkungan

Firma Sulistiyowati  
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

### *Abstract*

*Disclosure of corporate social performance will be urgently expected. It can be reported by financial and non financial information in annual report or social report separately. Pollution, depletion of resources, waste, product quality and safety, the rights and status of workers, and the power of the large corporations are issues which have become the focus of increasing attention and concern. This paper discusses how corporations must disclose social performance reporting as the responsibility of corporations to the public.*

*Key words: disclosure, corporate social performance.*

## 1. PENDAHULUAN

Selama kurang lebih 30 tahun terakhir ini kesadaran publik akan peran perusahaan di masyarakat telah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak perusahaan yang telah berjasa dalam kemajuan ekonomi dan teknologi justru mendapat kritikan karena kurang memperhatikan masalah sosial. Polusi, deplesi sumber daya, limbah, kualitas dan keamanan produk, hak dan status pekerja, serta kekuasaan dari perusahaan besar menjadi isu-isu penting yang mendapat perhatian banyak pihak (Gray, 1987:1). Tekanan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis ditujukan tidak hanya pada perusahaan swasta tapi juga perusahaan publik. Oleh karena itu perusahaan perlu akuntabel kepada masyarakat luas, bukan hanya pada kelompok tertentu seperti pemegang saham dan kreditur saja. Menurut Friedman (1962) perusahaan perlu memiliki pertanggungjawaban sosial untuk memaksimalkan profit. Sedangkan menurut Holmes (1976) dan Ostlund (1977)

Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan bertambah dengan adanya kritik mengenai penggunaan profit sebagai ukuran kinerja perusahaan secara *all-inclusive*. Untuk merespon hal tersebut, beberapa institusi akuntansi mulai mempertimbangkan akuntansi sosial perusahaan pada pertengahan tahun 1970-an (Ramathan, 1976). Kemajuan selanjutnya adalah banyak peneliti yang mulai melihat akuntansi sosial perusahaan melalui perspektif teoritis yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya *stakeholder theory*, *social contract theory* dan *legitimacy theory*.

Meskipun kurangnya konsensus dalam profesi akuntansi dan literatur akuntansi secara teoritis tentang bagaimana perusahaan harus mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial, namun telah terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan aktivitas pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya. Pengungkapan sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi finansial dan non finansial yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan secara fisik dan sosial, seperti yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial secara terpisah (Guthrie and Mathew, 1985), termasuk di dalamnya lingkungan secara fisik, energi, sumber daya manusia, dan hal-hal yang terlibat dalam masyarakat.

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dan seberapa jauh perusahaan mengungkapkan kinerja sosial sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban perusahaan kepada publik.

## 2. TEORI UNTUK MENGANALISIS DAN MENJELASKAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN

Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban sosial perusahaan antara lain (Moir, 2001):

digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa suatu kelompok, kepada siapa perusahaan bertanggung jawab. Menurut Freeman (1984), perusahaan digambarkan sebagai kumpulan dari hubungan-hubungan para *stakeholder*. Definisi klasik Freeman mengenai *stakeholder* adalah kelompok atau beberapa individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian sasaran organisasi (Freeman, 1984:46). Secara khusus, *stakeholder* dianalisis menjadi dua kelompok, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer merupakan orang yang sangat dibutuhkan partisipasinya bagi kelangsungan hidup perusahaan (Clarkson, 1995:106). Yang termasuk di dalam kelompok *stakeholder* primer adalah *shareholder*, investor, karyawan, pelanggan, pemasok, dan kelompok *stakeholder* publik, yaitu pemerintah, kepada siapa perusahaan membayar pajak dan masyarakat, sebagai penyedia infrastruktur dan pasar. *Stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi tidak berpengaruh penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Berkaitan dengan isu pertanggungjawaban sosial, isu utama yang berkaitan dengan analisa *stakeholder* adalah motivasi perusahaan untuk bertanggung jawab kepada *stakeholder*. Pertanggungjawaban sosial perusahaan harus didasarkan pada tujuan dan nilai-nilai yang memberikan kontribusi pada reputasi dan keberhasilan perusahaan (*Business Impact*, 2000:101). Mitchell (1997), mengembangkan model pengelompokan *stakeholder* berdasarkan atribut kekuatan, legitimasi dan kepentingan. Oleh karena itu diharapkan perusahaan akan menaruh perhatian besar terhadap kelompok *stakeholder* yang sah, yang memiliki kekuatan dan kepentingan.

## 2.2. Social Contract Theory

Gray (1996) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan dari kontrak sosial antara anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dalam

komersial, namun karena harapan impact masyarakat agar perusahaan beroperasi.

Donaldson and Dunfee (1994) mengembangkan teori kontrak sosial yang terintegrasi sebagai cara manajer untuk mengambil keputusan dalam konteks etis. Keduanya membedakan antara kontrak makrososial dan mikrososial. Kontrak makrososial dalam konteks masyarakat, misalnya harapan bahwa perusahaan akan memberikan dukungan pada masyarakat lokal dan secara khusus bentuk keterlibatan tersebut akan menjadi kontrak mikrososial. Oleh karena itu, perusahaan yang mengadopsi suatu pandangan kontrak sosial harus menjelaskan keterlibatan mereka sebagai suatu bagian dari harapan masyarakat, yang dapat menjelaskan motivasi awal, yang mungkin tidak dijelaskan secara keseluruhan atas keterlibatan mereka. Salah satu manfaat komersial hasil studi di Australia (CCPA, 2000) adalah perlunya izin beroperasi khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Hal tersebut mungkin dianggap sebagai manfaat komersial dari naiknya reputasi, tapi juga menghubungkan pencapaian dan pemeliharaan legitimasi (Suchman, 1995).

## 2.3. Legitimacy Theory

Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai suatu persepsi atau asumsi yang digeneralisasi merupakan tindakan dari entitas yang diinginkan, layak atau sesuai dalam beberapa sistem yang dibangun dari norma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, maupun definisi-definisi secara sosial. Mengacu pada literatur terdahulu mengenai manajemen legitimasi, termasuk di dalamnya *the strategic traditions dependence theory* (Pfeffer and Salancik, 1978) dan *the institutional traditions* (DiMaggio and Powell, 1983). Suchman mengidentifikasi tiga tipe legitimasi organisasional, yaitu: (1) pragmatik; (2) moral; (3) kognitif. Ia juga mengidentifikasi tiga tantangan kunci dari manajemen

sehingga untuk menerapkan teori legitimasi perlu menguji bentuk-bentuk komunikasi perusahaan. Linblom (1994) mencatat bahwa legitimasi bukan merupakan suatu proses yang lunak bagi organisasi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Ia menyatakan bahwa organisasi mungkin menggunakan empat strategi legitimasi saat menghadapi ancaman legitimasi yang berbeda-beda. Keempat strategi tersebut adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada para *stakeholder* mengenai tujuan organisasi meningkatkan kinerja.
2. Mengubah persepsi organisasi (tanpa mengubah kinerja aktual organisasi).
3. Mengalihkan isu-isu yang menjadi perhatian.
4. Mengubah harapan-harapan eksternal tentang kinerja.

Legitimasi tampaknya merupakan alasan kunci untuk menjalankan perilaku sosial perusahaan dan menggunakan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai bentuk publisitas atau pengaruh (Gray, 1996 & Clarke, 1998). Pandangan yang berlawanan dengan hal tersebut, misalnya perusahaan menggunakan kekuatan untuk melegitimasi aktivitas namun, lebih dari itu masyarakat memberi kekuatan pada perusahaan untuk menggunakan tanggung jawabnya. (Wood, 1991). Masyarakat memberi kekuasaan dan kekuatan pada perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang tidak menggunakan kekuasaan dan kekuatan tersebut akan cenderung kehilangan itu semua.

Pengujian praktik-praktik pertanggungjawaban sosial perusahaan bisa dimulai dari dalam perusahaan dan didorong oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam teori kontrak sosial, dianalisis secara khusus dengan *stakeholder analysis* untuk meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan. Hal tersebut merupakan cara untuk menilai praktik pertanggungjawaban sosial perusahaan sekaligus cara untuk menilai kinerja (Moir, 2001).

sangat erat dan saling menguntungkan. Di satu pihak, masyarakat menyediakan sarana infrastruktur bagi berlangsungnya perusahaan dan di pihak lain perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat (Imam, 2000:133).

Studi empiris mengenai kinerja sosial telah lama dilakukan, antara lain oleh dua organisasi yaitu *American Accounting Association (AAA) Committee on Accounting for Social Performance* pada tahun 1975 dan *National Association of Accountants (NAA) Committee on Accounting for Corporate Social Performance* pada tahun 1977, yang menitikberatkan pada pengukuran dan pelaporan sosial.

Menurut *NAA Committee on Accounting for Corporate Social Performance*, kinerja sosial perusahaan berkaitan dengan refleksi dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut berkaitan dengan hukum, pengukuran penyelesaian atau persyaratan kontrak (Porwal, 1993:318). Komite tersebut juga mengelompokkan kinerja sosial ke dalam empat area, yaitu:

1. Pengembangan masyarakat (*community development*), termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas yang berorientasi sosial, terutama yang bermanfaat bagi publik, misalnya pembangunan perumahan, pelayanan kesehatan, program pangan, dan program-program kemasyarakatan yang lain.
2. Sumber daya manusia (*human resources*), merupakan area dari kinerja sosial yang berhubungan langsung dengan para pekerja atau karyawan perusahaan, sebagai contoh pemberdayaan karyawan, pelatihan karyawan, kebijakan promosi, dan peraturan-peraturan yang menguntungkan karyawan.
3. Kontribusi produk atau jasa (*product or service contribution*), termasuk di dalamnya konsumerisme, kualitas produk, pengepakan, serta jaminan dan keamanan produk.
4. Kontribusi sumber daya fisik dan lingkungan (*physical resources and environmental contribution*), meliputi

polusi udara, polusi air, polusi suara, konservasi kelangkaan sumber daya, dan pembuangan sisa zat padat.

Berdasarkan keempat area di atas, *NAA Committee* mendefinisikan akuntansi sosial sebagai berikut:

Akuntansi sosial merupakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan dampak-dampak sosial dan ekonomis dari suatu institusi kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan manajerial secara internal dan tujuan akuntabilitas eksternal serta pertumbuhan terhadap perubahan nilai-nilai yang menuntun masyarakat kepada pendefinisian kembali ide tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan menurut *AAA Committee on Accounting for Social Performance*, akuntansi sosial meliputi: akuntansi dan evaluasi dampak program pertanggungjawaban sosial perusahaan, akuntansi sumber daya manusia, pengukuran biaya sosial, mengukur dampak perusahaan secara keseluruhan terhadap masyarakat, pelaporan sosial dan akuntansi untuk program publik (pemerintah)

Menurut AAA (1975) dalam laporan dari *Committee on Social Costs*, menyatakan bahwa ada tiga *level* pengukuran yang termasuk dalam pengembangan akuntansi sosial (Mathews, 1994: 60), yaitu:

*Level I*, merupakan aktivitas yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan, misalnya identifikasi mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadinya polusi.

*Level II*, merupakan aktivitas yang diukur dengan menggunakan unit non moneter. Material yang menyebabkan polusi diukur tingkat pencemarannya, waktu pencemaran, dan kepatuhan terhadap standar yang ada.

*Level III*, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menilai dampak pencemaran. Pengukuran tersebut dikonversi ke dalam perkiraan finansial atas

Para peneliti pada umumnya mengakui bahwa kinerja sosial perusahaan multidimensional. Menurut Griffin & Mahon (1997:15), secara konseptual kinerja sosial perusahaan dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu: (1) *people dimension*, yang meliputi masyarakat, perempuan, minoritas, dan hubungan pekerja; (2) *product quality dimension*, yang meliputi kualitas produk dan lingkungan.

#### 4. PENGUKURAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaporan sosial perusahaan yang semakin populer dan keinginan organisasi untuk mengetahui pandangan *stakeholder* mengenai kinerja sosial perusahaan, menimbulkan dua kemungkinan sebagai berikut (Swift, Owen and Humphrey, 2001):

1. Para *stakeholder* tertarik pada perilaku perusahaan, yang mengubah perilakunya dari penekanan utama manajerial menjadi perilaku yang kolaboratif.
2. Keberadaan infrastruktur dari sistem informasi manajemen merupakan tiang penyangga dari keseluruhan proses pelaporan dan penyediaan informasi di balik pembuatan keputusan organisasional.

Paradigma yang benar mengenai kinerja sosial tergantung pada struktur organisasi dan motivasi untuk berinteraksi dengan para *stakeholder*, namun pelaporan sosial juga harus efektif dan direncanakan. Sistem akuntansi sosial mengidentifikasi dan mengukur kinerja sosial, jika organisasi kemudian memilih untuk mengungkapkan informasi tersebut untuk kepentingan, transparansi dan keterbukaan, manajemen harus yakin bahwa informasi tersebut benar (Swift, Owen, and Humphrey, 2001)

Sistem informasi yang reliabel mengurangi risiko pelaporan informasi yang tidak akurat yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Banyak perusahaan yang mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan *stakeholder*, namun tidak semuanya memilih untuk mengungkapkannya.

populer yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaporan sosial adalah *balanced scorecard*, dengan persentase mencapai 96%. *Balanced scorecard* merupakan alat akuntansi manajemen yang komprehensif, yang mampu menjawab kebutuhan *stakeholder* (pelanggan, masyarakat, karyawan) maupun perusahaan itu sendiri. Dari perspektif yang ada, dirumuskan tujuan perusahaan, kemudian ditentukan ukuran-ukurannya. Untuk menerapkan *balanced scorecard* dibutuhkan juga keahlian yang memadai, selain itu yang tidak kalah penting adalah keterlibatan *stakeholder* itu sendiri dalam menghasilkan pelaporan kinerja sosial perusahaan, sehingga tujuan perusahaan untuk menghasilkan laporan tentang aktivitas sosial yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

## 5. TUJUAN DAN ALASAN PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Menurut Gray, Owen and Maunders (1988), tujuan pengungkapan kinerja sosial perusahaan adalah:

1. Untuk meningkatkan *image* perusahaan.
2. Untuk melaksanakan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat.
3. Untuk memberikan informasi kepada investor.

Sedangkan alasan perusahaan melakukan pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial antara lain (Zadek, 1998:1426):

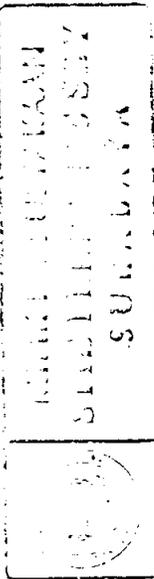
1. Untuk memahami apakah perusahaan telah mencoba mencapai kinerja sosial terbaik sesuai yang diharapkan.
2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja sosial.
3. Untuk memahami implikasi dari apa yang dilakukan perusahaan tersebut.
4. Untuk memahami apakah praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja sosial tidak merugikan kinerja bisnisnya.

PERUSAHAAN

Menurut Zeghal dan Ahmed (1990:43), informasi-informasi sosial yang diungkapkan dalam pelaporan sosial perusahaan antara lain adalah:

1. Lingkungan, meliputi: pengendalian polusi dalam operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan pemrosesan sumber daya alam, konservasi sumber daya alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi: konservasi energi dalam operasi bisnis, produk-produk dengan efisiensi energi, pengungkapan yang berhubungan dengan energi yang lain.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi: memperkerjakan kelompok minoritas dan perempuan, kemajuan kelompok minoritas dan perempuan, memperkerjakan kelompok kepentingan khusus yang lain, mendukung bisnis kelompok minoritas, praktik-praktik luar negeri yang bertanggung jawab secara sosial, pernyataan lain mengenai praktik bisnis yang wajar.
4. Sumber daya manusia, meliputi: kesehatan dan keamanan karyawan, pelatihan karyawan, pengungkapan lain mengenai sumber daya manusia.
5. Keterlibatan masyarakat, meliputi: aktivitas masyarakat, aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan seni dan pengungkapan aktivitas masyarakat yang lain.
6. Produk, meliputi: keamanan produk, pengurangan polusi akibat penggunaan produk, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan produk.
7. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang lain.

Pengungkapan sosial dalam arti luas meliputi hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* (seperti investor, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat). Dalam arti sempit, pengungkapan sosial dikategorikan sebagai penyediaan data terhadap lingkungan fisik (polusi); hubungan dengan



keselamatan dan keamanan pekerja dan keamanan produk (Epsteir and Freedman 1994:96)

Di Jepang, pengungkapan informasi sosial dikelompokkan menjadi lima, yaitu (Yamagami and Kokubu, 1991:34-35): lingkungan, keterlibatan masyarakat, hubungan karyawan, penelitian dan pengembangan, dan keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas internasional.

Di Eropa Barat, laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan berisi informasi mengenai (Moir, 2001): tempat kerja, pangsa pasar, lingkungan, masyarakat, etika dan hak asasi manusia.

## 7. KARAKTERISTIK PERUSAHAAN VS PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL PERUSAHAAN

Beberapa karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial antara lain (Hackstone and Milne, 1996:81-83)

1. Ukuran perusahaan. Perusahaan yang semakin besar akan melakukan aktivitas yang semakin banyak, akibatnya dampak aktivitas tersebut pada masyarakat juga lebih luas. Dengan semakin luasnya dampak aktivitas perusahaan kepada masyarakat, maka semakin banyak pula *shareholder* yang menaruh perhatian pada program-program sosial yang dikomunikasikan dalam laporan tahunan. Davey (1982) dan Ng (1985) gagal mendukung hipotesis tersebut.
2. Lingkup industri. Industri merupakan faktor yang secara potensial mempengaruhi praktik pengungkapan informasi sosial perusahaan. Menurut Diekers and Preston, (1977), perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi, seperti industri ekstraktif (pertambangan), lebih menyukai mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungan dibandingkan perusahaan yang lain. Perusahaan yang berorientasi pelanggan diharapkan memiliki perhatian yang lebih besar dalam menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan *image* perusahaan dan menaikkan penjualan (Cowen, 1987).

pengungkapan mengenai tekanan maupun kritik-kritik sosial. Sehingga ada hubungan positif antara klasifikasi industri dan pengungkapan informasi sosial. Kelly (1981), yang melakukan studi di Australia, menemukan bahwa perusahaan industri primer dan sekunder cenderung mengungkapkan informasi lingkungan dan energi lebih besar dibandingkan perusahaan tersier. Namun hal tersebut berlaku berlawanan untuk informasi yang berkaitan dengan interaksi masyarakat. Sedangkan Cowen (1987), yang melakukan studi di Amerika Serikat, menemukan bahwa kategori industri mempengaruhi pengungkapan tentang energi dan keterlibatan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Patten (1991) dan Roberts (1992) yang menemukan hubungan positif antara industri berprofil tinggi dengan jumlah pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Sedangkan Davey (1982) dan Ng (1985) gagal menemukan hubungan antara tipe industri dan pengungkapan sosial perusahaan pada perusahaan-perusahaan di New Zealand.

3. Kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Hubungan antara pengungkapan informasi sosial perusahaan dan profitabilitas telah dipostulatkan merefleksikan pandangan bahwa respon sosial merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan laba perusahaan (Bowman and Haire, 1976). Pengungkapan sosial perusahaan dipercaya dapat merefleksikan aktivitas sosial perusahaan dan merupakan pendekatan manajemen yang adaptif yang sesuai dengan dinamika, lingkungan multidimensional dan kemampuan untuk menemukan tekanan sosial dan respon atas kebutuhan sosial (Hackstone and Milne, 1996:82). Studi empiris mengenai hubungan antara pengungkapan sosial perusahaan dan profitabilitas membuahakan hasil yang beraneka ragam. Bowmann and Haire (1976), Preston (1978) dan Robert (1992) menemukan hubungan positif antara keduanya. Sedangkan Cowen (1987), Patten (1991), Davey (1982), dan Ng (1985) gagal menemukan hubungan antara keduanya. Sementara Belkaoui and

Karpik (1989) menemukan terjadinya konflik hubungan yang sulit diinterpretasikan.

4. Pengaruh dari negara. Andrew (1989) melaporkan bahwa negara mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan, meskipun sulit untuk menilai reliabilitas dari hasil tersebut. Sejak studi tersebut dilakukan di perusahaan-perusahaan New Zealand, pengaruh negara pada pengungkapan informasi sosial perusahaan belum diteliti lagi.

## 8. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI SOSIAL

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi sosial adalah (Belkaoui and Karpik, 1989:38-40):

1. Rasional umum. Pengeluaran yang bersifat spesifik dan material merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan kinerja sosial. Pengeluaran tersebut juga akan mengurangi laba bersih. Pembentukan *image* dan perhatian terhadap kepentingan publik akan mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial. Kinerja sosial memiliki dampak yang material terhadap laba bersih yang dilaporkan pada periode sekarang dan variabel-variabel keuangan kunci yang dibatasi perjanjian kontraktual. Sehingga secara rasional, keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial searah dengan penurunan laba bersih yang dilaporkan, yang merupakan hasil dari pengeluaran kinerja sosial. Perusahaan dengan biaya pengontrakan dan pemantauan yang lebih rendah, dan wawasan yang luas akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial. Pengeluaran untuk kinerja sosial akan terjadi jika perusahaan memiliki sumber daya memadai dan kinerja ekonomis yang baik, sehingga keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial juga berkorelasi positif dengan kinerja ekonomis atau profitabilitas. Dari studi yang dilakukan Belkaoui and Karpik ditemukan bahwa keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial berkorelasi positif dengan kinerja sosial, kinerja

ekonomis dan wawasan, dan berkorelasi negatif dengan biaya pengontrakan dan pemantauan.

2. Kinerja sosial. Mengukur kinerja sosial adalah hal yang sulit, karena berhubungan dengan isu keefektifan organisasi. Kinerja sosial organisasi tidak dapat dibedakan dengan keefektifan organisasi. (Strand, 1983:90). Kinerja sosial dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara organisasi dengan kebutuhan, harapan, dan permintaan pihak eksternal yang berhubungan secara langsung dengan produk atau pasar perusahaan. (Ullmann, 1985).
3. Variabel keuangan. Perjanjian yang dibatasi, termasuk di dalamnya perjanjian utang akan mengurangi kemampuan manajemen dalam menciptakan transfer kesejahteraan antara *shareholders* dengan *bondholders* (Jensen and Meckling, 1976; Smith and Warner, 1979). Batasan-batasan umum termasuk di dalamnya *financial leverage* (rasio utang jangka panjang pada total aset) dan tingkat pembayaran (dividen untuk laba ditahan yang tidak dibatasi yang tersedia secara maksimum). Keputusan untuk mengungkap informasi sosial sama dengan keputusan melakukan pengeluaran untuk kinerja sosial, dan hal tersebut mengurangi *earnings*.
4. Kebijakan yang diambil. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan pada umumnya dikritisi oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar jumlah yang dilaporkan. Perusahaan dapat memilih teknik akuntansi dan tindakan-tindakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan dan memilih atau mengurangi pandangan politik. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan biasanya terjadi pada perusahaan yang berukuran besar, dan memiliki intensitas modal yang besar pula, sehingga risiko pasar sistematis relatif tinggi. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga merupakan respon atas permintaan aktivis-aktivis sosial.
5. Kinerja ekonomis. Hubungan antara pengungkapan sosial, kinerja sosial, dan kinerja ekonomis merupakan ekspresi terbaik dari pandangan bahwa kebutuhan akan respon sosial manajemen sama dengan kebutuhan akan keahlian superior yang akan menjadikan perusahaan

profitable. Menuntut akuntabilitas perusahaan (1997:37-43), kesadaran dan perhatian manajemen terhadap masalah-masalah sosial juga diperlukan dalam meningkatkan kinerja keuangan, sehingga investasi perusahaan menjadi menarik". Perusahaan yang mengungkapkan informasi sosial cenderung memiliki tingkat pengembalian dan pengembalian harga saham diferensial yang lebih besar.

## 9. MEDIA DAN FORMAT PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL PERUSAHAAN

Media pengungkapan informasi sosial perusahaan secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Yamagami and Kokubu, 1991): laporan mandatori/wajib dan laporan sukarela, meliputi: laporan operasi, laporan tahunan, dan laporan hubungan kemasyarakatan.

Di Jepang, sebagian besar informasi sosial perusahaan diungkapkan pada laporan hubungan kemasyarakatan.

Sedangkan format pengungkapan informasi sosial perusahaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pengungkapan yang bersifat kualitatif, biasanya bersifat deskriptif dan positif dan dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dan pengungkapan yang bersifat kuantitatif, biasanya disajikan dengan perhitungan secara moneter dan statistik.

## 10. LOKASI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DAN JUMLAH HALAMAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

Ada empat lokasi dalam laporan tahunan yang dipakai untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan, yaitu: laporan direktur, catatan dalam laporan tahunan, bagian terpisah dari laporan tahunan, dan laporan nilai tambah. termasuk bagian laporan tahunan, yaitu laporan rugi laba yang dimodifikasi. Biasanya dibuat jika pengungkapan yang ada kurang cukup dan sulit dipahami.

Total halaman yang diperlukan untuk mengungkapkan masalah-masalah sosial dalam laporan tahunan biasanya kurang dari setengah halaman, dan hanya sedikit sekali perusahaan yang memerlukan lebih dari satu halaman untuk mengungkapkan masalah-masalah sosial perusahaan.

## 11. KENDALA DALAM PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN

Pengungkapan kinerja sosial perusahaan dalam laporan tahunan telah dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Singapura dan Malaysia, namun belum banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang. Beberapa kendala yang dihadapi perusahaan, khususnya bagi negara-negara berkembang dalam melakukan pengungkapan kinerja sosial antara lain: (Shiraz, 1998:58-59)

1. Belum terdapat peraturan atau standar baku yang mengatur mengenai pengungkapan kinerja sosial, kebanyakan masih bersifat sukarela.
2. Hanya sedikit perusahaan yang memiliki para akuntan yang kompeten di bidang akuntansi sosial, meskipun dalam hal ini dituntut juga adanya kerja sama dengan para ahli dari bidang lain, seperti hukum, teknik, maupun sosiologi.
3. Perusahaan enggan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk menyusun laporan mengenai kinerja sosialnya, apalagi jika mereka beranggapan bahwa *image* mereka akan tetap baik meskipun mereka tidak memberikan laporan mengenai kinerja sosialnya.
4. Kurangnya perhatian pemerintah negara-negara berkembang terhadap masalah sosial dan lingkungan karena tidak adanya atau kurangnya dana untuk masalah tersebut, sementara itu dukungan dari negara donor maupun institusi keuangan internasional (seperti *World Bank* dan *IMF*) relatif belum mencukupi.
5. Pembuatan laporan sosial memerlukan waktu yang banyak, sehingga seringkali hal tersebut menyebabkan tertundanya penerbitan laporan tahunan.

## 12. PENUTUP

Hubungan antara akuntabilitas dan akuntansi sosial telah didiskusikan secara luas. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan antara kelompok, individu, organisasi, dan hak-hak untuk mendapatkan informasi (Gray, Dey, dkk, 1997:334). Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa

akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan laporan atas tindakan yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab yang yang diembannya. (Gray, Dey, dkk, 1997:334). Sifat hubungan serta hak-hak untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi mengenai kinerja sosial perusahaan ditentukan oleh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan asumsi terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dan untuk meningkatkan *image* dan reputasi, serta sebagai usaha menjaga kelangsungan hidup perusahaan di masyarakat, sudah sewajarnya perusahaan mengungkapkan kinerja sosialnya kepada masyarakat, sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat. Meskipun banyak kendala yang akan dihadapi, hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang akan dipetik oleh perusahaan di masa yang akan datang. Hal yang terpenting adalah ada kesadaran dan usaha, sesuai kapasitas masing-masing perusahaan untuk melakukan perbaikan terus menerus demi kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alexander, G.J. and Buchholtz, R.A. (1978), Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance, *Academy of Management Journal*, Vol. 21, p: 479-486.

Andrew, B.H., Gul, F.A., Guthrie, J.E., and Teoh, H.Y. (1989), A Note on Corporate Social Disclosure Practices in Developing Countries: The Case of Malaysia and Singapore, *British Accounting Review*, Vol. 21, No. 4, p: 371-376.

Belkaoui, A. and Karpik, P.G. (1989), Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 2, No. 1, p: 11-21.

Bowman, E.H. and Haire, M. (1976), Social Impact Disclosure and Corporate Annual Reports, *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 1, No. 1, p: 11-21.

Business Impact (2000), *winning with Integrity: A Guide to Social Responsibility, Business in the Community*, London.

CCPA (2000), *Corporate Community Involvement: Establishing a Business Case*, Centre for Corporate Public Affairs, Melbourne.

Clarkson, M.B.E. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, *Academy of Management Review*, Vol. 20, p: 92-117.

Cowen, S.S., Ferreri, L.B., and Parker, L.D. (1987), The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: a Typology and Frequency-Based Analysis, *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 12, No. 2, p: 111-122.

Davey, H.B. (1982), *Corporate Social Responsibility Disclosure in New Zealand: An Empirical Investigation*, unpublished working paper, Massey University, Palmerston North.

Diekers, M. and Preston, L.E. (1977), Corporate Social Accounting and Reporting for the Physical Environment: A Critical Review and Implementation Proposal, *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 2, No. 1, p: 3-22.

DiMaggio, P. J. and Powell, W.W. (1983), The Iron Cage Revisited; Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, *American Sociological Review* Vol. 48, p: 147-160.

Donaldson, T. and Dunfee, T.W. (1999), *Ties That Bind*, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Donaldson, T. and Preston, L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, *Academy of Management Review*, Vol. 20, p: 65-91.

Eipstein, M.J. and Freedman, M. (1994), Social Disclosure and the Individual Investor, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 7, No. 4, p: 94-109.

Freedman, M. and Wasley, C. (1983), An Assesment of The Information Content of Social Disclosure", *Proceeding of the Mid-Atlantic Regional American Accounting Association Meeting*, p: 46-54.

Freeman, R.E. (1984), *Strategic Management. A Stakeholder Approach*, Pitman Publishing, Boston, MA.

- Chicago Press, Chicago, IL.
- Gray, R., Dey, C., Owen, D., Evans, R., and Zadek, S. (1997), Struggling with the Praxis of Social Accounting, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, p: 78-101.
- Gray, R., Kouhy, R., and Lavers, S. (1995), Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure", *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, p: 47-77.
- Gray, R., Owen, D. and Adams, C. (1996), *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*, Prentice-Hall Europe, Harlow.
- Gray, R., Owen, D and Maunders, K. (1987), *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice Hall, London.
- Gray, R., Owen, D and Maunders, K. (1988), Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and Social Contract, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 1, No. 1, p: 6-20.
- Guthrie, J. and Parker, L.D. (1990), Corporate Disclosure Practice: a Comparative International Analysis, *Advances in Public Interest Accounting*, Vol. 3, p: 159-175.
- Guthrie, J. and Mathews, M.R. (1985), Corporate Social Accounting in Australia, in Preston, L.E., (Ed), *Research in Corporate Social Performance and Policy*, Vol. 7, p: 251-277.
- Hackston, D. and Milne, M.J. (1996), Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies", *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol 9, no. 1, p: 77-108.
- Holmes, S.L.(1976), Executive Perceptions of Corporate Social Responsibility. *Bussiness Horizons*, Vol 19, No. 3, p: 34-40.
- Imam, Shaded (2000), Corporate Social Performance in Bangladesh, *Managerial Auditing Journal*, 15/3, p: 133-141.
- Jensen, M.C. and Mckling, W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Finacial Economics*, Vol. 3, p: 305-360.
- Jones, T.M. and Wicks, A.C. (1999), Convergent Stakeholder Theory, *Academy of Management Review*, Vol. 24, p: 206-221.
- Kelly, G.S. (1981), Australian Social Responsibility Disclosure: Some Insights into Contemporary Measurement, *Accounting and Finance*, Vol. 21, No. 2, p: 97-104.
- Lindblom, C.K. (1994), *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*, paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, NY.
- Mitchell, R.K., Agle, B.R. and Wood, D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts", *Academy of Management Review*, Vol. 22, p: 853-886.
- Moir, Lance, (2001), What Do We Mean by Corporate Social Responsibility?, *Corporate Governance*, Vol. 1, p: 16-22.
- Ng, L.W. (1985), *Social Responsibility Disclosure of Selected New Zealand Companies for 1981, 1982 and 1983*, Occasional paper No. 54, Massey University, Paarlinterston North.
- Ostlund, L.E. (1977), Attitudes of Managers toward Corporate Social Responsibility", *California Management Review*, Vol. 19, No. 4, p: 35-49.
- Patten, D.M. (1991), Exposure Legitimacy, and Social Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 10, p: 297-308.
- Pattern, D.M. (1992), Intra-Industry Environmental Disclosure in Response to the Alaskan Oil Spill: a Note on Legitimacy Theory", *Accounting, Organization, and Society*, Vol. 17, No. 5, p: 471-475.
- Porwal, L.S. (1993), *Accounting Theory*, Tata McGraw-Hill Publishing, New Delhi.
- Preston, L.E. (1978), Analysing Corporate Social Performance: Method and Results, *Journal of Contemporary Business*, Vol. 7, No. 1, p: 135-150.
- Ramathan, K.V. (1976), Toward a Theory of Corporate Social Accounting, *The Accounting Review*, Vol. 51, No. 3, p: 516-528.
- Roberts, R.W. (1992), Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Application of Stakeholder Theory, *Accounting, Organization, and Society*, Vol. 17, No. 6, p: 595-612.

Shiraz, Abu. (1998), Social Reporting: Nice Idea, but... *Australian CPA (AAA)* Vol. 68, November, p: 58-59.

Smith, C. and Warner, J. (1979), Financial Contracting: an Analysis of Bond Covenants. *Journal of Finance Economics*, Vol. 7, p: 117-162.

Strand R. (1993), A Systems Paradigm of Organizational Adaptations to the Social Environment, *Academy of Management Review*, Vol. 8, p: 90-96.

Suchman, M.C. (1995), Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, *Academy of Management Review*, Vol. 20, p: 571-610.

Swift, T., Owen, D. and Humphrey, C. (2001), Social Status, *Financial Management*, London, p: 17-18.

Ullmann, A.A. (1985), Data in Search of a Theory: a Critical Examination of the Relationship among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of US Firm, *Academy of Management Review*, Vol. 10, p: 540-547.

Wood, D.J. (1991), Corporate Social Performance Revisited, *Academy of Management Review*, Vol. 16, p: 691-718.

Zadek, Simon, (1998), Balancing Performance, Ethics, and Accountability, *Journal of Business Ethics*, Vol. 17, October, p: 1421-1441.

Zeghal, D. and Ahmed, S.A. (1990), Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol 3, No. 1, p: 38-53.

EDI KUSTANTO

staff pengajar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma

### **Abstract**

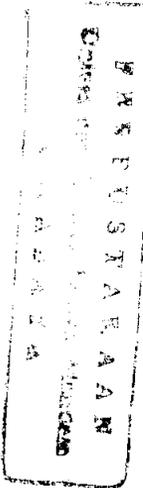
*Competitive advantage means not only matching or surpassing what competitors can do, but also exploring and finding what customers want and then profitably satisfying (and even exceeding) their expectations. Value chains analysis is a strategic tool to measure the importance of the customers' perceived value. Value chains analysis is useful to assess competitive advantage and to determine strategic advantages and disadvantages of companies' activities and value creating processes in the marketplace.*

*Keyword: Value Chain, Strategic Cost Management, Competitive Advantage*

### **1. PENDAHULUAN**

Analisis *value chain* bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman tentang sumber-sumber keunggulan kompetitif di dalam industri dan posisi kompetitif perusahaan dalam menghasilkan *customer value*. Analisis *value chain* menyediakan kerangka kerja intelijen kompetitif untuk mengidentifikasi dan memilah-milah berbagai aktivitas yang berbeda-beda di dalam perusahaan. Pemilahan tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi: (1) faktor-faktor penentu biaya untuk melakukan aktivitas yang berbeda-beda, (2) alasan yang menyebabkan struktur biaya berbeda dari pesaing, (3) aktivitas-aktivitas mana yang dilakukan secara efisien dan mana yang tidak efisien, (4) cara biaya suatu aktivitas berpengaruh terhadap biaya aktivitas lain, dan (5) memilih aktivitas mana yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak dilakukan.

Analisis *value chain* menawarkan kesempatan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan antara perencanaan strategik dan akuntansi manajemen sehingga



# AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN JAWABAN TERHADAP KEBUTUHAN STANDAR LAPORAN KEUANGAN DAN JASA JAMINAN LINGKUNGAN

INGE GUNAWAN<sup>1)</sup>

## ABSTRACT

Many companies are becoming more responsive to investors' concerns about the environment by voluntarily compiling and issuing periodic environmental reports that are essentially independent of the annual financial reports. Until now, the environmental reports are still a disclosure, without verification that assures its credibility. The need for external verification of environmental reports may create the primary challenges: the absence of environmental reporting standards, the absence of standards for verification of environmental reports, and the very scant of public accountants that are empowered to have qualification to offer a needed assurance service and verification.

## PENDAHULUAN

Sejak pertengahan tahun 1970-an banyak perusahaan industri yang berjuang dengan konsep pelaporan keuangan berkaitan dengan lingkungan. Beberapa perusahaan berusaha untuk peduli terhadap laporan keuangan berkaitan dengan biaya lingkungan, sementara beberapa lainnya bersikap pasif, bahkan dapat dikatakan cenderung untuk menghindari biaya lingkungan tersebut.

Dewasa ini, tuntutan akan tanggung jawab lingkungan semakin berkembang. Hampir semua perusahaan industri wajib membayar biaya lingkungan tersebut jika tidak mau dikenai klaim berkaitan dengan

limbah yang dikeluarkannya. Yang menjadi masalah adalah sampai saat ini belum ada standar laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan. Akibat perusahaan tidak tahu bagaimana cara melaporkan atau bagaimana perlakuan akuntansi biaya lingkungan tersebut. Selain itu, laporan keuangan yang menjadi berbeda-beda sehingga tidak dapat dipadukan satu sama lain.

Tujuan tulisan ini untuk melihat praktik aturan akuntansi berkaitan dengan lingkungan yang telah ada, sekaligus melihat adanya kebutuhan standar laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan dan suatu jasa jaminan (asuransi) lingkungan yang melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan lingkungan tersebut. Di samping itu, tujuan tulisan adalah untuk melihat *cost and benefit* bagi perusahaan atau industri yang membuat laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan.

Beberapa perusahaan menjadi lebih responsif terhadap pihak luar (eksternal) khususnya investor mengenai lingkungan. Di samping itu berbagai pihak baik intern maupun ekstern membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan. Tetapi sampai saat ini standar laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan belum ada, sehingga kredibilitas laporan keuangan tersebut dipertanyakan. Sementara laporan keuangan yang dibuat berkaitan dengan lingkungan masih berupa *disclosure* tanpa penilaian yang menjamin kredibilitasnya.

Laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan tidak memiliki kredibilitas jika tidak diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga.

<sup>1)</sup> Inge Gunawan, SE., Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta

Meningkatnya tuntutan terhadap laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan, telah memberikan tempat bagi kantor akuntan publik untuk mengembangkan keahlian dalam hal memberikan penilaian dan verifikasi terhadap laporan keuangan lingkungan.

#### Praktik dan Aturan Akuntansi Berkaitan dengan Lingkungan yang Telah Ada

Banyaknya pertanyaan dan ketidakpastian mengenai biaya lingkungan telah menantang para akuntan dan badan-badan pembentuk standar. Namun demikian, sampai saat ini, masih sedikit sekali literatur petunjuk yang diotorisasi untuk mengatur akuntansi berkaitan dengan biaya lingkungan tersebut.

Pada tahun 1975, FASB menerbitkan *Statement on Financial Accounting Standards (SFAS) No. 5* mengenai "accounting for contingencies", yang mencoba membantu para akuntan mengetahui biaya-biaya masa mendatang yang berpotensi, seperti perbaikan lingkungan (Schmidt Richard J, Dr., 1997). Rugi kontijensi harus dilaporkan dalam laporan keuangan jika di dalamnya mengandung peristiwa masa datang yang mengakibatkan utang dan jumlah rugi tersebut dapat diperkirakan. Walaupun SFAS No. 5 merupakan *statement* yang berhubungan dengan risiko-risiko lingkungan, tetapi *statement* ini tidak khusus berbicara mengenai laporan keuangan lingkungan.

Ada dua alasan yang membuat SFAS No. 5 tidak memadai untuk dijadikan standar akuntansi berkaitan dengan lingkungan (diadopsi dari Johnson L. Todd, 1993). Alasan pertama, *statement* ini tidak jelas/samar-samar dalam memberikan petunjuk mengenai akuntansi lingkungan dan juga sangat terbuka untuk interpretasi yang subjektif. Alasan kedua adalah utang akibat biaya lingkungan tidak terjadi setelah adanya suatu kecelakaan/musibah, yang mengakibatkan terjadinya pendekatan reaktif lebih daripada pendekatan proaktif.

Pada tahun 1976, sebuah interpretasi FASB "Reasonable Estimation of the Amount of a Loss", menunjukkan bahwa salah satu kalimat dalam SFAS No. 5 yang berbunyi "jumlah rugi harus memiliki alasan untuk diperkirakan" tidak menyediakan dasar kebenaran untuk menunda pencatatan biaya perbaikan

lingkungan yang diperkirakan (diadopsi dari Schmidt Richard J, Dr., 1997). Ketertarikan secara nasional dalam hal pembersihan limbah telah meningkatkan tekanan untuk adanya pemecahan/solusi secara hukum. Sebagai respon Pemerintah, dikeluarkan *Resource Conservation and Recovery Act of 1976*. Tetapi masih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan *disclosure* untuk akuntansi pertanggungjawaban sosial. Oleh karena itu, dikeluarkanlah hukum federal yang kedua yaitu *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA)*, yang menyediakan \$1,6 milyar dana untuk menutup biaya-biaya berkaitan dengan limbah, yang kemudian dikenal dengan istilah "superfund" (diadopsi dari Wood Dorothy, 1998).

Langkah berikutnya adalah membentuk agen evaluasi federal yang bertanggung jawab yaitu *Environmental Protection Agency (EPA)* yang membuat prosedur badan hukum untuk pelaporan praktik-praktik pembuangan limbah perusahaan yang kemudian dijadikan analisis lingkungan. Pada awal tahun 1981, EPA telah mengidentifikasi lebih dari 30.000 tempat untuk diinvestigasi (Schmidt Richard J, Dr., 1997). Proses yang dilakukan EPA termasuk penilaian risiko dari kuantitas dan identitas substansi limbah di setiap tempat. Perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai tinggi akan dimasukkan ke dalam *National Priorities List (NPL)* untuk tindakan perbaikan terhadap lingkungan. NPL membuat perusahaan sulit untuk lari dari kewajibannya terhadap biaya lingkungan, tetapi sayangnya tidak ada penalti/hukuman untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mencantumkan *disclosure* informasi lingkungan dalam laporan keuangannya. Tetap belum terbentuk standar, bahkan terjadi kebebasan dalam pelaporan *disclosure*.

Pada tahun 1993, *Financial Accounting Standard Board (FASB)* melalui *Emerging Issues Task Force (EITF)* menerbitkan *Accounting for Environmental Liabilities*. EITF mencapai konsensus bahwa biaya-biaya utang perbaikan lingkungan seharusnya berdasar pada suatu rencana khusus yang sudah dipersiapkan untuk perbaikan akibat kontaminasi (diadopsi dari Johnson L. Todd, 1993). Hampir bersamaan dengan EITF, pada tahun 1994, *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* melalui *Statement of Position*, mengeluarkan *Disclosure of Certain Significant Risk and Uncertainty*, yang

berisi (1) perkiraan/estimasi akan berubah pada masa yang akan datang, dan (2) pengaruh perubahan akan sangat material untuk laporan keuangan (Schmidt Richard J. Di., 1997). Tetapi secara keseluruhan, pelaporan keuangan hasil aturan atau *disclosure* ini tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan arah yang jelas bagi akuntan untuk membuat laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan. Bagaimanapun usaha-usaha untuk membuat standar pelaporan keuangan berkaitan dengan lingkungan yang akan memaksa perusahaan bertanggung jawab atas lingkungannya, harus terus dilakukan akibat makin banyaknya limbah dan pencemaran lingkungan.

Pada bulan Juni 1993, *the Securities and Exchange Commission* (SEC) menerbitkan *Staff Accounting Bulletin 92* (SAB 92) yang menegaskan kebutuhan adanya *disclosure* yang lebih matang dan berkembang untuk laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan (diadopsi dari Chadwick Bill, Rouse Robert W., dan Summa John, 1993). Tetapi satu tahun kemudian ditemukan bahwa lebih dari sepertiga perusahaan publik di US tidak melaporkan utang berkaitan dengan lingkungan pada laporan tahunan mereka. Akibat kepedulian SEC tersebut, AICPA menerbitkan *Statement of Position 96-1* pada bulan Oktober 1996, *Statement* ini berusaha menyediakan klarifikasi bagi akuntan publik dan klien mereka suatu *disclosure* mengenai utang perbaikan lingkungan yang memadai. Pada bulan Februari 1997, AICPA kembali mengklarifikasi situasi dengan menerbitkan *Statement of Position on Environmental Remediation Liabilities*. *Statement* ini tidak menyediakan petunjuk untuk kontrol polusi yang sedang terjadi atau restorasi limbah di masa mendatang, tetapi fokusnya pada perbaikan sebelum terlambat (diadopsi dari Beets S. Douglas dan Souther Christopher C., 1999). *Statement* ini hanya beredar di US.

Tekanan untuk membuat *disclosure* yang lebih baik, datang dari EPA pada tahun 1998. Pada awal tahun 1998, EPA mulai memberikan syarat tambahan berkaitan dengan biaya lingkungan, berupa *disclosure* melalui internet bagi lima industri besar yaitu industri minyak, baja, besi, otomobil, dan kertas (Beets S. Douglas dan Souther Christopher C., 1999). Sebenarnya mulai tahun 1990-an, EPA mulai memberi sanksi bagi perusahaan yang berusaha menghindari biaya lingkungan. Tetapi pada tahun 1996, EPA

memutuskan untuk mengurangi bahkan berusaha menghilangkan sanksi bagi tanggung jawab perusahaan untuk membentuk audit internal secara periodik, mengklarifikasi masalah yang ditemukan, dan melaporkan secara sukarela informasi mengenai biaya lingkungan.

Di Indonesia, laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan belum diatur dengan jelas dan tegas. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur laporan keuangan di Indonesia melalui PSAK No.8 berusaha mengatur laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan tersebut. PSAK No.3 berbicara mengenai Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca. Dalam PSAK No.8 dikatakan bahwa "Kontinjensi merupakan suatu kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang tidak pasti terjadi di masa depan". Walaupun utang biaya lingkungan dapat dikategorikan dalam kontinjensi, tetapi PSAK No.8 tidak mengatur laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan tersebut secara spesifik.

#### Kebutuhan akan Suatu Standar dan Verifikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kreuze pada tahun 1996, dikatakan bahwa jumlah investasi lebih didasarkan pada kriteria etika lingkungan, dan politik. Banyak investor dan pemegang saham membuat keputusan berdasarkan informasi laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan yang diterbitkan oleh perusahaan. Konsekuensinya, publikasi laporan keuangan baru komprehensif, akurat, dan reliabel. Untuk itu, laporan tersebut harus dijamin oleh verifikasi profesional eksternal. Sektor industri yang berkembang, percaya bahwa fungsi jaminan verifikasi laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan didukung dan diselesaikan oleh profesi akuntan publik.

Kebutuhan akan verifikasi secara eksternal didukung oleh beberapa tuntutan utama. Pertama ketika standar pelaporan berkaitan dengan lingkungan dirasakan penting, verifikasi eksternal akan memaksa perubahan pelaporan berkaitan dengan lingkungan tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan. Kedua verifikasi eksternal laporan-laporan berkaitan dengan

lain, laporan secara periodik akan menjadi jaminan dan tidak menimbulkan tambahan bagi laporan keuangan tahunan perusahaan dengan pertimbangan, masalah lingkungan tersebut cukup *significant* (besar). Ketiga, ancaman kesalahpahaman pengaudit dan keputusan oleh pemegang saham dan pemerintah yang dapat mengakibatkan proses pengadilan, dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan adanya verifikasi dari pihak ketiga yang independen. Masalah serius dapat dihindarkan oleh isu-isu lingkungan, dari masalah perusahaan terkena pinalti sampai perusahaan tersebut bangkrut. Verifikasi eksternal dapat menjaga perusahaan dari pembuatan *disclosure* yang tidak memadai atau tidak akurat dan sekaligus menjunjung terbentuknya *disclosure* yang reliabel. Keempat, tanpa kredibilitas yang direkomendasi melalui verifikasi eksternal yang kompeten, banyak investor hanya mempertimbangkan publikasi laporan berkaitan dengan lingkungan yang dikatakan "bersih". Beberapa ahli lingkungan mengatakan bahwa publikasi laporan secara cerdik telah mengemas kembali data lingkungan yang telah tersedia dan mengambil kemungkinan terbaik untuk dimasukkan dalam publikasi laporan berkaitan dengan lingkungan tersebut. Beberapa ahli mengenai preferensi dan tingkah laku investor, mengatakan bahwa makin banyak investor yang peduli dengan masalah lingkungan dan memutuskan investasinya dengan melihat catatan mengenai lingkungan yang baik.

Ketika kebutuhan akan verifikasi eksternal laporan-laporan berkaitan dengan lingkungan muncul, tantangan-tantangan utama juga muncul yaitu belum adanya standar berkaitan dengan laporan keuangan lingkungan, belum adanya standar berkaitan dengan verifikasi laporan-laporan lingkungan, dan sangat jarang ada akuntan publik yang memiliki kualifikasi untuk melakukan jasa penilaian dan verifikasi tersebut. Pada tahun 1996, *the Global Environmental Management Initiative* (GEMI), suatu organisasi bisnis yang proaktif terhadap lingkungan, menerbitkan hasil studi mengenai laporan-laporan lingkungan (diadopsi dari Beets S. Douglas dan Souther Christopher C., 1999). Studi tersebut termasuk wawancara dengan ahli lingkungan, investor, media, pembuat aturan, dan perusahaan-perusahaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak ketiga dalam laporan lingkungan, dalam hal ini akuntan publik, masih memiliki nilai yang

kecil karena tidak adanya petunjuk dan standar berkaitan dengan laporan dan verifikasi. Selanjutnya hasil wawancara tersebut menyaratkan bahwa standar yang dibutuhkan seharusnya meliputi lingkup, keterbatasan, dan isi dari verifikasi dan laporan pihak ketiga menuju pola pengesahan akuntansi yang berterima umum.

Profesi akuntansi di US harus belajar mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi dari praktik verifikasi lingkungan di Eropa. Pada tahun 1993, *the European Council* dari Uni Eropa mengadopsi *the Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS), suatu rencana aturan yang ditujukan untuk promosi perubahan dalam *performance* lingkungan industri (diadopsi dari Beets S. Douglas dan Souther Christopher C., 1999). Dengan adanya standar khusus dan verifikasi eksternal, laporan-laporan berkaitan dengan lingkungan yang dipersiapkan di bawah EMAS lebih bermutu dan lebih reliabel dari pada yang terjadi di US. Walaupun EMAS hanya memiliki pengaruh dalam waktu relatif singkat, tetapi terbukti bahwa EMAS tersebut sukses dan diterima oleh komunitas bisnis di Eropa.

Ketika verifikasi eksternal dari program dan laporan lingkungan tidak dilakukan di US, beberapa perusahaan secara sukarela menjalani pengujian berkaitan dengan lingkungan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Tetapi sedikit sekali perusahaan yang melampirkan hasil laporan berkaitan dengan lingkungan tersebut. Salah satu alasan utama tidak dibuatnya *disclosure* oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah tidak adanya standar pelaporan berkaitan dengan lingkungan. Tetapi beberapa perusahaan, bagaimanapun, percaya bahwa dengan menerbitkan laporan berkaitan dengan lingkungan yang diverifikasi akan membangun kepercayaan publik.

Untuk menghadapi tantangan dalam mengembangkan standar pelaporan dan verifikasi berkaitan dengan lingkungan, beberapa langkah telah diambil oleh organisasi-organisasi yang beragam jenisnya. Selain GEMI yang telah disebutkan di atas, beberapa organisasi lain seperti, *International Standards Organization* (ISO), *the Coalition for Environmentally Responsible Economics*, dan *the Council on Economic Priorities* telah mengembangkan standar dan prinsip yang berguna, walaupun partisipasi dalam hal ini masih bersifat sukarela, dan sebagai konsekuensinya, belum

ada dampak dalam bentuk peraturan.

Salah satu dari standar berkaitan dengan lingkungan secara sukarela yang lebih ekstensif adalah ISO 14000, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1996 oleh ISO. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk membuat design, mengimplementasikan, dan memonitor sistem manajemen lingkungan. Standar ISO 14000 juga menyediakan cara yang obyektif untuk memverifikasi laporan *performance* lingkungan perusahaan.

#### Pentingnya Standar Pelaporan Lingkungan

Standar pelaporan lingkungan yang diakui dan diterapkan secara luas akan memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan tanggung jawab mereka sekaligus memampukan mereka untuk menyampaikan laporan yang bermanfaat yang dibutuhkan, di lain pihak juga membantu manajemen perusahaan mempertimbangkan masalah lingkungan dalam operasi mereka. Beberapa kriteria berstandar ini juga memampukan manajemen perusahaan untuk membandingkan usaha-usaha mereka dalam menghadapi masalah lingkungan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pesaing mereka. Tetapi sampai saat ini, perusahaan yang proaktif terhadap lingkungan masih memiliki perbedaan yang kecil (tidak menonjol) dibanding perusahaan lain yang tidak proaktif terhadap lingkungan karena tidak adanya standar pelaporan lingkungan.

Standar pelaporan lingkungan juga menguntungkan investor dan pemegang saham lain dengan cara membuat laporan tersebut lebih konsisten dan dapat diperbandingkan. Karena adanya perbedaan yang ekstrem dan laporan lingkungan periodik yang telah ada tidak dapat diperbandingkan, investor mengalami kesulitan dalam menggunakan laporan tersebut untuk menentukan perusahaan mana yang lebih berorientasi pada lingkungan. Akibat tidak adanya standar, laporan perusahaan berkaitan dengan lingkungan dapat berupa *disclosure*, tetapi sampai saat ini perusahaan masih bebas memilih informasi dan format laporan tersebut.

#### Pentingnya Standar Verifikasi Lingkungan dan Keahlian Akuntan Publik

Akibat belum terbentuknya standar laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan, perusahaan dan industri membuat dan menyajikan *disclosure*, yang sampai saat ini masih bebas baik isi maupun formatnya. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi terhadap *disclosure* berkaitan dengan lingkungan tersebut dari pihak ketiga yang independen. Profesi akuntansi harus mempelajari dan mempertimbangkan isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan untuk mengembangkan *guidelines* (petunjuk) verifikasi lingkungan eksternal. Utang biaya lingkungan harus dicantumkan baik dalam laporan keuangan perusahaan maupun dalam laporan khusus lingkungan. Pihak ketiga yang melakukan verifikasi harus memberikan penilaian terhadap *disclosure* yang dibuat oleh kliennya mengenai utang kontinjensi lingkungan dan risiko-risiko yang terkait di dalamnya.

Tantangan utama lain untuk melakukan verifikasi terhadap laporan lingkungan adalah sangat jarang yang ahli verifikasi lingkungan dalam profesi akuntan publik. Para akuntan publik mungkin tertarik dalam mengembangkan jasa penjaminan atau pengesahan berkaitan dengan laporan-laporan lingkungan perusahaan, tetapi kualifikasi untuk penyediaan jasa tersebut harus dipertanyakan. Pada tahun 1997, dua organisasi yang berusaha menanggapi tantangan ini yaitu *Environmental Auditing Roundtable* dan *the Institute of Internal Auditor (IIA)* membentuk *the Board of Environmental Auditor Certification (BEAC)*, sebuah organisasi independen, non laba, yang menyediakan sertifikasi auditor lingkungan. Akuntan publik yang ingin mendapat BEAC 14000 plus sertifikasi harus berhasil menyelesaikan ujian dan memiliki pendidikan yang memadai, serta memiliki pengalaman melakukan audit lingkungan.

#### Area Baru Bagi Akuntan Publik

Peran akuntan publik dalam masyarakat dewasa ini berkembang dengan cepat dengan munculnya jasa jaminan yang semakin memperluas profesi akuntan ke dalam dimensi jasa klien yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Kredibilitas informasi lingkungan perusahaan sangat penting, karena mampu mempengaruhi keputusan investasi, di samping itu orang-orang yang berkecimpung dalam bidang

... dan komunitas lingkungan percaya bahwa akuntan publik seharusnya memiliki peran yang mengesahkan *disclosure* berkaitan dengan lingkungan. Dengan menyediakan jasa jaminan terhadap laporan lingkungan, akuntan publik telah membantu investor dalam mengambil keputusan dan sekaligus mengembangkan jasa baru yang berpotensi lebih.

Akibat pengalaman menggunakan jasa akuntan publik di masa lalu, maka banyak perusahaan yang tidak skeptis terhadap kompetensi akuntan publik dan menyediakan jasa jaminan yang memenuhi kompetensi dan keahlian dalam menilai *disclosure* perusahaan berkaitan dengan lingkungan. Pertanyaan serupa juga muncul berkaitan dengan kompetensi *Certified Public Accountants* (CPA). Oleh karena itu, dalam rangka menyusun kembali jasa jaminan yang ditawarkan oleh akuntan publik dan usaha-usaha untuk mencapai kompetensi dalam penyediaan jasa tersebut.

CPA mengembangkan program serupa dengan IAC 14000 (diadopsi dari Johnson L. Todd, 1993): perusahaan akuntansi (akuntan publik) yang tertarik memasuki pasar verifikasi lingkungan harus mengembangkan hubungan kerjasama dengan perusahaan konsultan lingkungan.

Bergantung pada tersedianya keahlian dan pengalaman verifikasi mengenai lingkungan, perusahaan akuntansi yang menyediakan jasa jaminan lingkungan perusahaan bisa sama atau bisa juga tidak sama dengan perusahaan yang melakukan audit terhadap laporan keuangan klien. Tetapi bagaimanapun, perusahaan yang mengontrak satu perusahaan akuntansi yang menyediakan jasa jaminan baik untuk laporan lingkungan maupun untuk laporan keuangan perusahaan akan mengurangi biaya jasa, sekaligus memperluas hubungan antara perusahaan akuntansi tersebut dengan kliennya.

Selalu dikatakan sebelumnya, masalah yang terus berkembang mengenai verifikasi laporan lingkungan adalah definisi kriteria atau standar yang dapat diterapkan. Walaupun kemudian beberapa kriteria telah dikembangkan, nilai pengesahan laporan (*disclosure*) masih terus dipertanyakan. Akibat lemahnya kriteria berterima umum dari laporan lingkungan perusahaan, telah menempatkan akuntan publik pada kondisi yang tidak menguntungkan di antara perusahaan konsultan yang tidak mau dikaitkan dengan

standar manapun. Tekanan pembuatan laporan lingkungan bagi perusahaan atau industri harus diikuti dengan pembentukan standar yang berterima umum dan kualifikasi akuntan publik yang melakukan verifikasi terhadap laporan lingkungan tersebut.

#### *Cost and Benefit* Pembuatan Laporan Lingkungan

*Cost and benefit* pembuatan laporan lingkungan melibatkan apa yang dinamakan hak dan kewajiban. Perusahaan, misalnya, berhak memakai sumber daya masyarakat, dan sebaliknya, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua akibat yang timbul. Pembicaraan mengenai adanya hubungan di atas diwarnai adanya perdebatan antara Ramanathan dan Tipgos. Ramanathan menggunakan istilah perjanjian sosial, sedangkan Tipgos menyebutnya proses sosial.

Perjanjian sosial, menurut Ramanathan terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Perjanjian ini secara tidak langsung mengakui bahwa kedudukan antara masyarakat dan perusahaan sama tingginya. Masyarakat memiliki kewajiban memberikan dukungan kepada perusahaan untuk berdiri dan beroperasi. Sebaliknya perusahaan mempunyai kewajiban untuk menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan politik bagi masyarakat.

Di lain pihak, Tipgos beranggapan bahwa kedudukan perusahaan dan masyarakat tidak sama tinggi. Masyarakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perusahaan. Tipgos berpendapat, perusahaan tidak diciptakan melalui perjanjian sosial, melainkan melalui proses sosial. Masyarakat dapat menuntut perusahaan untuk berperan aktif membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, meskipun peran itu bukan tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Walaupun pandangan Ramanathan dan Tipgos ini berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perusahaan tetap harus mempertanggungjawabkan semua sumber daya yang diperolehnya atau yang dipercayakan kepadanya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Usmansyah, 1989).

Ada beberapa faktor yang menekan perusahaan atau industri untuk membuat laporan berkaitan dengan lingkungan. Pertama, faktor sosial, perusahaan ada karena diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Pengakuan itu bisa berupa kepercayaan masyarakat untuk membeli produk perusahaan atau untuk menanamkan modal dalam operasi perusahaan. Kesemuanya itu tidak dapat diperoleh secara gratis dari masyarakat. Sebagai imbalannya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan apa saja yang telah diperbuatnya atas kepercayaan tersebut. Masyarakat mengharapkan sesuatu yang lebih dari perusahaan. Memang tidak ada kesepakatan mengenai apa yang dituntut masyarakat secara tepat, namun tuntutan tersebut makin hari makin meningkat. Walaupun perusahaan bukan satu-satunya penyebab pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan dianggap penyebab utama pencemaran lingkungan tersebut. Ada harga yang harus dibayar oleh perusahaan berkaitan dengan lingkungan.

Kedua, adanya peraturan pemerintah, kontrak antara perusahaan dengan negara. Peraturan pemerintah, entah proses legalisasinya melalui parlemen atau dalam bentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah, merupakan satu hal yang sifatnya memaksa. Oleh karena itu, perusahaan mau tidak mau harus mengikutinya. Salah satu kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah jika perusahaan tidak melaporkan tanggung jawab lingkungannya adalah meningkatkan pembatasan-pembatasan melalui hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, adanya tekanan dari *interest group*. Ada banyak organisasi yang dipakai untuk menelan perusahaan membuat laporan lingkungan. Sebagian besar tekanan dari *interest group* dilakukan melalui badan yang mengelola pasar modal. Di pasar modal, perusahaan-perusahaan melakukan *go public*, sehingga pembuatan dan verifikasi *disclosure* dirasakan sangat penting. Perusahaan dapat meningkatkan *performance* melalui *disclosure* yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga. Badan yang mengelola pasar modal contohnya SEC, sedangkan di Indonesia, tekanan membuat laporan lingkungan dilakukan oleh Bapepam.

Kemudian, faktor yang terkait dengan hirarki kebutuhan Maslow, bahwa kebutuhan merupakan fungsi dari pencapaian tingkat ekonomi. Sebab, organisasi menyerupai individu dalam hal perkembangan dan pertumbuhannya. Ketika kebutuhan mendasar telah terpenuhi, individu atau organisasi akan mencoba memenuhi kebutuhan sosial

dan pengakuan diri yang lebih tinggi.

Faktor terakhir, tetapi tidak berarti tidak penting, adalah kesadaran perusahaan. Para manajernya merasa bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan akan meringankan kepentingan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa memperhatikan lingkungan yang berarti memperhatikan kepentingan masyarakat, akan memberikan iklim usaha yang lebih kuat dan lebih menghasilkan laba daripada melakukannya sebaliknya. Berdasarkan perspektif ekonomi, perusahaan akan bersikap proaktif untuk merumuskan pandangannya mengenai konstituen sosial-politiknya. Dengan demikian, perusahaan mengharapkan akan memperoleh *image* positif dari masyarakat.

Dari berbagai faktor yang membuat perusahaan membuat laporan berkaitan dengan lingkungan, perusahaan memperoleh hak dan banyak keuntungan. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus meningkatkan *image* perusahaan di mata masyarakat yang akan membeli produk perusahaan atau menanamkan modal dalam operasi perusahaan. Perusahaan juga dapat menghindari pinalti atau hukuman dari pemerintah dengan membuat laporan lingkungan tersebut. Demikian juga perusahaan dapat menghindari tekanan dari *interest group* yang dipakai untuk memaksa perusahaan membuat laporan lingkungan. Dengan menerima tanggung jawab lingkungan, perusahaan telah mencoba memenuhi kebutuhan sosial-pengakuan diri yang lebih tinggi. Di samping itu, tanggung jawab lingkungan mengakibatkan meningkatnya kesadaran diri perusahaan, yang berarti perusahaan akan memperoleh *image* positif di masyarakat.

## KESIMPULAN

Tuntutan akan tanggung jawab lingkungan, semakin berkeribang. Hampir semua perusahaan industri dipaksa untuk membayar biaya lingkungan dan mempertanggungjawabkan biaya tersebut melalui laporan lingkungan. Yang menjadi masalah adalah sampai saat ini belum ada standar pelaporan keuangan berkaitan dengan lingkungan. Akibatnya, laporan keuangan yang ada menjadi berbeda-beda sehingga tidak dapat diperbandingkan satu sama lain.

di samping itu. Kredibilitas laporan keuangan lingkungan juga entayakan. Sementara laporan-laporan lingkungan yang dibuat masih berupa *dislosure* tanpa penilaian yang menjamin kredibilitasnya. Laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan tidak memiliki kredibilitas jika tidak diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga.

Publikasi laporan keuangan harus komprehensif, akurat, dan reliabel. Untuk itu, laporan tersebut harus dijamin oleh verifikasi profesional eksternal. Sektor industri yang berkembang, percaya bahwa fungsi jaminan verifikasi laporan keuangan berkaitan dengan lingkungan didukung dan diselesaikan oleh profesi akuntan publik. Peran akuntan publik dalam masyarakat dewasa ini berkembang dengan cepat dengan munculnya jasa jaminan yang semakin memperluas profesi akuntan publik. Kredibilitas informasi lingkungan perusahaan

sangat penting, karena mampu mempengaruhi keputusan investasi, di samping itu orang-orang yang berkecimpung dalam bidang akuntansi, bisnis, dan komunitas lingkungan percaya bahwa akuntan publik seharusnya memiliki peran dalam mengesahkan *dislosure* berkaitan dengan lingkungan.

*Cost and benefit* pembuatan laporan lingkungan melahirkan apa yang dinamakan hak dan kewajiban. Perusahaan, misalnya, berhak memakai sumber daya masyarakat, dan sebaliknya, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua akibat yang timbul. Ada berbagai faktor yang menekan perusahaan untuk melakukan kewajibannya, membayar harga dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan, tetapi sebaliknya, ada berbagai faktor keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab lingkungan.

## DAFTAR ACUAN

- Beets S. Douglas dan Souther Christopher C., "Corporate Environmental Reports: The Need for Standards and an Environmental Assurance Service", American Accounting Association, Accounting Horizons, 1999.
- Chadick Bill, Rouse Robert W., dan Sumita John, "Perspectives on Environmental Accounting", the CPA Journal, January, 1993.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 1999", Huku Satu, Penerbit Salemba Empat, 1999.
- Johnson L. Todd, "Research on Environmental Reporting", American Accounting Association, Accounting Horizons, 1993.
- Krenze Jerry G., CPA., Newell Gale E., CMA., dan Newell Stephen J., "Environmental Disclosure: What Companies Are Reporting", Management Accounting (NAA), 1996.
- Pilshner Emily S., "Environmental Financial Disclosure", Chemicalweek, 1993.
- Reinstein Alan, CPA., DBA., Ellis Jeffrey, CPA., dan Wierka Jon, CPA., "Reporting Environmental Remediation Liabilities", the Ohio CPA Journal, January-March, 1998.
- Schmidt Richard J., Jr., "Disclosing Past Sin: Financial Reporting of Environmental Remediation", NAA, 1997.
- Slunko Brian H. dan Zeller Thomas L., "Environmental Liability in Financial Reporting", Business & Economic Review (BER), 1995.
- Usmansyah, "Telaah Alternatif Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial di Indonesia", Media Akuntansi, 1989.
- Williams Georgina, CPA., dan Phillips Thomas J., CPA., "Cleaning Up Our Act: Accounting for Environmental Liabilities", Management Accounting (NAA), 1994.
- Wood Dorothy, "Environmental Liabilities - Is a Standar Needed?", Australian CPA (AAA), 1998.

# TEORI AKUNTANSI

Oleh

Drs. Anis Chariri, MCom, Akt  
Dr. Imam Ghozali, MCom, Akt

Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro  
Semarang

2003

dalam rangka likuidasi, maka informasi yang disajikan dalam kaitannya dengan ekuitas residual harus berguna untuk memprediksi dividen masa datang bagi pemegang saham biasa. Laporan laba rugi dan laporan laba ditahan harus menunjukkan laba yang tersedia bagi pemegang ekuitas residual setelah semua kewajiban dipenuhi, termasuk dividen kepada pemegang saham preferen. Ekuitas pemegang saham biasa di neraca harus dipisahkan dari ekuitas pemegang saham preferen dan pemegang ekuitas khusus lainnya. Laporan aliran kas harus juga menunjukkan kas yang tersedia bagi perusahaan untuk pembayaran dividen saham biasa dan tujuan lainnya.

#### 4. Teori Enterprise

Teori enterprise suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas, tetapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skope maupun aplikasinya. Didalam teori entitas, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham; sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dalam arti luas pihak-pihak yang berkepentingan meliputi pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Jadi bentuk luas dari teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial.

Konsep ini cocok diterapkan untuk perusahaan skala besar dan modern dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Dari aspek akuntansi hal ini berarti tanggungjawab pelaporan keuangan tidak hanya kepada pemegang saham dan kreditur semata, tetapi lebih luas kepada semua kelompok lain yang berkepentingan dan masyarakat keseluruhan. Perusahaan berskala besar tidak beroperasi semata untuk kepentingan pemegang saham saja, tetapi untuk semua pihak yang berkepentingan. Pegawai lewat serikat buruh menggunakan data akuntansi untuk mengajukan klaim kenaikan gaji. Konsumen dan badan regulasi lainnya berkepentingan terhadap kewajaran perubahan harga dan pemerintah berkepentingan terhadap pengaruh perubahan harga terhadap keadaan ekonomi makro. Konsep income yang paling relevan dengan teori enterprise adalah laporan keuangan nilai tambah (*value added statement*) yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan didalam menghasilkan nilai tambah perusahaan.

#### 5. Teori Dana (Fund)

Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisial dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi inidisebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi sbb:

$$\text{Aktiva} = \text{Restriksi Aktiva}$$

Aktiva menggambarkan jasa prospektif kepada dana atau unit operasi. Hutang merupakan restriksi aktiva khusus atau umum dari dana. Modal yang diinvestasikan mencerminkan restriksi legal atau financial untuk menggunakan aktiva.



**Ikatan Akuntan Indonesia**

---

# **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

---

*1 Juni 1999*

---

*Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*

---

*Framework for The Preparation and Presentation of Financial Statements*

---

*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 s.d. 30*

---

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53

## PENDAHULUAN

### Tujuan dan Peranan

01 Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

- (a) komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya;
- (b) penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan;
- (c) auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
- (d) para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

02 Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

03 Dalam hal terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan standar akuntansi keuangan, maka ketentuan standar akuntansi keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Namun demikian, berhubung kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berlalunya waktu.

04 Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

### Ruang Lingkup

05 Kerangka dasar ini membahas:

- (a) tujuan laporan keuangan;
- (b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;
- (c) definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan; dan
- (d) konsep modal serta pemeliharaan modal.

06 Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*, yang selanjutnya hanya disebut "laporan keuangan"), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

**07** Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

**08** Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Perusahaan publik adalah perusahaan yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan perusahaan.

**Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

**09** Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

- (a) *Investor*. Pemegang modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembalian dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
- (b) *Karyawan*. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- (c) *Pemberi pinjaman*. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi kemampuan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- (d) *Pemasok dan kreditor usaha lainnya*. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
- (e) *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, perusahaan.
- (f) *Pemerintah*. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- (g) *Masyarakat*. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

**10** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53

1 ke perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi  
2 sebagian besar kebutuhan pemakai lain.

3  
4 **11** Manajemen perusahaan menikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan  
5 keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan  
6 meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam  
7 melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki  
8 kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.  
9 Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini. Bagi manajemen  
10 juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen terhadap posisi  
11 keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

## 12 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

13  
14  
15  
16 **12** Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja  
17 serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan  
18 keputusan ekonomi.

19  
20 **13** Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.  
21 Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam  
22 pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa  
23 lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

24  
25 **14** Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau  
26 pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin mengetahui  
27 apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat  
28 keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi  
29 mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengontrak kembali atau mengganti manajemen.

## 30 Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi Keuangan

31  
32  
33 **15** Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan  
34 perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan  
35 ini akhirnya menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada para karyawan dan para pemasok, kemampuan  
36 pembayaran bunga, pembayaran kembali pinjaman dan pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai  
37 dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau  
38 mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan  
39 perusahaan.

40  
41 **16** Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan,  
42 likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya  
43 ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna  
44 untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan. Informasi  
45 struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan  
46 bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam  
47 perusahaan; informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan akan berhasil  
48 meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi  
49 kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan  
50 ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas  
51 merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.

17 Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam keputusan investasi. Informasi kinerja bermanfaat untuk memperkirakan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

18 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, atau likuid atau kas. Kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik.

19 Informasi posisi keuangan terutama disajikan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri.

20 Komponen-komponen laporan keuangan sering terikat karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakai. Misalnya, laporan laba rugi menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang kinerja kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan neraca dan laporan arus kas.

**Catatan dan Skedul Tambahan**

21 Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi perusahaan dan setiap sumber daya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi signifikan-seperti kebutuhan investasi serta pengaruhnya pada perusahaan akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan.

**SUMSI DASAR**

**Dasar Akrua**

22 Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

**Angsungan Usaha**

23 Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53

1 melkuidasi atau mengungkap secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan  
 2 keuangan haruslah harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan  
 3  
 4

## 5 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

6  
 7 **21** Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna  
 8 bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat  
 9 dipertanggungjawabkan.

### 10 Dapat Dipahami

11  
 12 **25** Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera  
 13 dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai  
 14 tentang akuntansi, ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan  
 15 yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak  
 16 dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh  
 17 pemakai tertentu.  
 18  
 19

### 20 Relevan

21  
 22 **26** Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan  
 23 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan  
 24 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi,  
 25 hasil evaluasi mereka di masa lalu.  
 26

27 **27** Peran informasi dalam penyajian (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain.  
 28 Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha  
 29 memanfaatkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan.  
 30 Informasi yang sama juga berperan dalam menilikai penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu,  
 31 misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi  
 32 yang direncanakan.  
 33

34 **28** Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi  
 35 posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti  
 36 pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi  
 37 komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan  
 38 eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan  
 39 menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat  
 40 ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan  
 41 secara terpisah.  
 42

### 43 Materialitas

44  
 45 **29** Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat  
 46 informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat  
 47 mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari  
 48 hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun  
 49 materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  
 50

51 **30** Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat  
 52 informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.  
 53

Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kebiasaan dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

### Keandalan

**31** Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan. Pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

**32** Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika koabsahen dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

### Penyajian Jujur

**33** Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

**34** Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga perusahaan pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan *goodwill*, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

### Substansi Mengungguli Bentuk

**35** Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

### Netralitas

**36** Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

### Pertimbangan Sehat

37 Penulisan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti keterlambatan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengundung insuriditas hati-hati pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga risiko atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Umumnya, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersendiri atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral dan karena itu tidak memiliki kualitas andal.

### Kelengkapan

38 Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengapan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

### Dapat Dibandingkan

39 Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

40 Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mengetahui dan memahami kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

41 Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

42 Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

### Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

#### Tepat Waktu

43 Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat

waktu dan ketepatan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

#### **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**

44 Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi sebaiknya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, Komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

#### **Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif**

45 Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

#### **Penyajian Wajar**

46 Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak meniadakan secara langsung alasan tersebut, penyajian karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menggariskan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

### **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

47 Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

48 Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses sub-klasifikasi. Misalnya, aktiva dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis perusahaan dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

#### **Posisi Keuangan**

49 Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

- 1 (a) *Aktiva* adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari  
2 masa manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- 3
- 4 (b) *Kewajiban* merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya  
5 diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
- 6
- 7 (c) *Ekuitas* adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
- 8

9 **50** Definisi aktiva dan kewajiban mengidentifikasi ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk  
10 menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca. Jadi, definisi tersebut mencakup  
11 pos-pos yang tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban di dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria untuk  
12 diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 82 sampai 98. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi di masa  
13 depan akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas dalam  
14 paragraf 83 sebelum suatu aktiva atau kewajiban diakui.

15

16 **51** Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi aktiva, kewajiban atau ekuitas, perhatian perlu  
17 ditujukan pada substansi yang mendasari serta realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Jadi,  
18 misalnya, dalam kasus sewa guna usaha keuangan (*finance leases*), substansi dan realitas ekonomi tersebut  
19 adalah bahwa sewa guna usaha memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan aktiva yang disewakan  
20 selama sebagian besar masa manfaatnya sebagai imbalan dari terdibayarnya kewajiban untuk membayar hak tersebut  
21 dalam jumlah yang mendekati nilai wajar dari aktiva dan beban keuangan yang bersangkutan. Jadi, sewa guna  
22 usaha keuangan menimbulkan pos yang memenuhi definisi aktiva dan kewajiban dan diakui seperti itu dalam  
23 neraca penyewa guna usaha (*lessee*).

24

25 **52** Neraca yang disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak  
26 memenuhi definisi aktiva atau kewajiban dan tidak disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Namun demikian, definisi  
27 yang diumumkan dalam paragraf 49 akan mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan  
28 yang berlaku di masa depan dan perumusan standar selanjutnya.

29

### 30 Aktiva

31

32 **53** Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk  
33 memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan.  
34 Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional  
35 perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk  
36 kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi  
37 alternatif.

38

39 **54** Perusahaan biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan  
40 kebutuhan dan keperluan pelanggan; terhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan  
41 ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas perusahaan. Kas sendiri  
42 memberikan jasa kepada perusahaan karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.

43

44 **55** Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir ke dalam perusahaan dengan  
45 beberapa cara. Misalnya, aktiva dapat:

46

- 47 (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh  
48 perusahaan;
- 49
- 50 (b) dipertukarkan dengan aktiva lain;
- 51
- 52
- 53

(c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau

(d) dibagikan kepada para pemilik perusahaan.

**56** Banyak aktiva, misalnya, aktiva tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aktiva. Dengan itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aktiva kalau manfaat ekonominya yang diperoleh perusahaan di masa depan dan kalau masing-masing aktiva tersebut dikuasai perusahaan.

**57** Banyak aktiva, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aktiva, hak milik tidak esensial. Jadi, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha adalah aktiva jika perusahaan memperoleh manfaat yang diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan perusahaan untuk menghasilkan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aktiva meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aktiva jika, denganרחבאסיאקאן pengetahuan tersebut, perusahaan menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

**58** Aktiva perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aktiva melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aktiva; misalnya properti yang diterima perusahaan dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aktiva; oleh karena itu, misalnya, maksud untuk membeli perediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aktiva.

**59** Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aktiva, tetapi belum peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau perusahaan melakukan pengeluaran, peristiwa ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aktiva telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengperlihatkan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aktiva dan dengan demikian terdapat kemungkinan tidak dibayar atau diterima yang diharapkan, maka suatu barang atau jasa tidak dibayar dan diterima kepada perusahaan memenuhi definisi aktiva.

## Kewajiban

**60** Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah yang terhutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produksinya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban.

**61** Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen perusahaan untuk membeli aktiva di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aktiva telah diserahkan atau perusahaan telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aktiva. Pada kasus yang terakhir, hakekat perjanjian yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya, karena adanya hukuman yang substansial, membuat perusahaan memiliki sedikit pilihan, itupun kalau ada, untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.

**62** Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya

yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada secara umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

- (a) pembayaran kas;
- (b) penyerahan aktiva lain;
- (c) pemberian jasa;
- (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
- (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

**63** Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penerimaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Perusahaan juga dapat mengakui sebagai kewajiban jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada jumlah pembelian tahunan para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan barang masa lalu merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban.

**64** Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substantif. Beberapa perusahaan menyebut kewajiban ini sebagai penyisihan (*provision*). Dalam pengertian sangat, penyisihan semacam itu tidak dianggap sebagai kewajiban karena hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukannya tanpa perlu membuat estimasi. Definisi kewajiban dalam paragraf 49 mengikuti pendekatan luas. Jadi, kalau penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah penyisihan untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

## Ekuitas

**65** Meskipun dalam paragraf 49 didefinisikan sebagai residual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perusahaan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam bebungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

**66** Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada perusahaan dan para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan. Cadangan yang lain dapat dibentuk kalau hukum pajak memberikan pembebasan dari, atau pengurangan dalam kewajiban pajak pada waktu dilakukan pemindahan ke cadangan semacam itu. Eksistensi serta besarnya cadangan menurut peraturan perundangan yang berlaku ini merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba daripada beban.

**67** Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Biasanya hanya karena faktor ketelitian kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (*aggregate market value*) dari saham perusahaan atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh

aktiva bersih perusahaan baik satu persatu (*liquidating value*) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (*going concern value*).

68 Aktivitas bisnis sering dilakukan melalui beberapa bentuk perusahaan seperti perusahaan perseorangan, perserikatan dan *trust*, serta badan usaha milik negara. Kerangka hukum bagi berbagai perusahaan semacam itu seringkali berbeda dengan yang berlaku bagi perseroan terbatas. Misalnya, mungkin hanya sedikit saja, kalau pun ada, pembatasan pembatasan terhadap pembagian jumlah yang tergolong dalam ekuitas kepada para pemilik atau pihak lain. Namun demikian, definisi ekuitas dan aspek-aspek lain dalam kerangka dasar yang mengatur ekuitas berlaku untuk perusahaan semacam itu.

## Kinerja

69 Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (laba), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Konsep ini dibahas dalam paragraf 102 sampai dengan 119.

70 Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

- (a) *Penghasilan (income)* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- (b) *Beban (expenses)* adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

71 Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi kriteria yang esensial namun tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam laporan laba rugi. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 82 serta paragraf 93.

72 Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, perbedaan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (*ordinary*) merupakan praktek yang lazim. Perbedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan; misalnya, aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan hakekat perusahaan dan operasinya. Pos yang timbul dari aktivitas yang biasa bagi suatu perusahaan mungkin tidak biasa bagi perusahaan lain.

73 Perbedaan antara pos penghasilan dan beban dan penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja perusahaan, masing-masing dengan derajat cakupan yang berbeda. Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih.

## Penghasilan

74 Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

# TEORI AKUNTANSI

*Accounting Theory*

AHMED RIAHI-BELKAOUI

Diterjemahkan oleh:

**Marwata, S.E, Akt.**

*Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*

**Harjanti Widiastuti, S.E., Akt.**

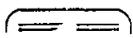
*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

**Ch. Heni Kurniawan, S.E.**

*Universitas Atmajaya Yogyakarta*

**Alia Ariesanti, S.E.**

*Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*



THOMSON

- merupakan tindakan yang bermanfaat untuk memeriksa aspek-aspek sistem pasar akibat dampak eksternal yang merugikan dalam bentuk polusi dan kerusakan lingkungan.

#### 7.4.4 Pelaporan dan Akuntansi Sosial

Pengukuran kinerja sosial terletak pada bidang umum akuntansi sosial.<sup>94</sup> Pada bidang ini, ada empat aktivitas yang dijelaskan: akuntansi pertanggungjawaban sosial (*social responsibility accounting*, SRA), akuntansi dampak total (*total impact accounting*, TIA), akuntansi sosioekonomi (*socioeconomic accounting*, SEA) dan akuntansi indikator sosial (*social indicators social*, SIA).<sup>95</sup> Ekshibit 7.4 menunjukkan karakteristik berbagai komponen akuntansi sosial.

Divisi	Tujuan	Bidang Penggunaan Utama	Skala waktu	Ukuran yang Digunakan	Bidang yang Terkait
1. Akuntansi pertanggungjawaban sosial (SRA)	Mengungkapkan item-item individual yang mempunyai dampak sosial	Sektor privat	Jangka pendek*	Level I, II, terutama non keuangan dan kualitatif	Laporan tentang karyawan, akuntansi sumber daya manusia, demokrasi industrial
2. Akuntansi dampak total (TIA)	Mengukur total kos (baik publik maupun privat) jalannya organisasi	Sektor privat	Jangka panjang dan menengah	Financial AAA Level III	Perencanaan strategis, analisis cost-benefit
3. Akuntansi sosioekonomi (SEA)	Mengevaluasi proyek yang didanai oleh publik baik secara keuangan maupun non keuangan	Sektor publik	Jangka pendek dan menengah	Keuangan, non keuangan, level II dan III	Analisis cost-benefit, sistem program penganggaran yang direncanakan, penganggaran tanpa dasar, indikator kinerja institusional
4. Akuntansi indikator sosial (SIA)	Kuantifikasi statistik sosial secara jangka panjang non keuangan	Sektor publik	Jangka panjang	Kuantitatif non keuangan AAA Level II	Menghitung pendapatan nasional, statistik sensus

\*Biasanya jangka pendek untuk menyesuaikan pola pelaporan tahunan

Sumber: Dicitak ulang dari *Journal of Accounting and Public Policy* 3 No. 3, M.R. Mathews, "A Suggested Classification for Social Accounting Research", hal. 202. Hak cipta 1984, dengan ijin dari Elsevier Science Inc.

#### Ekshibit 7.4 Karakteristik Berbagai Komponen Akuntansi Sosial

Dapat dilihat bahwa konsep umum dan pengungkapan kinerja sosial merupakan produk SRA dan TIA, dan akuntansi sosial dapat didefinisi dengan tepat sebagai "proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran; yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan, dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan".<sup>96</sup> Definisi ini merupakan rerangka konseptual yang baik untuk akuntansi sosial, yang diusulkan oleh Ramanathan,

### 30. Teori Akuntansi

yang terdiri dari tiga tujuan dan enam konsep. Kerangka ini menerapkan dengan seimbang antara SRA dengan TIA.

Sebuah pertanyaan timbul mengenai siapa yang "menekan" untuk membuat laporan sosial perusahaan. Apakah mereka berasal dari spektrum politik kanan atau kiri? Gray et al. menyajikan pelaporan sosial perusahaan (*Corporate Socio Reporting*, CSR) sebagai dialektik antara empat posisi: "(1) posisi politik ekstrim kiri ('radikal sayap kiri'); (2) tingkat penerimaan status quo; (3) tuntutan mengenai hak kepemilikan subjek/intelektual; (4) posisi politik ekstrim kanan ('radikal sayap kanan atau kapitalis murni').<sup>97</sup> Kelompok kedua tampak ingin menunjukkan dukungan sepenuhnya pada pelaporan sosial perusahaan. Pelaporan sosial perusahaan disajikan oleh orang yang:

1. mengasumsikan bahwa tujuan CSR adalah untuk meningkatkan citra perusahaan dan memegang asumsi, biasanya secara implisit, bahwa perilaku perusahaan baik secara asasi;
2. mengasumsikan bahwa tujuan CSR adalah untuk menghentikan pertanggungjawaban organisasi dengan asumsi bahwa kontrak sosial terjadi antara organisasi dengan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini membutuhkan berhentinya pertanggungjawaban sosial.
3. tampaknya mengasumsikan bahwa CSR secara efektif memperluas pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberi informasi bagi investor.<sup>98</sup>

Berbagai alasan digunakan untuk pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial:

1. Argumen pertama adalah yang terkait dengan kontrak sosial. Secara implisit diasumsikan bahwa organisasi seharusnya bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Jika terjadi kontrak antara organisasi dengan masyarakat. Dengan demikian, organisasi memperoleh sejenis legitimasi dari masyarakat. Berbagai hukum kemasyarakatan memberikan persetujuan agar kontrak menjadi lebih eksplisit, sementara kontrak sosial diasumsikan implisit. Hukum ini berisi aturan main yang harus dipilih organisasi, yang akan menjadi kontrak sosial.<sup>99</sup> Melalui hukum-hukum yang implisit dan eksplisit ini, masyarakat mendefinisikan aturan-aturan pertanggungjawaban bagi organisasi.

Tetapi, negara memainkan peran penting dalam memformulasi hukum-hukum ini dan mengkhususkan aturan main. Pada konteks AS, hukum dan perhatian umum pada kinerja sosial menimbulkan keinginan untuk melacak risiko lingkungan. Pada tahun 1989, SEC mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kewajiban lingkungan potensial yang berhasil diselesaikan, yang dihadapi oleh perusahaan sesuai dengan hukum Superfund, yang merupakan laporan tahunan perusahaan tahun 1990 yang dimulai dengan proses pengungkapan. Pengungkapan 10K, yang ditambahkan pada sebagian besar dokumen yang diatur oleh agen lingkungan negara dan federal, menimbulkan dibuatnya data bank yang menyediakan informasi bagi perusahaan yang mengkhususkan pada pelacakan risiko lingkungan. Contoh perusahaan ini adalah *Ersite*, yang terletak di Denver; *Environmental Audits* di Lyonville, Pennsylvania; *the Environmental Risk Information Center* di Alexandria, Virginia; *the Petroleum Information Corporation* di Littleton, Colorado; *Toxiccheck* di Birmingham, Michigan; *Vista Environmental Information* di San Diego; *Environmental Data Resources* di Southport, Connecticut.<sup>100</sup> Industri baru ini memberikan pandangan sekilas mengenai karakteristik masa depan yang diperhatikan oleh pihak yang terkait dalam perusahaan sehubungan dengan kinerja sosial perusahaan

dan memberikan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya pada risiko lingkungan perusahaan di AS.

2. Teori keadilan Rawls, yang disajikan dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*,<sup>101</sup> “teori pemberian hak” yang disajikan Nozick dalam bukunya yang berjudul *Anarchy, State, and Utopia*,<sup>102</sup> dan teori keadilan Gerwith yang disajikan dalam *Reason and Morality*,<sup>103</sup> berisi prinsip-prinsip untuk mengevaluasi hukum dan kebiasaan dari sudut pandang moral. Baik model Rawls maupun Gerwith menjelaskan konsep kejujuran yang bermanfaat bagi akuntansi sosial.
3. Argumen ketiga adalah kebutuhan pengguna. Pada dasarnya, pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi sosial untuk membuat keputusan alokasi dananya. Argumen yang dibuat oleh beberapa orang menyatakan bahwa pemegang saham itu konservatif (kolot) dan hanya peduli terhadap dividen. Kenyataannya, sesuai dengan survei yang dilakukan pada pemegang saham, mereka menginginkan perusahaan menggunakan sumber dayanya agar lingkungannya bersih, menghentikan polusi lingkungan, dan membuat produk yang aman.<sup>104</sup> Hasilnya, Marc Epstein memberi petunjuk kepada perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut ini agar mengelola pengeluaran dengan memperhatikan keadaan sosial:
  - Mengintegrasikan masalah kesadaran sosial perusahaan, etika dan lingkungan pada pembuatan keputusan perusahaan, dan meyakinkan bahwa kesadaran tersebut telah dimiliki oleh dewan direksi;
  - Mengembangkan metode untuk mengevaluasi dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan;
  - Memodifikasi struktur perusahaan untuk membuat mekanisme yang sesuai untuk menghadapi krisis sosial, lingkungan dan etika. Sehingga perusahaan menjadi organisasi yang siap krisis (*crisis-prepared*), bukan organisasi yang *crisis-prone*. Perusahaan yang tidak menyiapkan diri untuk keadaan kritis tidak mudah untuk bertahan;
  - Membuat insentif bagi perilaku yang sesuai dengan etika, lingkungan dan sosial dan mengintegrasikan insentif tersebut menjadi bagian dari sistem penilaian kinerja dan budaya perusahaan. Jika pembuatan aturan ini tidak menjadi bagian dari budaya organisasi dan tidak mempunyai pengaruh, maka perubahan permanen tidak pernah terjadi;
  - Mengakui bahwa jika lingkungannya bersih, maka perusahaan tersebut dapat menjadi pemimpin dalam pengurangan polusi dan bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam.<sup>105</sup>

Tetapi ada kekurangan dalam model normatif dan/atau deskriptif mengenai kebutuhan pengguna dalam bidang informasi sosial.

4. Argumen keempat adalah *investasi sosial*. Pada dasarnya, diasumsikan bahwa saat ini *kelompok investor yang etis* tergantung pada informasi yang disediakan laporan tahunan untuk membuat keputusan investasi. Sehingga pengungkapan informasi sosial menjadi penting jika investor mempertimbangkan dampak negatif dengan tepat pengeluaran kesadaran sosial pada laba per lembar saham, sepanjang kompensasi dampak positifnya dapat mengurangi risiko atau timbulnya ketertarikan yang lebih besar dari kelompok investor. Beberapa orang berpendapat bahwa dampak pengurangan risiko akan lebih besar dibandingkan kompensasi dari pengeluaran kesadaran lingkungan:

Antara perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar modal yang dianggap punya earnings harapan masa mendatang yang paling tinggi dan risiko harapan yang paling rendah akibat faktor lingkungan atau faktor lain, maka akan menjadi perusahaan yang paling berhasil dalam menghimpun dana jangka panjang.<sup>106</sup>

Sedangkan pihak lain yakin bahwa investor yang etis akan membentuk *clienteles* (kelas-kelas investor) yang akan memberi respon kepada perusahaan yang mempunyai perhatian sosial.<sup>107</sup> Investor yang demikian ini akan mengabaikan investasi tertentu dengan alasan etis dan akan lebih memilih perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial dalam membentuk portofolionya.<sup>108</sup> Survei yang dilakukan oleh Rockness dan Williams mengidentifikasi konsensus yang timbul mengenai karakteristik utama kinerja sosial diantara manajer dana.<sup>109</sup> Faktor-faktor kinerja tersebut mencakup perlindungan lingkungan, perlakuan terhadap karyawan, hubungan bisnis dengan pemerintah yang berkuasa, kualitas dan inovasi produk, dan kriteria investasi yang dipertimbangkan oleh sebagian besar manajer.

Teori investasi sosial yang berkembang dijelaskan oleh Bruyn, yang mengusulkan bahwa nilai sosial dan ekonomi dapat dimaksimalkan bersama-sama, dan sinergi kreatif ini merupakan arahan praktik yang diterapkan investor sosial saat ini.<sup>110</sup> Investor bagi Bruyn diasumsikan memberi kontribusi bagi pengembangan rancangan ekonomi sosial untuk mendukung nilai dan kebiasaan manusia, dan juga kepentingan pribadi. Investor sosial dalam membuat keputusan investasi tidak hanya berdasar pada pertimbangan ekonomi dan keuangan, tetapi juga pada pertimbangan sosiologis. Baik penemu sosial maupun penemu teknologi mempunyai harapan mengenai peningkatan profit dan ekonomi. Sehubungan dengan pertanggungjawaban, investor sosial, selain tertarik dengan profit dan sumber daya yang langka, tertarik juga pada tanggung jawab perusahaan pada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*) selain pemegang saham.

### **7.4.5 Pengungkapan Informasi Penganggaran**

Menghadapi tantangan dari berbagai pengguna untuk mengembangkan teknik pelaporan keuangan yang lebih relevan, akuntan dan non akuntan merekomendasikan untuk memasukkan informasi peramalan dalam laporan keuangan. Banyak usulan diberikan, mulai dari usulan untuk mengungkapkan data anggaran sampai usulan agar perusahaan publik memberikan ramalan pada laporan tahunan atau interim dan prospektus. Salah satu tujuan pelaporan dinyatakan dalam "*Trueblood Report*", yang menjelaskan mengenai jenis pengungkapan ini: "Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi proses prediksi. Peramalan keuangan seharusnya tersedia ketika peramalan tersebut dapat meningkatkan reliabilitas prediksi yang dibuat oleh pengguna."<sup>111</sup>

Walaupun tujuan tersebut tidak menyatakan rekomendasi yang kuat untuk menyajikan peramalan keuangan, tetapi langkah-langkah telah dilakukan agar peramalan diikutsertakan dalam pelaporan akuntansi. Di Inggris, versi perbaikan *The City Code on Takeovers and Mergers* mengharuskan peramalan profit diikutsertakan pada edaran penawaran pengambilalihan dan prospektus.<sup>112</sup> Pada kasus ini, minat profesi akuntan timbul dari persyaratan tidak hanya untuk menyatakan "asumsi, termasuk asumsi-asumsi komersial", tetapi juga "dasar-dasar akuntansi dan perhitungan harus diuji dan dilaporkan oleh auditor atau konsultan akuntan."<sup>113</sup> Di AS, pada bulan Februari 1975,

SEC pertama kali mengumumkan keinginannya agar perusahaan mengungkapkan peramalannya agar sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komisi ini. Pada April 1976, sesuai dengan kritik dari publik, SEC meminta untuk mengarsipkan peramalan secara sukarela. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa masalah:

1. definisi peramalan *earnings*.
2. apakah pengungkapan itu seharusnya diatur atau bersifat pilihan, dan
3. keunggulan pengungkapan-pengungkapan tersebut.

Masalah pertama berkaitan dengan penentuan item-item ramalan yang sebaiknya diungkapkan. Ada dua solusi yang mungkin dapat dilakukan, yaitu dengan mengungkapkan anggaran dan mengungkapkan hasil-hasil (peramalan) yang mungkin dicapai. Perbedaan ini dilakukan karena anggaran dibuat untuk digunakan oleh pihak internal dan, untuk alasan motivasional, anggaran dinyatakan dengan cara yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Ijiri membuat perbedaan tersebut menjadi: "Peramalan merupakan estimasi mengenai segala sesuatu yang paling diinginkan perusahaan sementara dalam anggaran, segala sesuatu dapat ditingkatkan dari yang paling diinginkan perusahaan agar memperoleh keuntungan dari fungsi motivasional anggaran."<sup>114</sup> Oleh karena itu, dari sudut pandang pengguna, pengungkapan peramalan, bukan anggaran, menjadi relevan bagi pembuatan keputusannya. Kenyataannya, tren menunjukkan bahwa pengungkapan peramalan akun-akun tertentu secara umum dan *earnings* secara khusus semakin banyak dilakukan.

Masalah kedua terkait dengan apakah pengungkapan peramalan *earnings* seharusnya diatur atau bersifat pilihan. Setiap posisi tersebut dapat dibenarkan. Alasan utama yang mendukung pengungkapan yang diatur adalah karena dapat menghasilkan situasi yang sama dan seragam bagi semua perusahaan. Tetapi, pengungkapan yang diatur dapat menimbulkan beban yang tidak diinginkan pada keunggulan kompetitif perusahaan dan bagi perusahaan-perusahaan tertentu harus dibuat pengecualian (misal perusahaan pribadi, perusahaan pada industri yang keadaannya berubah-ubah, perusahaan dalam proses perubahan besar dan perusahaan dalam tingkat pengembangan).<sup>115</sup> Alasan lain yang menolak pengungkapan yang diatur adalah beberapa perusahaan tidak mempunyai cukup teknologi, pengalaman, dan kompetensi untuk mengungkapkan peramalan secara benar dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini dapat menjadi beban yang tidak diinginkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut menyangsikan manfaat prosedur pengungkapan peramalan karena alasan kos untuk memasang sistem pelaporan baru.

Masalah ketiga berkaitan dengan keinginan untuk mempublikasikan peramalan. Beberapa alasan telah diberikan untuk menolak pelaporan peramalan keuangan perusahaan. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan dan analis tidak berhasil membuat peramalan *earnings* secara akurat. Daily menyatakan bahwa "informasi yang harus cukup akurat agar relevan; jika tidak demikian investor tidak mempunyai keyakinan pada informasi tersebut dan konsekuensinya adalah investor tidak menggunakannya."<sup>116</sup> Studi yang dilakukan Daily dan McDonald<sup>117</sup> mendukung pernyataan bahwa, rata-rata peramalan *earnings* manajemen tidak akurat secara material. Sejumlah faktor yang mempengaruhi keakuratan peramalan, sebagai contoh adalah lama masa berlakunya peramalan, sifat industri perusahaan, faktor lingkungan eksternal dan tingkat keahlian dan pengalaman pembuat peramalan perusahaan. Ijiri menggolongkan masalah-masalah utama yang terkait dengan peramalan keuangan perusahaan menjadi:

1. reliabilitas,
2. pertanggungjawaban, dan

3. sikap diam<sup>118</sup>

*Reliabilitas* terkait dengan keakuratan relatif peramalan; *pertanggungjawaban* terkait dengan besarnya kewajiban perusahaan dalam pembuatan peramalan dan kemungkinan akuntan mengaudit peramalan tersebut; dan *sikap diam* terkait dengan tingkat diamnya dan ketidakbergeraknya perusahaan akibat kerugian yang mungkin timbul dari pengungkapan peramalan. Mautz mengusulkan bahwa tiga jenis perbedaan harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi kemanfaatan peramalan yang diterbitkan:

- ❑ perbedaan pada kemampuan peramalan bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik;
- ❑ perbedaan pada sikap, yaitu manajemen pada perusahaan yang dimiliki publik diharapkan membuat peramalan;
- ❑ perbedaan pada kapasitas investor dalam menggunakan peramalan tersebut.<sup>119</sup>

Akhirnya, berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengestimasi peramalan, maka apakah yang diharapkan untuk diperiksa akuntan? Mautz mengusulkan pemeriksaan:

1. keakuratan aritmatik,
2. integritas internal data ramalan,
3. konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi,
4. kecukupan pengungkapan,
5. asumsi-asumsi yang masuk akal, dan
6. proyeksi-proyeksi yang masuk akal.<sup>120</sup>

#### **7.4.6 Pelaporan dan Akuntansi Aliran Kas**

Karakteristik dominan pada pandangan awal mengenai tujuan laporan keuangan adalah fungsi *stewardship*. Menurut pandangan ini, manajemen dipercaya untuk mengendalikan sumber daya keuangan yang disediakan oleh pemasok modal. Untuk itu, tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan kepada pihak-pihak terkait untuk membantu mengevaluasi *stewardship* (pertanggungjawaban kepada pemilik) manajemen. Sesuai dengan tujuan ini, sistem pelaporan yang dianggap penting dan terbaik bagi pihak lain merupakan sistem akrual. Secara sederhana, dasar akrual akuntansi merupakan suatu bentuk untuk menjaga catatan-catatan, tidak hanya transaksi yang merupakan hasil penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga jumlah yang dimiliki entitas pada pihak lain dan yang dimiliki pihak lain.<sup>121</sup> Poin utama sistem ini adalah penandingan antara *revenue* dengan *expense* (*matching revenue and expense*). Minat dalam metode akrual timbul untuk mencari metode akrual yang “terbaik” secara umum dan “*income* yang ideal” secara khusus. Untuk jangka waktu yang panjang paradigma ini mengatur evaluasi alternatif-alternatif akuntansi, penilaian aset dan usulan penentuan *income*. Tetapi pendekatan ini terus dihambat oleh pihak yang mengusulkan akuntansi aliran kas. Akuntansi berbasis aliran kas didefinisi dengan benar sebagai catatan yang bukan hanya penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode (akuntansi berbasis kas), tetapi juga aliran kas masa mendatang yang dimiliki atau dipinjam perusahaan sebagai akibat penjualan dan pengiriman barang-barang tertentu (akuntansi berbasis akrual).<sup>122</sup> Dukungan kepada akuntansi aliran kas semakin jelas dalam menjawab pertanyaan mengenai pentingnya dan kemampuan akuntansi akrual dan analisis sekuritas semakin bergeser pada pendekatan aliran kas.<sup>123</sup>

Pertanyaan mengenai keunggulan akuntansi akrual dibandingkan akuntansi aliran kas penting untuk menentukan tujuan dan sifat pelaporan keuangan. Akuntansi akrual membantu dalam mengevaluasi pertanggungjawaban manajemen dan penting bagi penandingan *revenue* dengan *expense*, yang diperlukan untuk menyesuaikan antara usaha dengan hasil. Tetapi, efisiensi sistem akrual telah dipertanyakan. Thomas menyatakan bahwa semua alokasi sifatnya sembarang dan tidak dapat diperbaiki, dan merekomendasikan untuk meminimalisasi alokasi-alokasi tersebut.<sup>124</sup> Hawkins dan Campbeil melaporkan bahwa terjadi pergeseran dalam analisis sekuritas, dari pendekatan penilaian berorientasi pada *earnings* menuju pendekatan penilaian berorientasi pada aliran kas.<sup>125</sup> Banyak teoretisi kemanfaatan keputusan mendukung sistem akuntansi aliran kas, yang didasarkan pada keinginan investor untuk memprediksi aliran kas.<sup>126-127</sup> Mereka merasa bahwa masalah penilaian aset dan penentuan income sangat berat, sehingga mereka mengusulkan untuk membentuk sistem akuntansi yang terpisah dan juga mengusulkan memasukkan laporan aliran kas yang menyeluruh pada laporan perusahaan. Sebagai contoh, Lee menjelaskan mengenai kombinasi antara akuntansi aliran kas dengan akuntansi *net realizable value* yang disajikan pada laporan yang saling bersambungan (artikulasi), yang memberikan informasi yang lebih relevan mengenai kas dan pengelolaan kas dibandingkan sistem lain yang disajikan secara terpisah.<sup>128</sup>

Akuntansi aliran kas dipandang oleh pendukungnya sebagai yang terbaik dibandingkan akuntansi akrual konvensional karena:

1. Sistem akuntansi aliran kas dapat menyediakan kerangka analitis untuk menghubungkan kinerja masa lalu, sekarang dan masa mendatang.<sup>129</sup>
2. Dari perspektif investor, proyeksi aliran kas dapat merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya di masa mendatang dan yang direncanakan pada kebijakan keuangan.<sup>130</sup>
3. Rasio aliran harga yang didiskon (*price-discounted flow*) dapat menjadi indikator investasi yang lebih dapat dipercaya dibandingkan rasio harga dengan *earnings* saat ini (*price-earnings ratio*), karena dalam menghitung *earnings* per lembar saham menggunakan berbagai metode alokasi yang sembarang.<sup>131</sup>
4. Akuntansi aliran kas dapat digunakan untuk mengoreksi perbedaan dalam praktik, yaitu antara cara melaksanakan investasi (biasanya didasarkan pada aliran kas) dengan cara mengevaluasi hasil (biasanya didasarkan pada *earnings*).<sup>132</sup>

- Pertanyaan penting yang ada adalah apakah akuntansi aliran kas perlu diperbaiki agar posisinya lebih baik, yaitu sebagai sumber informasi yang penting dan relevan. Semua tren menunjukkan bahwa jawabannya adalah perlu. Berikut ini pernyataan yang optimis:

Dari seluruh sistem pelaporan keuangan yang ada, akuntansi aliran kas merupakan salah satu yang objektif dan dapat dipahami. Akuntansi ini berusaha menyajikan fakta-fakta dalam akuntansi keuangan, tanpa keterlibatan akuntan dalam pembuatan ketetapan yang subjektif karena periode data yang terkait. Dan istilah yang diungkapkan seharusnya merupakan istilah yang lazim bagi semua non akuntan. Sumber dan aliran kas merupakan sesuatu yang harus diatur oleh setiap orang sepanjang hari pada kondisi ekonomi yang berkembang. Maka laporan aliran kas harus dapat dipahami, yang kemudian menjadi perhatian akuntan karena jumlah pengguna laporan semakin meningkat setiap tahun.<sup>133</sup>

## Teori Akuntansi

Bagaimana reaksi pengguna terhadap informasi aliran kas? Bukti-bukti yang ada sampai saat ini menunjukkan bahwa analis sekuritas lebih sering menggunakan informasi *earnings* dibandingkan informasi aliran kas pada laporan profesionalnya.

### **7.4.7 Akuntansi Sumber Daya Manusia**

#### **A. Kemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pembuatan keputusan oleh pengguna (investor), termasuk informasi yang cukup mengenai suatu aset yang "terabaikan" dalam perusahaan, yaitu aset manusia. Secara lebih spesifik, investor mungkin memperoleh keuntungan dari informasi mengenai peningkatan atau penurunan aset manusia dalam perusahaan selama periode tertentu. Perlakuan akuntansi konvensional mengenai biaya sumber daya manusia adalah dengan membebankan semua pengeluaran untuk modal manusia dan mengkapitalisasi biaya-biaya itu pada modal fisik. Perlakuan yang lebih valid adalah dengan mengkapitalisasi pengeluaran sumber daya manusia pada bidang yang memperoleh keuntungan di masa mendatang dan dengan mengungkapkan saat pengukuran keuntungan tersebut. Kenyataannya, perlakuan ini menimbulkan perhatian baru mengenai pengukuran kos atau nilai sumber daya manusia dan mengarahkan pada pengembangan bidang baru yang disebut akuntansi sumber daya manusia (*human resource accounting*). Definisi yang luas mengenai akuntansi sumber daya manusia adalah:

proses mengidentifikasi dan mengukur data mengenai sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak-pihak yang tertarik.<sup>134</sup>

Definisi ini menjelaskan bahwa ada tiga tujuan utama akuntansi sumber daya manusia, yaitu:

1. identifikasi "nilai sumber daya manusia",
2. pengukuran kos dan nilai orang pada organisasi, dan
3. penginvestigasian dampak kognitif dan berperilaku informasi-informasi tersebut.

Hanya sedikit yang menerapkan akuntansi sumber daya manusia, termasuk R.G. Barry Corporation, Touche Ross & Company, dan sebuah cabang perusahaan asuransi.<sup>135</sup> Walaupun perusahaan-perusahaan itu kurang antusias untuk mengungkapkan nilai aset manusianya, sebagian besar studi empiris yang menginvestigasi dampak kognitif dan berperilaku menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan dari pengguna informasi akuntansi sumber daya manusia.<sup>136</sup> Sebenarnya kami ingin tahu mengapa R.G. Barry Corporation, sebuah perusahaan kecil penghasil sepatu yang terdaftar di American Stock Exchange, mengembangkan sistem akuntansi sumber daya manusia. Salah satu karyawannya mengobservasi:

Mengapa di dunia ini ada perusahaan kecil –yang bagus pertumbuhannya walaupun tidak spektakuler, bagus produknya tetapi bukan produk yang romantis, bagus tetapi teknologinya tidak canggih, bagus tetapi profitabilitasnya tidak dramatis - yang tertarik pada pengembangan sistem akuntansi sumber daya manusia? Ini merupakan pertanyaan yang wajar dan patut mendapat jawaban.<sup>137</sup>

Untuk menjawab pertanyaan ini –dan pertanyaan-pertanyaan serupa yang ditanyakan oleh perusahaan lain –ada tiga fakta yang dapat kita ketengahkan:

1. Kapitalisasi kos sumber daya manusia secara konseptual lebih dapat berlaku dibandingkan dengan membebankan kos tersebut.

# INTERMEDIATE ACCOUNTING

Edisi Tujuh

Oleh

Dr. Zaki Baridwan, M.Sc., Akuntan

Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta

  
ELY AGUSTIM  
3103090142



## TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Di dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1 dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang:

- a) Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan peristiwa-peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.
- b) Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. Oleh karena rencana penerimaan dan pengeluaran uang (cash flow) seorang kreditur atau investor itu berkaitan dengan cash flow dari perusahaan, pelaporan keuangan harus menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa datang untuk perusahaan tersebut.
- c) Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.<sup>3</sup>

Ketiga karakteristik informasi di atas merupakan pedoman bagi penyusunan pelaporan keuangan untuk suatu badan usaha.

## PELAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam konsep Statement Nomor 1, FASB menggunakan istilah pelaporan keuangan, dan bukannya laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara-cara lain untuk melaporkan informasi. Dengan demikian, pelaporan keuangan mempunyai

---

<sup>3</sup>FASB, Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 1, *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*, McGraw Hill, hal. 3023.

gertian yang lebih luas dari laporan keuangan. Apabila laporan keuangan terdiri dari laba, laporan rugi-laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan, maka dalam pelaporan keuangan termasuk juga prospektus, peramalan oleh manajemen dan sebagainya.

Perbedaan antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan ini timbul dari keadaan masing-masing. Informasi keuangan tertentu akan lebih baik bila disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tertentu lainnya akan lebih baik bila dilaporkan dalam laporan lain. Walaupun demikian, laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan. Karenanya, maka tujuan laporan keuangan akan sama dengan tujuan pelaporan keuangan.

## TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KUALITATIF

Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan dapat dipisahkan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Penjelasan dalam Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 84 mengenai tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

- Tujuan umum laporan keuangan dapat dinyatakan sebagai berikut:
  - Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
  - Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas, aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
  - Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
  - Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman
  - Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.

1.2. Tu

In

1) Ra

Ra

informa

akan ad

relevan

yang al

yang m

daripad

pada k

dengan

keguna

2) D

In

dengan

pihak p

ekonomi

dalam

3) D

P

yang

pengu

realita

dapat

pengu

4) A

I

kebut

infor

pihak

5)

untul

tertu

## 1.2. Tujuan Kualitatif

Informasi keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut:

### 1) *Relevan*

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya, betapa pun kualitas-kualitas lainnya terpenuhi. Sehubungan dengan tujuan relevansi seyogyanya dipilih metode-metode pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu sejauh mungkin para pemakai dalam pengambilan jenis-jenis keputusan yang memerlukan penggunaan data akuntansi keuangan. Dalam mempertimbangkan relevansi daripada informasi yang bertujuan umum (general purpose information), perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai, dan bukan pada kebutuhan khusus pihak-pihak tertentu; dengan demikian, suatu informasi mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil sekali relevansinya bagi kegunaan yang lain.

### 2) *Dapat dimengerti*

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

### 3) *Daya uji*

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan-pertimbangan dan pendapat yang subyektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses tersebut tidak lagi berlandaskan pada realita obyektif semata. Dengan demikian untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

### 4) *Netral*

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

### 5) *Tepat waktu*

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

ya banding

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan perusahaan-perusahaan lainnya pada periode yang sama. Adanya pelbagai alternatif akuntansi dewasa ini menyulitkan tercapainya daya banding antar perusahaan; dalam penekanan harus dilakukan pada tercapainya daya banding antar periode dalam satu tahun, yaitu dengan menerapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, atau lebih dikenal dengan prinsip konsistensi. Namun hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh merubah metode akuntansi yang selama ini dianutnya. Perusahaan tetap dianjurkan melakukan perubahan atas metode/prinsip yang dianut, bila prinsip yang baru dianggap lebih baik. Selanjutnya, sifat dan pengaruh serta alasan dilakukannya perubahan harus diungkapkan dalam laporan keuangan periode terjadinya perubahan.

ngkap

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat diuji secukupnya enam tujuan kualitatif di atas; dapat juga diartikan sebagai standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan. Standar ini menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pengguna. Untuk itu, maka harus terdapat klasifikasi, susunan, serta istilah yang digunakan dalam laporan keuangan. Demikian pula semua fakta atau informasi tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan, harus diungkapkan dengan jelas.<sup>4</sup>

## KUALITAS INFORMASI

Fungsi utama akuntansi adalah menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan, perlu dijaga agar data yang disajikan mempunyai kualitas tertentu. SFAC 84 menunjukkan kualitas ini dalam tujuan kualitatif. Urutan (hierarki) kualitas informasi akuntansi ditunjukkan dalam SFAC Nomor 2 yang dikeluarkan oleh FASB dalam tahun 1980. Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu dapat dipercaya (reliability). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dimiliki yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (feedback value),

<sup>4</sup> I, *Prinsip Akuntansi Indonesia*, 1984 hal. 1-4.

dan tepat waktu (verifiability), dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan Keseluruhan walaupun selalu akan mencapai Yang pertama sifat-sifat di atas

Gambar 2. Hierarki

Pemakai Informasi Akuntansi

Batasan umum

Kualitas khusus pemakai

Kriteria pervasive

Kualitas utama

Unsur kualitas utama

Kualitas sekunder dan interactive

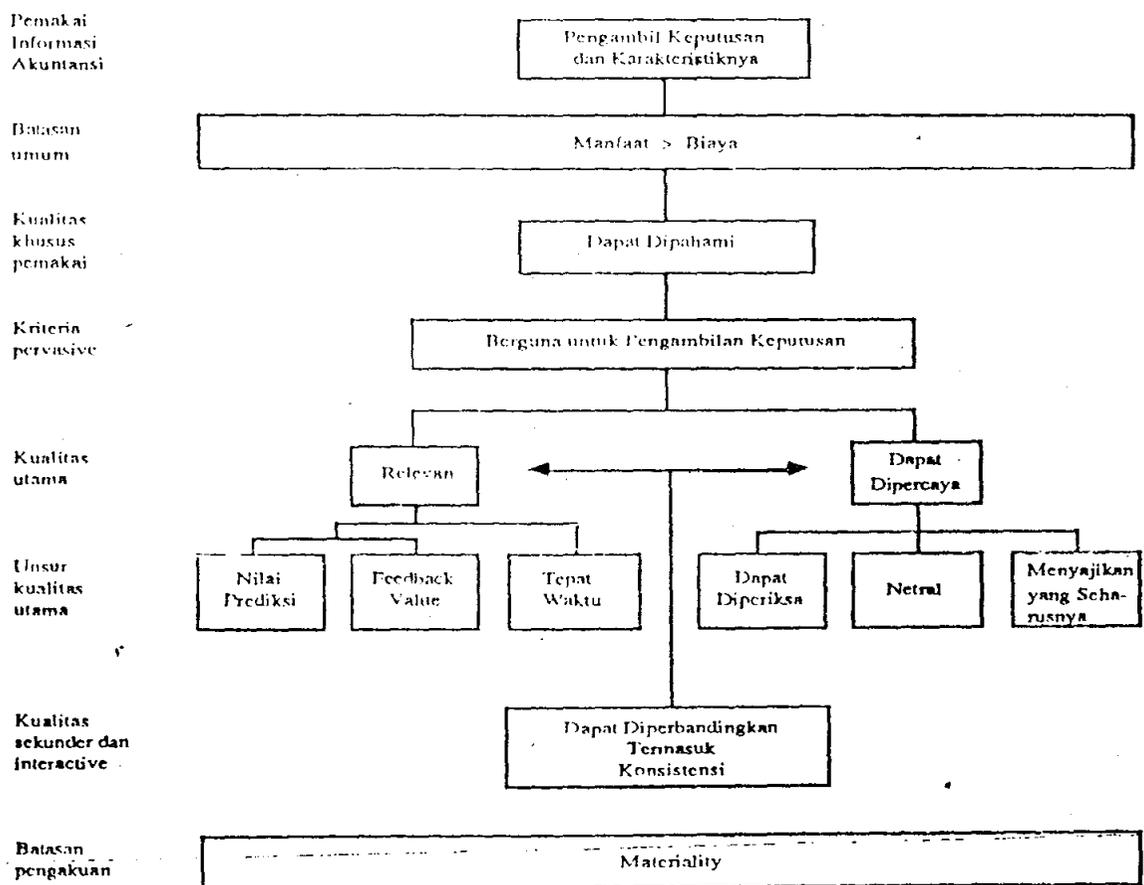
Batasan pengakuan

(Sumber: FASB, 1980)

dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa (verifiability), netral, dan menyajikan yang seharusnya. Di samping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.

Keseluruhan sifat ini disajikan dalam bentuk informasi yang dapat dipahami, karena walaupun seluruh sifat-sifat di atas dapat terpenuhi, tetapi tidak dapat dipahami, maka tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Hierarki sifat informasi ini diukur dalam dua batasan. Yang pertama adalah manfaatnya harus lebih besar dari biaya. Batasan yang kedua adalah bahwa sifat-sifat di atas hanya diperlakukan pada informasi yang jumlahnya cukup berarti (material).

Gambar 2. Hierarki Sifat Kualitas Informasi dalam SFAC Nomor 2 adalah sebagai berikut:



(Sumber: FASB, SFAC Nomor 2, 1980)

## ASUMSI DAN KONSEP DASAR

Di dalam menyusun prinsip akuntansi, digunakan asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Asumsi dasar ini merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi itu dilaksanakan. Sedangkan konsep-konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun prinsip akuntansi.

### Asumsi Dasar

Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi. Asumsi-asumsi tersebut adalah kesatuan usaha khusus (*separate entity/economic entity*), kontinuitas usaha (*going concern/continuity*), penggunaan unit moneter dalam pencatatan (*monetary unit/unit of measure*), dan tepat waktu (*time-period/periodicity*). Uraian dari masing-masing asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

#### *Kesatuan Usaha Khusus (Separate Entity/Economic Entity)*

Di dalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Atau dengan kata lain perusahaan dianggap sebagai "unit akuntansi" yang terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik. Dengan anggapan seperti ini maka transaksi-transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi-transaksi pemilik dan oleh karenanya maka semua pencatatan dan laporan dibuat untuk perusahaan tadi.

#### *Kontinuitas Usaha (Going Concern/Continuity)*

Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Penekanan dari konsep ini adalah terhadap anggapan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu dibuat berbagai metode penilaian dan pengalokasian dalam akuntansi yang didasarkan pada konsep ini. Sebagai contoh adalah prosedur amortisasi dan depresiasi. Jadi bila tidak terdapat bukti yang cukup jelas bahwa suatu perusahaan itu akan berhenti usahanya maka kesatuan usaha itu harus dipandang akan hidup terus. Tetapi apabila terdapat bukti yang jelas bahwa suatu perusahaan itu umurnya terbatas, misalnya dalam hal *joint ventures*, maka anggapan kontinuitas usaha ini tidak lagi digunakan.

## ***Penggunaan Unit Moneter dalam Pencatatan***

Beberapa transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan ukuran unit fisik atau waktu, tetapi karena tidak semua transaksi itu bisa menggunakan ukuran unit fisik yang sama, sehingga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini maka semua transaksi-transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara di mana perusahaan itu berdiri.

Pencatatan transaksi dengan menggunakan ukuran mata uang pada saat terjadinya suatu transaksi disebut pencatatan yang didasarkan pada biaya historis. Dasar ini digunakan dengan suatu anggapan bahwa daya beli unit moneter yang dipakai adalah stabil dan perubahan-perubahan daya beli yang terjadi tidak akan mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi jika terjadi perubahan daya beli yang menyolok (terutama dalam keadaan inflasi) maka laporan-laporan keuangan yang disusun dengan dasar biaya historis akan memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan, dan dengan demikian kegunaannya akan berkurang.

## ***Periode Waktu (Time-Period/Periodicity)***

Kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain dengan volume dan laba yang berbeda. Masalah yang timbul adalah pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode-periode tertentu di mana dibuat laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan ini harus dibuat tepat pada waktunya, agar berguna bagi manajemen dan kreditur. Oleh karena itu perlu dilakukan alokasi ke periode-periode untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi beberapa periode. Alokasi ini dilakukan dengan taksiran-taksiran.

Selisih antara jumlah-jumlah yang ditaksir dengan yang sesungguhnya terjadi jika tidak cukup berarti, akan diserap oleh periode berikutnya. Tetapi jika selisih itu jumlahnya cukup berarti sehingga akan menyesatkan laporan keuangan periode berikutnya maka akan dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode itu.

## ***Konsep Dasar***

Konsep dasar yang mendasari penyusunan prinsip akuntansi adalah prinsip biaya historis (*historical cost principle*), prinsip mempertemukan (*matching principle*), prinsip konsistensi (*consistency principles*) dan prinsip lengkap (*full disclosure*). Berikut ini diberikan penjelasan atas masing-masing prinsip tersebut.

### ***Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle)***

Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus terjadi dalam transaksi di antara dua belah pihak yang bebas (*arm's-length transaction*). Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh transaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aktiva, utang, modal atau transaksi lainnya.

Karena biaya historis itu didasarkan pada harga pertukaran antara pihak-pihak yang bebas, terdapat kesulitan untuk menentukan besarnya harga perolehan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Misalnya, dalam hak aktiva yang diterima sebagai hadiah. Di sini tidak ada harga pertukaran yang terjadi dan juga kemungkinan yang memberi hadiah adalah pihak yang erat hubungannya dengan perusahaan. Di samping contoh di atas, kesulitan-kesulitan lain masih ada, seperti dalam hal pembelian barang lebih dari satu macam dengan satu harga, pertukaran aktiva dengan aktiva atau dengan saham dan lain-lain.

Walaupun terdapat kesulitan-kesulitan seperti yang telah disebutkan di atas, sampai saat ini prinsip biaya historis masih tetap berlaku karena data biaya historis ini dianggap yang paling obyektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Objectivity dan verifiability ini menjadi dasar utama untuk penggunaan prinsip biaya historis. Dalam prinsip ini, sekali harga perolehan ini sudah ditentukan, tidak akan diadakan perubahan-perubahan karena adanya perubahan nilai rupiah. Dengan kata lain prinsip biaya historis ini erat sekali kaitannya dengan asumsi bahwa unit moneter yang digunakan (rupiah) nilainya stabil. Kenyataannya, nilai rupiah selalu menurun setiap periode (inflasi). Kenyataan inilah yang sering menimbulkan kritik terhadap penggunaan prinsip biaya historis dan pengusulan untuk menggunakan prinsip lain yang memperhitungkan adanya perubahan nilai mata uang seperti *price-level adjustment* dan *current cost (value) accounting*.

### ***Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle)***

Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Istilah pendapatan dalam prinsip ini merupakan istilah yang luas, di mana di dalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba penjualan aktiva dan lain-lain. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pemilik perusahaan.

Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu pada saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima.

Tetapi ketentuan umum ini tidak selalu dapat diterapkan sehingga timbul beberapa ketentuan lain mengenai saat untuk mengakui pendapatan. Pengecualian-pengecualian itu adalah pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai, selama masa produksi dan pada saat kas diterima.

Pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai dapat digunakan dalam penambangan logam mulia seperti emas dan perak. Barang-barang seperti ini mempunyai pasar yang pasti dengan harga yang pasti. Karena adanya kepastian tentang besarnya pendapatan walaupun belum terjadi penjualan, pendapatan dapat diakui pada saat produksi selesai.

Pengakuan pendapatan selama masa produksi biasanya terjadi dalam kontrak pembangunan jangka panjang. Di sini pendapatan diakui berdasarkan persentase penyelesaian dalam pekerjaan pembangunan walaupun belum terjadi serah terima. Dengan cara seperti ini pendapatan dapat diakui dalam periode-periode di mana pekerjaan pembangunan dikerjakan, dan tidak harus menunggu sampai seluruh pekerjaan selesai dan dilakukan serah terima.

Pengakuan pendapatan pada saat penerimaan uang dapat terjadi dalam penjualan angsuran. Dalam transaksi penjualan seperti ini, kepastian tentang penerimaan seluruh harga jual adalah kecil karena lamanya waktu angsuran. Oleh karena kecilnya kepastian ini maka pendapatan diakui sebesar jumlah uang yang sudah diterima.

### *Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)*

Yang dimaksud dengan prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakui pendapatan.

Penerapan prinsip ini juga menghadapi beberapa kesulitan. Misalnya, dalam hal biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan, maka sulit untuk mempertemukan biaya dengan pendapatannya. Sebagai contoh, biaya administrasi dan umum tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan perusahaan. Kesulitan seperti ini diatasi dengan cara membebaskan biaya-biaya tersebut ke periode terjadinya. Biasanya biaya-biaya seperti ini disebut period costs. Sebaliknya, biaya produksi seperti biaya bahan baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung, mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan, sehingga dapat dengan mudah dipertemukan. Kesulitan yang lain seperti dalam hal biaya yang mempunyai manfaat untuk beberapa periode. Biaya-biaya seperti ini ditunda pembebanannya karena mempunyai fungsi menimbulkan pendapatan. Masalahnya adalah alokasi setiap periodenya. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode-metode depresiasi dan amortisasi hampir semuanya berdasarkan taksiran-taksiran yang tidak jelas hubungannya dengan pendapatan.

Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu (accrual basis) dalam penentuan biaya. Dalam prakteknya digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan.

**Konsistensi (Consistency Principle)**

Manajemen perusahaan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang disusunnya. Penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menunjukkan keadaan keuangan dan operasi perusahaan dalam satu periode akuntansi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dipilih metode-metode dan prosedur-prosedur akuntansi yang paling sesuai dengan sifat dan tujuan perusahaan. Selain dari itu laporan keuangan suatu perusahaan sering dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui perubahan yang telah dicapai. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses penyusunan harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu disebabkan oleh selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai larangan penggantian metode, jadi masih diperbolehkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. Tetapi jika ada penggantian metode maka akibat (selisih) yang cukup berarti (material) terhadap laba perusahaan harus dicatat dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat dan perlakuan terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut (detail ada dalam Bab 20).

**Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)**

Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) adalah pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga diambil dari rekening-rekening tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ada ke dalam laporan keuangan. Biasanya keterangan tambahan mengenai informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk (a) catatan kaki (footnotes), (b) dalam laporan keuangan, biasanya dituliskan dalam kurung di bawah elemen yang bersangkutan, atau dengan memakai rekening-rekening tertentu dan (c) sebagai lampiran-lampiran.

Keterangan tambahan dengan menggunakan catatan kaki (footnotes) biasanya karena pertimbangan untuk mengganggu laporan keuangan yang dibuat. Catatan kaki ini digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Prinsip akuntansi
- Perubahan-perubahan pada kesatuan usaha menunjukkan kumulatif, re-
- Adanya kemungkinan
- Informasi tambahan
- Kontrak-kontrak untuk saham

Keterangan tambahan dalam kurung biasanya rekening sebagai transaksi lainny prinsip yang digunakan LIFO, metode ini sebagai alat untuk utang bersyarat

Keterangan tambahan digunakan untuk jumlah tertentu, (price level adjustment) perusahaan dapat

**KETERBATASAN**

Laporan keuangan berarti (material) dan masing-masing

**Cukup Berarti**

Pada dasarnya untuk mencatat pelaksanaannya transaksi yang transaksi-transaksi diperlakukan

- Prinsip akuntansi yang digunakan.
- Perubahan-perubahan, seperti perubahan dalam prinsip akuntansi, taksiran-taksiran, kesatuan usaha dan juga kalau ada koreksi-koreksi kesalahan. Catatan kaki ini juga menunjukkan perlakuan terhadap perubahan-perubahan tersebut, apakah dengan cara kumulatif, retroaktif dan lain-lain.
- Adanya kemungkinan timbulnya rugi atau laba bersyarat.
- Informasi tentang modal perusahaan, seperti jumlah lembar saham dan lain-lain.
- Kontrak-kontrak pembelian, kontrak-kontrak penting lainnya, adanya option atau warrant untuk saham dan lain-lain.

Keterangan tambahan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dengan cara catatan dalam kurung biasanya dibuat bila keterangan tersebut tidak terlalu panjang. Penggunaan rekening sebagai informasi tambahan memerlukan proses pencatatan seperti transaksi-transaksi lainnya. Cara ini biasanya digunakan untuk menunjukkan metode-metode atau prinsip yang digunakan, misalnya penentuan harga pokok persediaan menggunakan metode LIFO, metode ini bisa ditunjukkan sebagai keterangan dalam kurung. Penggunaan rekening sebagai alat untuk menunjukkan adanya informasi tambahan digunakan untuk menunjukkan utang bersyarat seperti wesel yang didiskontokan dan lain-lain.

Keterangan tambahan yang dibuat sebagai lampiran laporan keuangan biasanya digunakan untuk menunjukkan perhitungan-perhitungan detail yang mendukung suatu jumlah tertentu, atau menunjukkan informasi-informasi keuangan berdasar pada indeks harga (price level adjustment). Keterangan-keterangan dari pimpinan perusahaan mengenai usaha perusahaan dapat juga dibuat dalam bentuk lampiran.

## KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai beberapa keterbatasan seperti cukup berarti (materiality), konservatif, dan sifat-sifat khusus dari suatu industri. Berikut ini diuraikan masing-masing batasan tersebut.

### Cukup Berarti (Materiality)

Pada dasarnya akuntansi itu disusun di atas landasan dasar teori yang akan diterapkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu cara tertentu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua transaksi diperlakukan sesuai dengan teori. Biasanya transaksi-transaksi yang jumlahnya cukup besar diperlakukan sesuai dengan teori, tetapi untuk transaksi-transaksi yang jumlahnya kecil dan tidak akan mempengaruhi pos-pos lain bisa diperlakukan menyimpang. Yang menjadi masalah adalah, berapakah jumlah yang dianggap

cukup besar sehingga perlu dipertimbangkan? Untuk membuat batasan terhadap istilah cukup berarti, suatu laporan, fakta atau elemen dianggap cukup berarti jika karena adanya dan sifatnya akan mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pengambilan suatu keputusan, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yang ada. Jadi apabila laporan, fakta atau elemen itu tidak mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya perbedaan dalam bidang pengambilan keputusan, maka jumlahnya tidak cukup berarti.

Beberapa pedoman umum yang dapat digunakan untuk menentukan apakah cukup berarti atau tidak, adalah sebagai berikut:

*Aspek kuantitatif.* Berdasarkan pada jumlah absolut, misalnya jumlah rupiah, atau berdasarkan pada nilai relatif, misalnya sebagai suatu persentase dari pendapatan bersih, dari modal dan lain sebagainya.

*Aspek kualitatif.* Mempertimbangkan karakteristik dari lingkungan, karakteristik dari perusahaan seperti besar kecilnya perusahaan, struktur modal, karakteristik dari elemen itu sendiri seperti sifatnya, waktunya, hubungannya dengan pendapatan dan karakteristik dari kebijaksanaan-kebijaksanaan akuntansi yang digunakan.

### Konservatif

Konservatif ini merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Masalah ini timbul jika ada lebih dari satu alternatif atau bisa juga timbul dalam hal suatu jumlah itu belum dapat dipastikan.

Sikap konservatif ini berasal dari sejarah perkembangan akuntansi di masa lalu. Pada saat itu, yang penting adalah neraca dan penyusunannya ditujukan pada para kreditur. Untuk menjaga keamanan pinjaman dari kreditur, penekanan ada penyusunan laporan keuangan adalah pada jumlah-jumlah aktiva. Lebih baik aktiva dinyatakan terlalu kecil dibanding dengan menyatakannya dengan jumlah yang terlalu besar.

Di samping memilih jumlah yang rendah jika ada alternatif, sikap konservatif ini juga mengatur bahwa kenaikan nilai aktiva dan laba yang diharapkan, tidak boleh dicatat sebelum direalisasikan, dalam arti dijual, dan penurunan nilai aktiva dan rugi yang diperkirakan akan timbul harus dicatat walaupun jumlahnya belum dapat ditentukan. Beberapa contoh metode-metode yang didasarkan pada sikap konservatif adalah penggunaan harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah (*lower of cost or market*) dan pengakuan rugi dalam kontrak pembelian. Cara ini mengakibatkan penyajian informasi yang bias, yaitu cenderung ke satu arah, lebih besar atau lebih kecil.

## Sifat Khusus Suatu Industri

Industri-industri yang mempunyai sifat-sifat khusus seperti bank, asuransi dan lain-lain sering kali memerlukan prinsip akuntansi yang berbeda dengan industri-industri lainnya. Juga karena adanya peraturan-peraturan dari pemerintah terhadap industri-industri khusus ini akan mengakibatkan adanya prinsip-prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan yang umumnya digunakan.

### PERTANYAAN

1. Sebutkan definisi akuntansi ditinjau dari sudut pandang kegiatan jasa!
2. Apakah tujuan pelaporan keuangan menurut Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 1?
3. Jelaskan perbedaan pengertian pelaporan keuangan dan laporan keuangan!
4. Apakah kualitas utama informasi akuntansi menurut Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 2?
5. Jelaskan maksud asumsi kontinuitas usaha!
6. Jelaskan maksud prinsip mempertemukan!
7. Jelaskan maksud prinsip konsistensi!
8. Jelaskan jenis informasi yang diungkapkan lewat catatan kaki!
9. Apakah konservatisme itu?
10. Jelaskan maksud konsep materiality!
11. Jelaskan faktor-faktor yang perlu dipenuhi agar informasi akuntansi dapat memenuhi kualitas relevan!
12. Bedakan antara faktor Dapat Diperiksa dengan Menyajikan yang Seharusnya!
13. Apa hubungan kedua faktor dalam pertanyaan nomor 12 di atas dengan informasi yang bias?
14. Jelaskan jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan agar dapat memenuhi prinsip akuntansi!
15. Jelaskan cara pengungkapan informasi!
16. Kualitas sekunder dalam Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 2 juga merupakan kualitas yang berinteraksi dengan kualitas utama. Jelaskan maksudnya!
17. Periodisasi laporan keuangan berhubungan dengan konsep kontinuitas usaha, setujukah saudara?

18. Dalam keadaan harga-harga naik, prinsip historical cost dikatakan tidak dapat menyajikan informasi yang relevan, jelaskan!
19. Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 2 menjelaskan mengenai hierarki sifat kualitas informasi akuntansi. Jelaskan hierarki itu!
20. Selain sudut pandang kegiatan jasa, akuntansi dapat juga didefinisikan dari sudut pandang yang lain. Sebutkan berbagai sudut pandang dan definisinya!

PEN

ringk  
kutan  
jawa  
itu la  
lapor

keua  
prin:  
Pasa  
tahu  
Prin  
bail  
aku  
Aka

ji-  
rki  
dut

2

# LAPORAN KEUANGAN

## PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertahankan-jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Agar pembaca laporan keuangan tadi memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang menugaskan Panitia Pembina Pasar Uang dan Modal, hasil perumusan panitia tersebut dibicarakan dalam Kongres IAI tahun 1973 dan setelah diperbaiki kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam tahun 1983 dikeluarkan exposure draft untuk memperbaiki prinsip akuntansi yang lama. Exposure draft ini dikeluarkan oleh komite prinsip akuntansi Indonesia dari IAI, dan sesudah diperbaiki diterbitkan dengan nama Prinsip Akuntansi Indonesia 1984.

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen biasanya terdiri dari:

- Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
- Laporan rugi laba, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi.
- Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.
- Laporan perubahan posisi keuangan (statement of changes in financial position), menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan. (FASB dalam SFAS Nomor 95 menentukan laporan ini diganti dengan laporan aliran kas).

Laporan keuangan seperti yang tersebut di atas dapat dikatakan sebagai "laporan-laporan untuk tujuan umum". Sebagai tambahan dari laporan keuangan di atas, dapat dibuat laporan-laporan khusus yang menunjukkan bagian-bagian dari laporan keuangan dengan lebih rinci yang biasanya disebut "laporan-laporan untuk tujuan khusus" misalnya untuk bank, kantor pajak, Bapepam dan lain-lain.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasa digunakan adalah tahunan yang mulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Periode seperti ini disebut periode tahun kalender. Selain tahun kalender, periode akuntansi bisa juga dimulai dari tanggal selain tanggal 1 Januari. Istilah periode akuntansi sering juga diganti dengan istilah tahun buku.

Walaupun periode akuntansi (tahun buku) yang digunakan itu adalah tahunan, manajemen masih dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek, misalnya bulanan, triwulan atau kuartal. Laporan keuangan yang dibuat untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun disebut laporan interim.

## SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam bagian ini akan diuraikan isi dan susunan masing-masing laporan keuangan yang dihasilkan setiap periode.

### Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit-usaha pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva, atau dengan kata lain, aktiva adalah investasi di dalam perusahaan dan pasiva merupakan sumber-sumber yang

PENGARUH BIAYA SOSIAL TERHADAP KINERJA SOSIAL, KEUANGAN  
PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA

## 1. Pendahuluan

Proses perubahan lingkungan telah lama terjadi dan akan berlangsung terus menerus. Perubahan tersebut ada yang berdampak positif dan ada pula yang negatif. Perubahan lingkungan di masa lalu tidak membawa kerusakan berarti, sedangkan perubahan masa kini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada dasarnya ada lima perbedaan perubahan lingkungan masa lalu dan masa kini yaitu 1) perubahan lingkungan masa lampau berjalan sangat lambat, 2) kerusakan lingkungan akhir-akhir ini bersifat global, melewati batas negara, 3) kerusakan lingkungan masa kini telah menjangkau batas-batas generasi dan merugikan generasi mendatang, 4) banyak kerusakan lingkungan sekarang bersifat tidak dapat dipulihkan kembali, 5) masalah lingkungan tidak lagi terbatas dalam masalah ekologi yang ditangani secara ilmiah belaka (Salim dalam Roziqin, 1998).

Sudah banyak biaya pencemaran yang ditanggung alam karena ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Akibat perbuatan tersebut masyarakat setidaknya harus menanggung empat macam biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan: 1) *damage cost* yaitu biaya kerusakan akibat dampak langsung dan tidak langsung adanya limbah, 2) *avoidance cost* yaitu biaya ekonomi dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi, 3) *Abatement cost* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran 4) *transaction cost* yaitu biaya sumberdaya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan pencemaran (Afiff dalam Roziqin, 1998). Oleh sebab itu, sudah saatnya tanggung jawab tersebut beralih kepada pihak pengelola industri atau para pengusaha, dengan cara melakukan investasi untuk meminimalkan pencemaran serta melakukan pengelolaan limbah sedini mungkin (Roziqin, 1998).

Heard dan Bolce (1981) berpendapat bahwa, sebelumnya masyarakat memandang perusahaan hanya bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa, lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tuntutan masyarakat telah berubah drastis, ketika lingkungan hidup semakin rusak dan tidak sehat, sumber-sumber alam semakin menipis, bumi semakin panas dan padat, serta pembagian pendapatan semakin timpang. Pada saat ini masyarakat menuntut masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan harus menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab masyarakat sehingga harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Polusi udara dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi sampah nuklir, dan masih banyak petaka lain yang menyebabkan stres mental maupun fisik, telah lama menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari (Capra, 1983). Lebih lanjut Capra (1983) menuduh perusahaan sebagai penyebab utama apa yang sekarang disebut kesalahan alokasi sumber daya manusia dan alam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan istilah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai daya upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Sumitro Djohadikusumo, 1994). Selanjutnya Sumitro Djohadikusumo (1994) mengemukakan bahwa proses pembangunan harus bisa berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan jangan sampai pembangunan menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, tetapi harus berjalan secara berdampingan tanpa merusak lingkungan.

Di Indonesia kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah pada setiap periode. Pada Pelita ketujuh melalui Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, dinyatakan, "Kebijakan sektor Lingkungan Hidup, antara lain, mengenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan" (GBHN, 1998). Begitu juga UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 menyatakan 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU RI No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, sampai saat ini pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu adanya pengaturan secara khusus melalui Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang pasar modal, Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup terutama bagi perusahaan terbuka (*go public*). Agar pelaksanaan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

Pada umumnya perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta ditinjau dari kinerja keuangannya sudah baik, namun dari aspek lingkungannya ternyata masih memiliki masalah. Kepala Bapedal Sarwono Kusumaatmadja mengumumkan bahwa peringkat

kinerja Prokasih dari 187 perusahaan pe-serta program kali bersih pada awal Januari 1996 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Peringkat Kinerja Program Kali bersih

No.	Kategori	Jumlah
1.	Emas	0%
2.	Hijau	3%
3.	Biru	33%
4.	Merah	61%
5.	Hitam	3%

Sumber: Gatra, 1996

Setelah Kepala Bapedal mengumumkan hasil peringkat Prokasih dilanjutkan dengan teguran kepada perusahaan yang mendapatkan kategori biru, merah dan hitam, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2  
Perusahaan Yang Mendapat Teguran Bapedal

No.	Nama Perusahaan	Kategori
1.	PT Tjiwi Kimia	Biru
2.	PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang	Biru
3.	PT Inti Indo Rayon Utama	Biru
4.	PT Indah Kiat Pulp and Paper Serang	Merah
5.	PT Raja Garuda Mas Panel	Hitam
6.	PT Tirta Mahakam Plywood Industry	Hitam
7.	PT Papyrus Sakti Mills	Hitam
8.	PT Sari Merawa	Hitam Hitam
9.	PT Sico	

Sumber: Gatra, 1996

Pada umumnya perusahaan yang mendapat teguran dari Kepala Bapedal tersebut adalah perusahaan terbuka yang sahamnya dijual di Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian sekalipun perusahaan tersebut telah mengikuti program kali bersih yang masih bersifat sukarela, ternyata masih memberikan andil dalam masalah pencemaran lingkungan di Indonesia.

Berikut ini akan penulis uraikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Usmansyah (1989) di Indonesia, menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan Terbuka dan BUMN telah memenuhi tanggung jawab sosial meskipun baru didasarkan pada kesadaran sendiri dan dengan persepsi masing-masing. Yamagami & Kokubu di Jepang (1991), mengemukakan bahwa pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan lambat dibandingkan di USA, dan negara Eropa, Lynn di Hongkong (1992), menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial di Hongkong lebih rendah dibandingkan di Malaysia dan Singapura. Surma & Von-dra di Amerika Serikat, (1992) meneliti pada 125 perusahaan besar di Amerika Serikat mengemukakan bahwa hanya 11% dari seluruh responden yang mempunyai kebijakan khusus

mengenai akuntansi lingkungan dan kurang dari se-pertiga dari responden yang 11% tersebut mengungkapkan kebijakan lingkungan-nya pada catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian di Asia yang dilakukan oleh Usmansyah (1989) di Indonesia, Yamagami & Kokubu (1991) di Jepang, Lynn (1992) di Hongkong, Surma & Vondra (1992) di USA dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Asia lebih rendah dibandingkan dengan Amerika dan Eropa. Penelitian yang dilakukan di beberapa negara lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dikaitkan dengan harga saham. Namun dalam penelitian ini biaya sosial dikaitkan dengan kinerja sosial dan keuangan. Alasannya adalah bahwa keberhasilan pimpinan sebagai pengelola perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh jumlah penjualan, tenaga kerja, harta yang dimiliki dan analisis rasio, yang disajikan di dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan penilaian analisis rasio, yaitu SK Men. Keu. No. 198/KMK. 016/1998 tahun 1998. Standar ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan BUMN. Adapun alasan penggunaan standar ini di antaranya dengan pertimbangan 1) sampai saat ini belum ada standar yang berlaku umum untuk semua bentuk badan usaha, 2) objek penelitian yang penulis pilih adalah perusahaan terbuka. Salah satu pasal dalam UU pasar modal menyatakan bahwa perusahaan yang boleh menjual sahamnya di Bursa Efek haruslah perusahaan yang secara berturut-turut selama tiga tahun telah memperoleh laba.

## 2. Landasan Teori dan Hipotesis

### 2.1 Akuntansi Sosial

David Ricardo mengembangkan perangkat teori yang menyangkut empat kelompok permasalahan, yaitu 1) teori tentang nilai dan harga barang, 2) teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, 3) teori tentang perdagangan internasional, 4) teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi (Sumitro Djojohadikusumo, 31: 1971). Pada dasarnya pemikir ekonomi tersebut berpendapat bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan kontribusi kepada masyarakat secara menyeluruh, yaitu keserasian dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan umum.

Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang dilandasi oleh pemikir ekonomi pada mazhab klasik, akuntansi pun mengalami sejarah perkembangan yang panjang.

Perkembangan sejarah akuntansi tidak lepas dari praktik pencatatan akuntansi. Pada hakekatnya para ahli sepakat apabila dikatakan bahwa praktek akuntansi dalam arti pencatatan kejadian bisnis sudah lama dimulai, yaitu sejak adanya aktivitas ekonomi. Mesir memiliki sejarah akuntansi yang panjang. Ribuan bukti catatan akuntansi dalam kulit kayu yang ditemukan lebih dari lima belas abad yang lalu menjelaskan bahwa akuntansi sudah ada lebih dari 3.000 tahun sesuai dengan perkembangannya (Ernest Stevelinck, 1985).

Pada dekade tahun 1975 akuntansi sosial menjadi isu baru yang membahas pencatatan setiap transaksi keuangan perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Apabila perusahaan tidak memperhatikan sebuah faktor yang mempengaruhi mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan, dan sumber daya alam dalam satu kesatuan yang saling mendukung sebagai suatu sistem, maka akhirnya akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri (Marbun, 1991). Biaya yang berkaitan dengan kemasyarakatan tersebut disebut biaya sosial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Estes (1976).

"Social cost: any cost, sacrifice, or detriment to society (or to any element of society whether economic or non economic, internal or external. Social costs include sacrifice for which compensation is made (such as services used and paid for) as well as detriments not paid for (such as air pollution); any payments are treated separately as a benefit to society. (Traditionally the terms social cost has been used to refer only to consumption or damage to society with no associated pecuniary cost to the offending or consuming entity, and thus not internalized by it, i.e., external diseconomies; the reader should be careful to note the broader, more inclusive meaning assigned here.)"

Untuk mempertajam pengertian biaya sosial tersebut Ramanathan melihat dari segi pencatatannya yang mendefinisikan:

"Social accounting is the process of selecting firm-level social performance variables, measures, and measurement procedures; systematically developing information useful for evaluating the firm's social performance; and communicating such information to concerned social groups; both within and outside the firm" (Ramanathan, 1976)

Biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam perkembangannya sampai saat ini masih atas dasar desakkan masyarakat. Walaupun semula masyarakat menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk sebagai kebutuhannya, tetapi sekarang masyarakat menuntut agar perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui kepedulian terhadap masalah sosial. Artinya Hak dan kewajiban perusahaan adalah sama seperti layaknya penduduk sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan menjadi penduduk yang memiliki tanggung jawab sosial bukan perusak.

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat harus diungkapkan berupa laporan tanggung jawab sosial yang ternyata bisa berdampak terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ingram, The information content of social responsibility disclosures was conditional upon the market segment with which a firm

is identified (Ingram, 1978). Lebih lanjut Watt & Zimmerman berpendapat bahwa aktivitas tanggung jawab perusahaan bisa berdampak positif terhadap pegawai dan pemerintah. Corporations employ social responsibility activities to reduce the risk of governmental intrusions, such as regulation, that may adversely affect firm value (Watts & Zimmerman, 1978). Bahkan Abbot & Mousen berpendapat bahwa dampak laporan tanggungjawab sosial ini berpengaruh terhadap laba perusahaan. The change over time of these corporation's social involvement, the direction and scope of this involvement, and the effect that corporate social involvement appears to have on corporate profitability (Abbot & Mousen, 1979).

Laporan tanggung jawab sosial perusahaan, bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat yang ada di luar perusahaan tetapi para pegawainya pun sangat memperhatikan mengenai masalah ini, sebagai bahan informasi mengenai tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat. Karena laporan tanggung jawab sosial perusahaan bisa memberikan semangat untuk berprestasi didalam melaksanakan tugasnya. The social report has been accepted by employees as a corporate means of communication (Schreuder, 1981). Lebih jauh Benston berpendapat bahwa laporan tanggungjawab sosial ini bisa digunakan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat terhadap perusahaan. Social responsibility accounting can be used to measure and serve as a means of controlling externalities are delineated, analyzed rejected (Benston, 1982). Namun Wiseman berpendapat bahwa jika pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan tidak lengkap, tidak akan berpengaruh terhadap kinerja sosialnya. If the result of corporate environmental disclosures are incomplete and they are not related to the firm actual environmental performance (Wiseman, 1982)

Para investor juga menaruh perhatian terhadap isu lingkungan ini terutama lantannya dengan pemilihan investasi, tentunya para investor memilih investasi yang paling menguntungkan. Investors using the information released by the CEP to discriminate between companies with different pollution-control performance records (Shane & Spicer, 1983). Namun kepedulian sosial perusahaan ini masih dipengaruhi skala usaha dan kelompok perusahaan tertentu saja. Company size and industry classification are associated with corporate social disclosures (Co-wen et al., 1987). Bahkan dalam perkembangan selanjutnya bahwa pihak-pihak yang berkepentinganpun menaruh perhatian terhadap pengungkapan biaya sosial ini terutama dalam keputusan ekonominya. Some recent studies in the social responsibility area have recognized the role of stakeholders in influencing corporate decisions (McGuire et al., 1988). Bahkan R.W. Roberts berpendapat bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial ini harus digunakan sebagai salah satu strategi didalam mengembangkan usahanya. Measures of

stakeholder power, strategic posture, and economic performance are significantly related to levels of corporate social disclosure (R.W. Roberts, 1992).

Para peneliti sebelumnya berpendapat bahwa biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan lebih mengarah kepada citra positif dari masyarakat terhadap perusahaan, karena perusahaan sudah memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Namun para peneliti berikutnya biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan, hal ini sesuai dengan pendapat Spicer yang mengatakan bahwa:

“For a sample drawn from the pulp and paper industry, companies with better pollution-control records tend to have higher profitability, larger size, lower total risk, lower systematic risk and higher price/earnings ratios than companies with poorer pollution-control records (Spicer, 1978)”.

Bahkan Anderson & Frankle berpendapat lebih jauh lagi, implikasi dari laba perusahaan akan berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham di bursa bagi perusahaan yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Social disclosure has information content and that the market values this disclosure positively (Anderson & Frankle, 1980).

Hal senada ditunjukkan pula oleh hasil penelitian Chugh et al., Trotman & Bradley; dan Mahapatra yang berpendapat bahwa tingkat kepedulian sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di bursa saham. Significant relationship between a corporation's level of social responsibility activities and stock market performance (Chugh et al, 1978; Trotman & Bradley, 1981; and Mahapatra, 1984). Begitu juga hasil penelitian berikutnya yang dilakukan Spicer; Anderson & Frankle; Shane & Spicer, berpendapat bahwa aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan di bursa saham. Corporate social responsibility activities impact on the financial market (Spicer, 1978 a,b; Anderson & Frankle, 1980; Shane & Spicer, 1983). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Little et al., 1992 dikaitkannya dengan risiko sistematis. No systematic relationship between the two assessments, raising the question of whether the financial statements disclosures are consistent with investor interests ( Little et al., 1992)

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil penelitian, teori, dan literatur yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan sudah memberikan banyak perbendaharaan dalam perkembangan akuntansi sosial.

## 2.2 Hipotesis

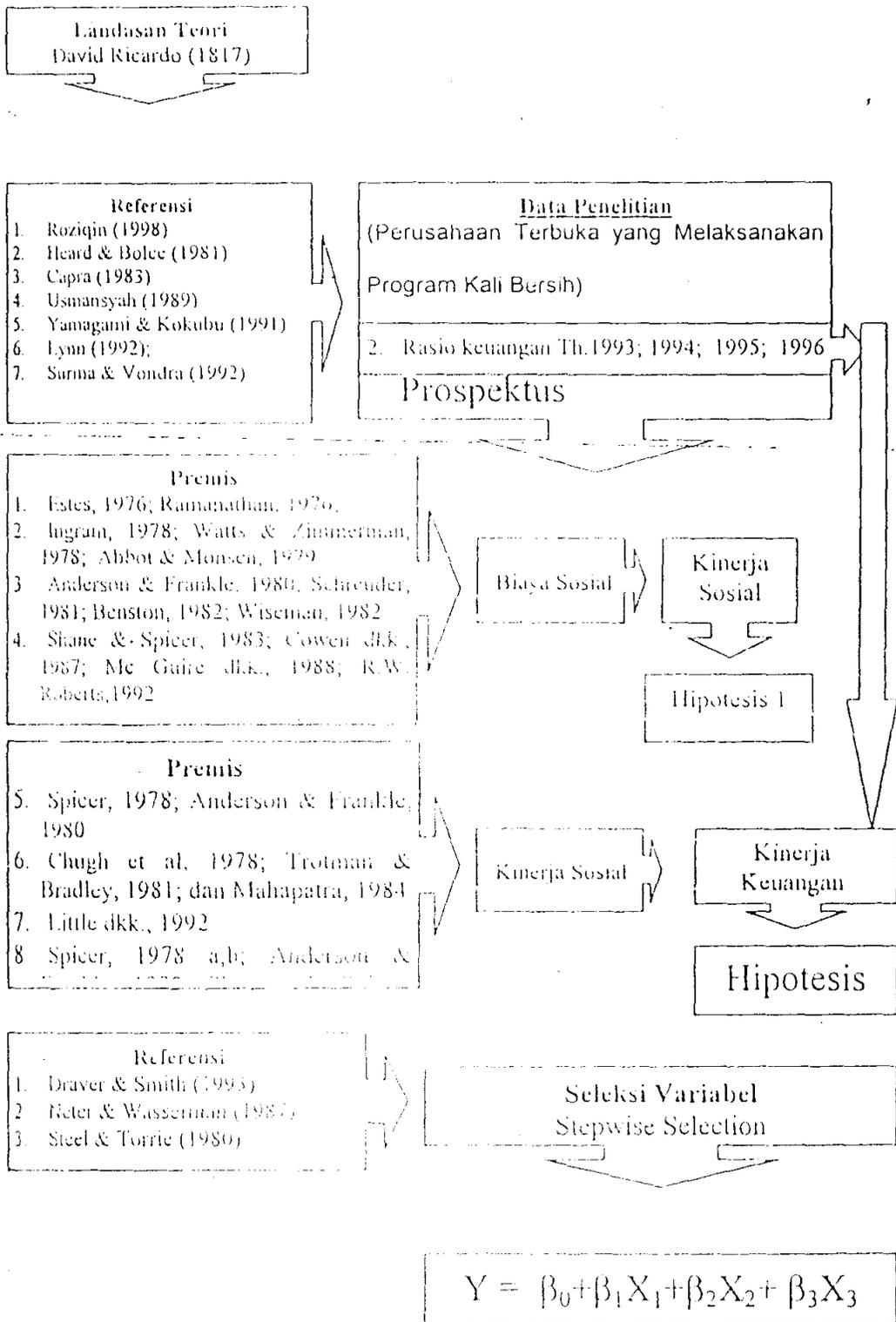
Berdasarkan premis-premis tersebut di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

### HIPOTESIS 1

Biaya sosial berpengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan

### HIPOTESIS 2

Kinerja sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan



Gambar 1.1  
Paradigma Penelitian

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Gambaran Cara Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya perusahaan terbuka di Indonesia menggunakan media yang berbeda-beda. Kelompok biaya sosial dan media pengungkapan yang paling banyak dipilih oleh perusahaan adalah: 1) Penyajian biaya pengelolaan lingkungan didalam prospektus 21,0 %, 2) Biaya kesejahteraan pegawai yang disajikan didalam catatan atas laporan keuangan 36,1 %, 3) Biaya untuk masyarakat disekitar perusahaan yang disajikan didalam laporan tahunan 15,0 %, dan 4) Biaya pemantauan produk yang disajikan didalam catatan atas laporan keuangan, ada 3,8 %.

Bervariasinya cara memilih media pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, nampaknya didasarkan kepada kelaziman dan untuk kepentingan tertentu. Seperti pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan lebih banyak perusahaan yang memilih media laporan prospektus, karena laporan prospektus ini bisa digunakan sebagai ajang propaganda pada saat perusahaan menjual saham perdananya di bursa efek. Pengungkapan tersebut minimal memberikan kesan bahwa perusahaan sudah memiliki kepedulian di dalam pengelolaan lingkungan. Dihasilkan dengan adanya pengungkapan dapat menarik para calon investor agar tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mengenai kesejahteraan pegawai, masyarakat di luar perusahaan dan biaya pemantauan produksi pada umumnya memilih media pengungkapan melalui laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini didasarkan pada kelaziman yang dilakukan pada perusahaan pada umumnya di Indonesia.

Penyebab lain yang mengakibatkan ketidakseragaman cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, karena belum adanya aturan yang jelas mengenai cara penyajiannya maupun komponen-komponen yang termasuk biaya sosial tersebut. Akibatnya masing-masing perusahaan mempunyai cara dan kebijakan masing-masing mengenai pengeluaran yang menyangkut biaya sosial ini. Hasil penelitian ini sesuai pula dengan penelitiannya Yamagami dan Kokubu (1991) pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7  
Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jepang

	Environment		Community involvement		Employee relations		Research and development		International activity	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Operating Report (total: 49 companies)	0	0	6	12,2	21	42,9	38	77,6	23	46,9
English Version Report (total: 47 Companies)	3	6,4	9	19,1	12	25,5	41	87,2	35	74,5
Public Relation Report (total: 49 Companies)	13	26,5	25	51,0	17	34,7	41	83,7	39	79,6
Average percentage of the three reports		11,0		27,6		34,5		82,8		66,9

Sumber: Yamagami dan Kokubu (1991)

Berdasarkan hasil penelitian Yamagami dan Kokubu (1991) pada Tabel 4.3 di atas pengungkapan tanggung jawab sosial, biaya sosial dikelompokkan berdasarkan 1) lingkungan (termasuk didalamnya energi dan pengamanan produk), 2) lingkungan masyarakat, 3) kepegawaian, 4) penelitian dan pengembangan, dan 5) aktivitas internasional. Media yang digunakannya adalah: 1) Laporan operasional, 2) Laporan versi bahasa Inggris, 3) Laporan Untuk Publik. Hasilnya adalah: 1) Biaya lingkungan yang disajikan pada laporan operasional 0%, Pada laporan versi bahasa Inggris 6,4%, Pada laporan untuk publik 26,5%. 2) Biaya lingkungan masyarakat disajikan pada laporan operasional 12,2%, Pada laporan versi bahasa Inggris 19,1%, Pada laporan untuk publik 51,0%. 3) Biaya kepegawaian disajikan pada laporan operasional 42,9%, Pada laporan versi bahasa Inggris 25,5%, Pada laporan untuk publik 34,7%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada umumnya media pengungkapan yang paling banyak digunakan adalah: Laporan untuk publik terutama yang menyangkut lingkungan 26,5%, lingkungan masyarakat 51,1%, dan aktivitas internasional 79,6%. Media laporan versi bahasa Inggris lebih banyak mengungkapkan mengenai Penelitian dan pengembangan 87,2%, aktivitas internasional 74,5%. Paling rendah adalah Laporan operasional yang mengungkapkan mengenai kepegawaian 42,9%.

Hasil penelitian penulis ini masih sesuai pula dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai cara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh: Ernst & Ernst (1978); Dierkes (1980); Singh & Ahuja, 1983; Teoh dan Thong (1984); Guthrie dan Mathews (1985); Gray et al (1987).

#### 4.2.2 Pengaruh Biaya Pengelolaan Lingkungan Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pengaruh biaya pengelolaan lingkungan terhadap kinerja sosial menghasilkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,572. Hal ini menunjukkan bahwa 57,2% variasi dalam Y kinerja sosial dapat dijelaskan oleh  $X_{17}$  biaya gaji dan upah bagian lingkungan, sisanya sebesar 42,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. Kesimpulan ini selanjutnya diuji secara statistik menggunakan uji t.

$\alpha = 5\%$  uji 2 arah menunjukkan  $t_{hitung} 4,905 > t_{(0,05,14)}$  tabel .095. Kemudian secara serempak melalui uji F,  $\alpha = 5\%$ . Hasil perhitungan  $F_{hitung}$  sebesar 24,056 dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (4,38) maka  $H_0$  ditolak. Artinya variabel biaya gaji dan upah bagian lingkungan baik secara parsial maupun serempak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja sosial perusahaan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan terbuka di Indonesia adalah gaji dan upah untuk bagian lingkungan. Ini berarti semakin besar biaya gaji dan upah yang dikeluarkan untuk bagian lingkungan yang khusus menangani masalah lingkungan akan meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Hal tersebut disebabkan, dengan adanya pegawai khusus yang beratensi terhadap lingkungan akan terhindar dari persoalan lingkungan sehingga akan berimplikasi terhadap membaiknya citra di masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai pula dengan hasil penelitian (Belkaoui & Karpik, 1989); (Roberts, R.W., 1992); (Trotman & Bradley, 1981, Cowen dkk., 1987; Roberts, R.W., 1992;). Di samping itu sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gibson dkk. Mengenai kepuasan kerja, yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpangkal dari berbagai aspek kerja seperti upah, kesempatan promosi, penyelia (supervisi), kebijaksanaan dan prosedur, keanggotaan kelompok kerja, kondisi kerja dan tunjangan (Gibson, 1992: 62).

#### 4.2.3 Pengaruh Biaya Kesejahteraan Pegawai Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,349, menunjukkan bahwa 34,9% variasi dalam Y kinerja sosial dapat dijelaskan oleh  $X_{2,13}$  biaya bonus dan  $X_{2,14}$  biaya tantiem, sisanya sebesar 65,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. Kesimpulan ini selanjutnya diuji secara parsial melalui uji t,  $\alpha = 5\%$  uji 2 arah menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,140 dan 2,630 lebih besar dari  $t_{(0,1,14)} = 2,101$ . Kemudian secara serempak melalui uji F,  $\alpha = 5\%$ . Hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 4,561 dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (3,52) maka  $H_0$  ditolak. Artinya bonus dan tantiem yang diberikan para pegawai baik secara parsial maupun serempak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa biaya kesejahteraan pegawai yang paling dominan akan mempengaruhi kinerja sosial perusahaan adalah biaya bonus dan tantiem yang diberikan kepada pegawai. Ini berarti semakin besar bonus dan tantiem yang dikeluarkan untuk para pegawai, maka akan meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya pemberian bonus dan tantiem sebagai insentif kepada para pegawai akan meningkatkan produktifitas pegawai, sehingga akan berimplikasi terhadap membaiknya citra perusahaan di masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai pula dengan teori kepuasan dari Maslow (1943); dan Herzberg (1959); Mc Clelland (1961). Asumsi dasar teori ini ialah bahwa individu memilih perilaku pribadi atas dasar: 1) pengharapan bahwa perilaku itu akan menghasilkan suatu keluaran tertentu; dan 2) jumlah valensi-valensinya, yakni manfaat pribadi atau imbalan yang diperoleh dari hasilnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan mendukung teori yang dikemukakan ketiga ahli tersebut yang menyatakan bahwa biaya kesejahteraan pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan terbuka di Indonesia.

#### 4.2.4 Pengaruh Biaya Masyarakat Sekitar Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.277, menunjukkan bahwa 27,7% variasi dalam  $Y$  kinerja sosial dapat dijelaskan oleh  $X_{32}$  biaya air bersih, sisanya sebesar 72,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. Kesimpulan tersebut selanjutnya diuji secara parsial melalui uji  $t$ ,  $\alpha = 5\%$  uji 2 arah menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,623 lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,093$ . Kemudian diuji secara serempak melalui uji  $F$ ,  $\alpha = 5\%$ . Hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 6,879 dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (4,38) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa biaya air bersih yang diberikan perusahaan kepada masyarakat baik secara parsial maupun serempak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja sosial perusahaan.

Berdasarkan hasil uji statistik tersebut menunjukkan biaya masyarakat sekitar perusahaan yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan adalah biaya air bersih. Ini berarti semakin besar biaya air bersih yang diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan akan meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya pemberian air bersih yang diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan akan memberikan ketenangan kepada masyarakat sekitar perusahaan dan merasa terbantu sebagian biaya hidupnya melalui kebutuhan pokok berupa air terutama untuk air sudah tercemar dengan kehadiran perusahaan ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Marbun (1991) yang mengatakan bahwa apabila perusahaan tidak memperhatikan seluruh faktor yang mengelilinginya, mulai dari karyawan, konsumen, lingkungan, dan sumber daya alam satu kesatuan yang saling mendukung sebagai suatu sistem, maka akhirnya akan mengakhiri eksistensi perusahaan itu sendiri.

#### 4.2.5 Pengaruh Biaya Pemantauan Produksi Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.185, menunjukkan bahwa 18,5% variasi dalam  $Y$  kinerja sosial dapat dijelaskan oleh  $X_{12}$  biaya iklan layanan masyarakat, sisanya sebesar 81,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

lam model persamaan ini. Kesimpulan tersebut diuji melalui uji t,  $\alpha = 5\%$  uji 2 arah menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,025 lebih kecil dari  $t_{tabel} = 2,093$ . Kemudian secara serempak melalui uji F,  $\alpha = 5\%$ . Hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 4,099, dengan demikian  $F_{hitung} < F_{tabel} (4,38)$  maka  $H_0$  diterima. Artinya biaya layanan masyarakat baik secara parsial maupun serempak tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja sosial perusahaan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa biaya pemantauan produksi yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan adalah biaya iklan layanan masyarakat, walaupun tidak signifikan. Ini berarti semakin besar biaya iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan perusahaan akan meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Hal tersebut penting dikarenakan konsumen juga perlu mendapatkan perlakuan dari produsen atas produk yang konsumsinya. Seperti peringatan kepada para pemakai rokok yang ditulis pada sampul rokok yang menyatakan bahwa merokok mengganggu kesehatan, atau dengan menentukan spesifikasi dari produk yang dihasilkan, ada juga label halal untuk produk makanan dan minuman bagi umat islam.

Tidak signifikannya biaya iklan layanan masyarakat terhadap kinerja sosial, mungkin juga diakibatkan oleh tingkat kepedulian masyarakat di Indonesia sendiri belum mencapai pada tahap apakah perusahaan mempunyai atensi yang tinggi atau tidak yang berkaitan dengan iklan layanan masyarakat tersebut. Bahkan dari pihak konsumen sendiri belum memiliki pemahaman yang memadai yang berkaitan dengan eko label ini.

Hasil penelitian ini sesuai pula dengan pendapat Heard dan Polce (1981) bahwa sebelumnya masyarakat memandang perusahaan hanya bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa, lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak lagi membatasi tujuannya atas terpenuhinya barang, jasa, dan kesempatan kerja, tetapi menuntut para pengusaha untuk mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan persoalan lingkungan dan kemanusiaan dalam aktivitas usahanya. Masyarakat menuntut persoalan ini dijadikan sebagai tanggungjawab perusahaan (masalah internal), bukan tanggung jawab masyarakat (eksternal) sehingga harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

#### 4.2.6 Pengaruh Biaya Sosial Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan

Berdasarkan perhitungan statistik bahwa variabel biaya sosial yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan adalah 1) biaya gaji dan upah bagian lingkungan sebesar 0,58443, 2) biaya air bersih untuk masyarakat sekitar perusahaan sebesar 0,533483, 3) biaya bonus pegawai sebesar 0,393087, 4) biaya tantiem untuk pegawai sebesar 0,375627, dan 5) biaya layanan masyarakat sebesar 0,349567.

Hasil perhitungan ini menggambarkan bahwa pengaruh biaya sosial yang paling dominan terhadap kinerja sosial perusahaan di Indonesia ada lima variabel, yaitu: 1) biaya gaji dan upah; 2) biaya air bersih; 3) biaya bonus; 4) biaya tantiem; dan 5) biaya iklan layanan masyarakat. Ini berarti semakin besar biaya gaji dan upah, biaya air bersih, biaya bonus, biaya tantiem, biaya iklan layanan akan meningkatkan kinerja sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai pula dengan hasil penelitian Ernst & Ernst (1971). Walaupun sedikit agak berbeda mengenai variabel-variabel yang dominannya seperti halnya hasil penelitian Arpan dan Radebaugh (1981) mengatakan bahwa Perusahaan di Perancis diharuskan membuat neraca sosial yang ditujukan untuk para pegawai dan manajemen yang dibuat setiap tahun. Neraca sosial tersebut menginformasikan mengenai: 1) pegawai; 2) gaji; 3) kesehatan dan perlindungan keamanan; 4) kondisi lain dalam bekerja; 5) training pegawai; 6) hubungan industri; 7) kondisi lain yang menyangkut kehidupan, termasuk perumahan dan transportasi para pegawai perusahaan.

#### 4.2.7 Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.091, menunjukkan bahwa 9,1% variasi dalam Z. kinerja keuangan dapat diterangkan dalam variasi Y. kinerja sosial, sisanya sebesar 90,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. Kesimpulan tersebut selanjutnya diuji dengan uji  $t$ ,  $\alpha = 5\%$  uji 2 arah menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar -1,346 lebih kecil dari  $t_{(0,1;109)} = 2,093$ , hal ini menunjukkan bahwa kinerja sosial secara parsial tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya secara serempak melalui melalui uji F,  $\alpha = 5\%$ . Hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 1,811, dengan demikian  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (4,38) maka  $H_0$  tolak. Artinya variabel kinerja sosial secara serempak tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak ada. Hal ini disebabkan tingkat kepedulian masyarakat secara umum belum baik. Artinya sekalipun para pengusaha sudah melakukan kepedulian terhadap lingkungannya, tetapi bilamana masyarakat konsumen sebagai pembeli produk perusahaan

tidak memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan, maka usaha tersebut tidak akan mempunyai dampak yang positif terhadap kinerja keuangan para emiten. Alasan tersebut bisa ditunjukkan dari tingkat kesadaran ataupun pemahaman masyarakat untuk membedakan mana perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dengan yang tidak masih sedikit.

Kepedulian para konsumen di Indonesia berkaitan pula dengan tingkat daya beli masyarakat atau pendapatan yang pada umumnya masih rendah. Artinya para konsumen masih berpikir pada tarap yang penting terjangkau kebutuhannya, belum memikirkan apakah produk tersebut ramah lingkungan atau tidak. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendapatan perkapita Nasional yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga hal ini bisa berimplikasi terhadap tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan.

Hasil penelitian ini sesuai pula dengan hasil penelitian Yamagami & Kokubu (1991) yang menyatakan di Jepang pelaksanaan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berjalan secara lambat dibandingkan di USA, dan negara Eropa (Ernst & Ernst, 1978; Dierkers, 1980; Rey, 1980; Gray dkk., 1987;). Hasil penelitian Luynn (1992), di Hongkong pengungkapan tanggung jawab sosial lebih rendah dibandingkan di Malaysia dan Singapura (lihat Andrews dkk., 1989).

First published 1996 by  
Prentice Hall Europe  
Campus 400, Maylands Avenue  
Hemel Hempstead  
Hertfordshire HP2 7EZ  
A division of  
Simon & Schuster International Group

© Prentice Hall, Europe, 1996

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,  
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any  
means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,  
without the prior permission in writing, from the publisher.

Typeset in Garamond 10½/12 pt  
by MHL Typesetting Ltd, Coventry

Printed and bound in Great Britain by  
Redwood Books, Trowbridge, Wiltshire

---

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Accounting and accountability / edited by Rob Gray, Dave Owen, and  
Carol Adams.

p. cm.

Includes bibliographical references (p. ).

ISBN 0-13-175860-8 (pbk. : alk. paper)

1. Social accounting. 2. Industries—Social aspects—Accounting.  
3. Industries—Environmental aspects—Accounting.  
4. Social responsibility of business—Accounting. I. Gray, Rob.  
II. Owen, Dave. III. Adams, Carol

HD60.A28 1996.

658.4'08—dc20

95-42790

CIP

---

British Library Cataloguing in Publication Data

A catalogue record for this book is available from the British  
Library

ISBN: 0-13-175860-8

2 3 4 5 00 99 98 '97



# Contents

Preface ix

## 1 Social accounting and systems thinking

*The failures of accounting and liberal economic democracy* 1

- 1.1 Introduction 1
- 1.2 What is social accounting and reporting? 3
- 1.3 Systems thinking and general systems theory 12
- 1.4 Using the GST framework 14
- 1.5 Liberal economic democracy 15
- 1.6 Accounting as liberal economy 17
- 1.7 The failings of liberal economic democracy 19
- 1.8 Social accounting and liberal economic democracy 23
- 1.9 Social accounting and the accounting profession 25
- 1.10 Summary and conclusions 26

## 2 Social accounting and accountability 32

- 2.1 Introduction 32
- 2.2 A neo-pluralist vision of the world 33
- 2.3 Accounting and democracy 36
- 2.4 Social accounting and accountability 38
- 2.5 Some limitations and extensions of accountability 42
- 2.6 Descriptive theories of CSR: what is social accounting when it is not  
accountability? 45
- 2.7 Summary and conclusions 50

## 3 Corporate social reporting, social responsibility, accounting and accountants 55

- 3.1 Introduction 55
- 3.2 The social responsibility of organisations? 56
- 3.3 What, then, is the role of CSR? 62
- 3.4 The State's role in CSR 64

#### 4.4 The response of the accounting profession

Fashion, it seems, not only dictates what areas of social responsibility a company will concern itself with, but is brutally apparent in the attitude of the accountancy professions. Figure 4.5 also illustrates some of the milestones of the accounting professions' responses to the developing social responsibility agenda. One will look without success for any consistency of purpose in this.

The accounting profession in the United States responded with alacrity to the social responsibility of the early 1970s. David Linowes, himself an influential practising accountant in the United States, was one of the first to see the potential link between social responsibility and accounting (Linowes, 1972). More particularly, Linowes argued that a 'good' company — a company which embraced the highest standards of social responsibility — should not be penalised in its financial statements. Linowes argued that social responsibility will, at least in the short term, cost a company money. This will in turn reduce profit and, as a result, the 'responsible' company will appear to be less successful. He went on to propose an additional accounting statement that could be published in the Annual Report which would show how well the organisation had performed in the social domain. His proposal is summarised in Figure 4.6.

Linowes' proposal was especially important for a number of reasons. First, this was a practising and respected accountant making the proposal — not an academic or 'other impractical extremist'. Secondly, it was the first concrete suggestion as to how a 'social account' might be prepared. Thirdly, it explicitly attempted to link the 'social' and the 'economic' in one statement. As we shall see, this last point remains one of the more difficult challenges for social accounting. However, the proposed statement was not without considerable problems — not least of which were that (a) it was highly subjective; (b) it used different valuation and cost bases in different parts of the statement and then added and subtracted the resultant oranges, apples and pears; and (c) Linowes was unclear as to whether he was taking the corporation's view looking out to society, or the society's view looking into the corporation.<sup>17</sup> Linowes' work was, and remains two decades later, seminal and an important starting point for any discussion about the practicalities of social accounting (for more detail see, for example, Burton, 1972; Estes, 1976; Jensen, 1976; and, especially, Gray *et al.*, 1987).

There was a considerable initial response from the accounting profession. Throughout the early 1970s the American Accounting Association issued a series of thoughtful reports on many aspects of the social responsibility debate (including environmental matters) as they applied to accounting. These reports remain as fresh and as illuminating today (see, for example, AAA, 1973; 1975b).<sup>18</sup> There were many discussions about — and commissioned reports on — the accounting issues surrounding reporting to (employee reporting) and about (employment reporting) employees as well as investigation into the issues concerning the reporting of accounting information to trade unions for the purposes of collective bargaining (see, for example, Foley and Maunders, 1977; Maunders, 1984; and Chapter 7). In the United Kingdom the (then) Accounting Standards Steering Committee published the widely quoted *Corporate*

Figure 4.6 Socioeconomic operating statement. Source: Linowes (1972), reproduced with permission

X Corporation	
Socio-economic operating statement for the year ending December 31 19x1	
<b>I Relations with people</b>	
A. Improvements	
1. Training program for handicapped workers	\$10,000
2. Contribution to educational institution	4,000
3. Extra turnover costs because of minority hiring program	5,000
4. Cost of nursery school for children of employees voluntarily set up	11,000
Total improvements	<u>\$30,000</u>
B. Less Detriments	
1. Postponed installing new safety devices on cutting machines (cost of the devices)	\$14,000
C. Net improvements in people actions for the year	<u>\$16,000</u>
<b>II Relations with environment</b>	
A. Improvements	
1. Cost of reclaiming and landscaping old dump on company property	\$70,000
2. Cost of installing pollution control devices on Plant A smokestacks	4,000
3. Cost of detoxifying waste from finishing process this year	9,000
A. Total improvements	<u>\$83,000</u>
B. Less Detriments	
1. Cost that would have been incurred to relandscape strip-mining site used this year	\$80,000
2. Estimated costs to have installed purification process to neutralize poisonous liquid being dumped into stream	100,000
	<u>\$180,000</u>
C. Net deficit in environment actions for the year	<u>\$97,000</u>
<b>III Relations with product</b>	
A. Improvements	
1. Salary of vice-president while serving on government Product Safety Commission	\$25,000
2. Cost of substituting leadfree paint for previously used poisonous lead paint	9,000
Total improvements	<u>\$34,000</u>
B. Less Detriments	
1. Safety device recommended by Safety Council but not added to product	\$22,000
C. Net improvements in product actions for the year	<u>\$12,000</u>
Total socio-economic deficit for the year	<u>\$69,000</u>
Add Net cumulative socio-economic improvements as of January 1, 19x1	<u>\$249,000</u>
Grand total net socio-economic actions to December 31, 19x1	<u>\$180,000</u>

Figure 4.7 The Corporate Report (ASSC, 1975)

The *Corporate Report* was based upon the basic idea that all organisations owe a duty to 'public accountability'. External reporting should, it was argued, satisfy the information needs of those 'who have reasonable rights to information concerning the reporting entity'.

These were identified as:

- the equity-investor group;
- the loan creditor group;
- the employee group;
- the analyst-adviser group;
- the business contact group;
- local and national government;
- the public including consumers, community, environmental protection groups, etc.

In addition to developments in the financial statements, *The Corporate Report* recommended that entities publish additionally:

- a value-added statement;
- an employment report;
- a statement of money exchanges with government;
- a statement of transactions in foreign currency;
- a statement of future prospects;
- a statement of corporate objectives.

Further, the report emphasised the potential desirability of CSR and identified the need for further investigation into practical ways of providing a social account.

to become more responsive to the wider social responsibility issues. Figure 4.7 summarises some of the main points from the *Corporate Report*.<sup>19</sup> Other reports in other countries followed (see, especially, AICPA, 1977) and they still represent an excellent bank of thinking and ideas on the whole spectrum of social accounting and accountability. However, with very few exceptions, notably at the periphery of employee and employment reporting, these excursions by the accounting professions had little long-term effect on practice and virtually no effect on accounting regulation.

As we noted above there appears to be a response akin to fashion in the profession's reaction to 'new' issues. That few, if any, of the developments that attracted so much attention at the time have passed into the core of the accounting curriculum is depressing and, we would suggest, indicative that accounting still has no coherent way of thinking about its mission (no 'conceptual' framework': Macve, 1981; and see also Hines, 1991a). As a result it reacts to issues and, when those issues pass from the political agenda, the accounting profession abandons them.

Such a view is supported in Figure 4.5 by the environmental issues. Neither the early 1970s reports from the AAA nor the path-breaking work on energy accounting (see, for example, CIMA, 1982) were re-activated when accounting for the environment became such a live issue in the late 1980s. A principal challenge faced by those supporting environmental accounting is to ensure that 'environment' is not hustled offstage in the way all previous social accounting initiatives have been. Further, it is worth remarking that this ebbing and flowing of various aspects of CSR is as good an indication as one

problem is established in an accounting standard or the Companies Acts does it become part of the core knowledge of the profession. This is very depressing and hardly a cause for congratulation to a group such as accountants, with such high aspirations to be a profession (see, particularly, Bebbington *et al.*, 1994; Gray *et al.*, 1994; Owen *et al.*, 1994; Sterling, 1973; Zeff, 1987, 1989).

#### 4.5 The development of CSR practice

As may be inferred from the foregoing, CSR practice has not evolved in any systematic manner. However, we can identify a series of 'milestones' in the development of CSR practice. These can be used to illustrate the different themes we have been speaking of. These themes and the examples (and 'milestones') we can use to illustrate them, are shown in Figure 4.8.

Before going into the detail of Figure 4.8 a few words of explanation seem appropriate. First, the figure identifies both individual examples of CSR (those in lower case) and general trends in reporting (those in upper case). Illustrations of some of these are presented below but it is hoped that the combination helps to illustrate the themes we have been discussing in this chapter. Secondly, the theme of 'employees and trade unions' in Figure 4.8 contains a range of approaches including human resource accounting as well as reporting *to* and *for* employees. These are touched upon in Chapters 5 and 6 and examined in a little more detail in Chapter 7. Thirdly, a number of the examples cited in Figure 4.8 relate to externally prepared reports (see also Figure 4.4). These (which include the Council on Economic Priorities, the consumer movements, Social Audit Ltd, Counter Information Services, local authority and plant closure audits) are what we shall refer to generally as 'Social Audits' and are dealt with in more detail in Chapter 9. Fourthly, the relatively new phenomenon of 'ethical or social investment' which was such an important part of the trends in the late 1980s is dealt with in detail in Chapter 8. Finally the more recent trends, and notably the recent emergence of environmental reporting and accounting, will be given some detailed examination in Chapters 5 and 6. In this section of this chapter we will just concentrate on those examples from the past that remain important milestones; that help illustrate the trends we have pulled out earlier in the chapter; and which fall, generally, into the category (in Figure 4.4) of internally prepared for external consumption. We will do this, again, under the four broad headings of social responsibility; community and consumers; employees; and natural environment.

#### Social responsibility reporting

Social responsibility reporting or — as Mathews (1984) calls it — 'total impact reporting' is concerned with trying to present a comprehensive picture of the full extent of the organisation's interactions with its external environment. Although this is, it would

8 Milestones in practice and experimentation in CSR

SOCIAL RESPONSIBILITY AND TOTAL IMPACT	COMMUNITY AND CONSUMER	EMPLOYEES AND TRADE UNIONS	NATURAL ENVIRONMENT
Council on Economic Priorities (USA)	Ralph Nader (USA) Consumer Assoc. (UK)	R.G. Barry Corp (1968: USA)	
Social Audit Ltd (1971: UK)			
Counter Info' Services (c. 1972: UK)			
Linowes (1972: USA)		SOCIALBERICHT (Germany)	
Clark C. Abt (1972: USA)			
Eastern Gas (1972: USA)	BankAmerica (1974: USA)	EMPLOYEE REPORTS (UK, Germany)	Philips Screw (1973: USA)
Deutsche-Shell (1975: Germany)	1st Nat. Bank Minneapolis (1974: USA)	The Lucas Plan (1975: UK)	EXPERIMENTS IN ENERGY ACCOUNTING (Germany, UK)
Atlantic Richfield (1974-1977: USA)		EMPLOYMENT REPORTS (UK)	

4.8 continued

		VALUE ADDED STATEMENTS (UK)	
		BILAN SOCIAL (France)	
Cement Corp India (1981: India)	PUBLIC SECTOR REPORTING (UK)	PLANT CLOSURE AUDITS (UK)	CERCLA DISCLOSURE (USA)
SOCIALBILANZ (Germany)			
ETHICAL INVESTMENT FUNDS (USA/UK)	LOCAL AUTHORITY SOCIAL AUDITS (UK)	SOUTH AFRICAN EMPLOYMENT (MNCs)	Ciba Geigy (1989: Switzl)
Changing Corporate Values (1991: UK)	Ethical Consumer (1990: UK) New Consumer (1990: UK)		Noranda (1990: Canada) Norsk Hydro (1990: UK/Norway)
SbN Bank (1992: Denmark)			BSO/Origin (1990: Netherlands)
Traidcraft (1992: UK)			Danish Steel Works (1991: Denmark)

reporting were of this sort. Both from the United States, the 1972 reports from Clark C. Abt and Associates and from Eastern Gas and Fuel Associates represent very different approaches to the same basic problem.

Clark C. Abt was a consultancy firm which initiated and developed a 'set of 'social accounts' that were intended to show the total impact of the company in financial terms. The accounts were intended, in part, as a public relations device but were published (and refined) by Abt throughout the 1970s. Although accompanied by very detailed and thoughtful notes on how items such as pollution or employee remuneration were treated, the accounts demonstrated (rather more clearly than was intended) that it is very difficult (if not impossible) to capture all social and environmental interactions in financial terms *in the same valuation basis*. Even more acutely than Linowes (see Figure 4.6) the accounts end up comparing, adding and subtracting figures calculated on fundamentally different bases. What, if anything, the resultant bottom-line purports to represent is therefore anybody's guess.<sup>20</sup> However, the method was applied in one other case of which we are aware. The Cement Corporation of India produced Abt-based social accounts for 1981. These are reproduced in Figure 4.9.

The two major importances of the Abt attempts were that (a) the company encouraged and undertook experimentation in the area of social accounting — such experimentation is far too rare and urgently needed if advances are to be achieved; and (b) the Abt accounts, like the Linowes, do attempt to link the economic and the social/environmental activities of the company. An essential tenet of CSR is that a large part of what CSR seeks to represent is that economic activity and the pursuit of profit is not a costless activity to the host society. The Abt accounts move us, albeit oddly, in this direction. Finally, as we shall see in Chapter 6, attempts of this sort are still being made. Chapter 6 will introduce and explore the environmental accounts of BSO/Origin, a Dutch company, that bear a notable resemblance to the Abt accounts (for more detail see also Gray and Symon, 1992).

A complete contrast is offered by the Eastern Gas and Fuel Associates 1972 Report. In general terms this is much closer to what normally passes for social and environmental reporting, in that it is descriptive with the intermittent use of quantitative data (see Figure 4.10). The Eastern Gas Report is clearly addressed to shareholders and suggests that it covers those matters thought to be of greatest concern to the shareholders. In this we see that management still have something approaching total control over the social reporting process and, as a result, we cannot expect such reports to be either unbiased (even if that were possible) or complete. In fact, the Eastern Gas report has one glaring omission in that, given the business it is in, the company's greatest impact is likely to be in the area of air and land pollution — about which the report is silent.

Two further illustrations will serve to complete the early picture of attempts at social responsibility accounting. Figure 4.11 shows an extract from the Deutsche Shell 1975 Report. The Deutsche Shell Report is a combination of a set of social accounts (derived, so it would appear, from the Linowes model), plus a series of more general statements. An attempt at comprehensive reporting is provided by an orientation to assessing the extent to which the company contributes to social welfare. Thus the Deutsche Shell model relies on costs (and not valuations like the Abt model) and relates the whole to

Figure 4.9 Extract from Cement Corporation of India Ltd 1981 Social Account

Social Accounts Social Income Statement	I Social benefits & cost to staff A. Social benefits to staff	(Rs. in Lakhs)	
		1980-81	1979-80
	1. Medical and hospital amenities	32.14	20.35
	2. Educational facilities	4.10	2.39
	3. Canteen facilities	5.71	3.46
	4. Recreation, entertainment & cultural activities	3.07	1.77
	5. Housing and township facilities	112.54	84.33
	6. Water supply, concessional electricity and transport	18.15	13.59
	7. Training & career development	4.93	3.85
	8. Other benefits to employees	192.01	149.97
	Total benefits to staff	372.65	279.71
	B. Social cost to staff		
	1. Lay off & involuntary terminations	0.86	—
	2. Extra hours put in by executives voluntarily	9.26	7.75
	Total cost to staff	10.12	7.75
	Net social income to staff (A-B)	362.53	271.96
	II. Social benefits & cost to community		
	A. Social benefits to community		
	1. Local taxes paid to Panchayat/ Municipality	0.21	0.08
	2. Environmental improvements	6.97	7.01
	3. Generation of job potential	550.69	448.67
	4. Generation of business	95.63	75.90
	Total social benefits to community	653.50	531.66
	B. Social cost to community		
	Increase in cost of living in the vicinity on account of cement plants	155.00	127.40
	Net social income to community (A-B)	459.50	404.26

Figure 4.10 Extract from Eastern Gas and Fuel Associates 1972 Annual Report

### Toward Social Accounting

**TO OUR SHAREHOLDERS:**

There has been much talk in recent years of corporate social responsibility and of the need to develop some sort of social accounting to gauge how well a given firm is performing — not just as an economic unit but as a citizen. Indeed, some have suggested that these measures of corporate performance beyond net profit should be subjected to an independent social audit.

This insert for the 1972 Annual Report of Eastern Gas and Fuel Associates has been designed as an experimental exploration of two aspects of social accounting for "self-auditing" purposes:

- (1) What are some internal topics on which management can presently assemble and organize reasonably accurate and coherent data?
- (2) Which issues of social accountability are of external interest and to what extent are shareholders in particular interested, if at all?

To explore the first of these aspects we have gathered statistical information that covers four topics from among the many that are currently of concern to those studying corporate social responsibility:

- Industrial safety
- Minority employment
- Charitable giving
- Pensions

To explore the second aspect we have included, at the end of this insert, a short questionnaire which, if you will mail it back, will serve as a useful measure of shareholder concern with corporate social responsibility and the reporting of it. No generally accepted standards or methods of presentation have been developed for shareholder reporting on such topics nor is there clear evidence as to shareholder interest.

The topics for this first report were not chosen because they are necessarily the most important ones or the ones that might make us look good, but because they are the most readily measurable, because our goals with respect to them are comparatively simple and clear, and because they lie in areas where management can rather directly influence results. In addition, managerial decisions on these topics can have a significant impact on earnings per share.

In the process of making this first consolidation of social data from our various operations, we found that our records were less complete and less certain than we had believed. We also found that even inadequate disclosure begins to exert a useful pressure on management to comply with new public expectations as to the conduct of large corporations. It may also be some of the best evidence that management is sincerely concerned and making an effort to meet proper expectations.

Four major recurring principles for the quantification of social responsibility have been suggested:

- The first is that our priorities have been changing with some rapidity. Many of our political, economic and commercial measures of progress have become obsolescent. We need a new kind of social accounting that goes beyond GNP for the nation and goes beyond net profit for the firm.
- Second, while we think of our current economic and accounting measures of GNP and net profit as very precise when you really get into the nitty-gritty of how they are put together, their certainty is illusory.
- Third, many proposed imprecise measures of social accounting can be sufficiently accurate to be instructive. They are not hopelessly less accurate than GNP or net profit, and so they can be quite useful, even though they lack precision, for many purposes for which we cannot use GNP and net profit.
- And finally, while our efforts to calibrate our concerns by social accounting will reflect this new sense of priorities, without personal observation in the field and a weighing of the figures that we create with moral concerns, social accounting itself becomes only a new numbers game.

As we proceed with these early attempts to develop some form of internal social accounting, we should acquire additional useful insights into this new art.

Eh Goldston, President

#### 1 INDUSTRIAL SAFETY

Recent legislation has demonstrated that a major current public concern, especially in the heavy industries in which Eastern is involved, is the health and safety of employees.

Our industrial accident record in recent years has not been very good. One standard measurement is the accident frequency rate (number of accidents versus hours worked), and our rate has almost doubled in the last three years, going up most dramatically in gas operations. It is clear that our safety performance has been slipping. In addition it seems that our record is poorer than that of a number of firms with whom we have compared specific records. Just where we stand in our various industries is difficult to gauge because meaningful comparative figures are not available.

	ACCIDENT FREQUENCY RATE (Lost time accidents per million employee hours)		
	1970	1971	1972
Coal & Coke	43	61	78
Gas	14	26	30
Marine	34	41	43
EGFA Avg.	36	50	64

Another measure of safety performance is the severity rate, which takes into account time lost as a result of accidents. Here Eastern's record has been steadier, and apparently more in line with other firms for our industries. But much room for improvement remains.

	ACCIDENT SEVERITY RATE (Employee days lost per million employee hours)*		
	1970	1971	1972
Coal & Coke	2,948	3,427	4,209
Gas	222	191	303
Marine	1,707	2,015	1,423
EGFA Avg.	2,225	2,516	3,033

\*Excluding days charged for fatalities.

Figure 4.10 continued

Frequency and severity rates, either for a single firm or for an industry, are rather elusive statistics. They may appear worse simply from improved reporting, or may appear better if excessive pressure to improve the record results in variable reporting practices. Comparisons are complicated by numerous variables. Our lives (and our crews, for instance, live aboard the boats) and so are at their workplace even when not actually working. A greater awareness by both employees and management of the importance of safety may increase the number of reported accidents. Improved benefits could encourage accident reporting. Comparisons are also difficult because of different bases of reporting. We are trying for 1973 to improve both our performance and our ability to supply managers with comparable industry statistics.

Job related fatalities, of course, are the most salient and tragic accidents. We require full reports to top management on all serious injuries and fatalities along with proposals to prevent recurrence. At Eastern we are constantly trying to develop more effective ways to impress on all our people the need to guard against the ever present hazards in their particular line of work. Here is our recent record of fatalities.

	1970	1971	1972
Coal & Coke	3	3	4
Gas	0	0	3
Marine	1	1	2
EGFA Total	4	4	9

Critics of industry often assume that management has more ability to reduce accident frequency and severity and to eliminate fatalities than may be the case. We do not accept at all the rationalization that accidents just happen, and we would be the last to suggest that a victim alone is at fault. But it is obvious that we need to be better persuaders and to improve training, motivation and enforcement when it is considered that in at least five of the six 1972 fatalities, the victim was an experienced employee who was clearly violating a standard safety work rule of the company at the time of his death. The need for and difficulty of broad safety indoctrination is evidenced by the fact that 11 employees were fatally injured in 1972 in accidents off the job.

The economics of safety reinforces our social humanitarian concerns. Compensation of employees injured on the job cost Eastern at least \$3,300,000 last year, or about 26¢ in earnings per share.

We are continuing to increase our commitment of men and money to ongoing safety programs in all operations. One of our headquarters officers has been assigned to regular field checks of safety practices and the compilation and analysis of accident statistics. Eastern Associated Coal Corp. has further strengthened its existing safety program by engaging the highly respected safety department of a firm in another industry to help us improve our safety performance in coal operations. In Boston Gas Company, a safety campaign has commenced that focuses not only on safe work habits but also on continuing "defensive" use of equipment and procedures to avoid dangerous situations.

#### 2 MINORITY EMPLOYMENT

An important thrust of Eastern's social concerns effort is to respond positively to the apparently clear national desire to bring an end to discrimination in employment and promotion because of race, religion or other difference from that elusive notion of "the majority."

It is difficult to generalize fairly and judiciously about Eastern's minority employment statistics. Numerically, minority employment in the company has increased in recent years, but has not quite maintained its percentage proportion. This has been particularly noticeable in coal operations, but in this instance, the increased employment has come in areas where there has been a smaller minority proportion in the local population. And it may be that the improving employment prospects for minority members either with our competitors or in fields previously closed to them have reduced the relative attractiveness of jobs with us. Boston Gas has had an excellent record of integrating its work force, but the addition of new territory with a different population mix has appeared to slow the trend.

	MINORITY EMPLOYMENT		
	1970	1971	1972
Coal & Coke			
Total	5,703	6,050	6,448
Minority	526	544	517
% Minority	9.2%	9.0%	8.0%
Gas			
Total	1,466	1,500	1,611
Minority	66	36	115
% Minority	4.5%	2.4%	7.1%
Marine			
Total Employees	1,077	1,317	1,358
Minority	54	44	73
% Minority	5.0%	3.3%	5.8%
EGFA*			
Total Employees	8,349	8,995	9,526
Minority	659	727	716
% Minority	7.9%	8.1%	7.5%

\*Includes Boston Office.

Measuring progress in integration is further complicated by the fact that companies were forbidden to record the race of employees until quite recently. Many of our operations are so geographically scattered that it is difficult to determine in many cases if our percentages of minority employment are in line with the minority population in reasonably relevant areas, although this does seem to be true.

	MINORITY EMPLOYMENT LEVELS		1972 Total in Category	1972 % of Total
	1971	1972		
Officers & Managers	1	1	1,223	1%
Professional & Technical	3	74	648	4.9%
Clerical	58	56	895	6.1%
Skilled	364	398	5,391	7.8%
Unskilled	271	216	1,663	1.3%

Passing over complicated matters of definition, the figures seem to indicate that Eastern has done a reasonable job but still has some distance to go in reaching a fair proportion of minorities in the work force.

Figure 4.11 Extract from Deutsche Shell 1975 Report

**THE GOALS OF SHELL'S CORPORATE POLICY**

Every company in a free market must achieve a reasonable return on the capital that has been invested, to a large degree, at high risk. On the other hand, we are aware of our responsibility in a social market economy and, besides its purely economic activities, we see the company as a part of society, as the employer of those working for us, as a part of the whole. As long ago as 1974 we laid down in our principles of management the following five goals. Each carries the same weight, but they do not always operate in the same direction.

- Supplying the consumer on conditions determined by the market;
- Developing new applications of techniques and products;
- Achieving a reasonable return on investment;
- Taking into account our employees' interests;
- Paying regard to the general public welfare.

This overall objective explains why we have extended the Annual Report, which was in the main a report intended for the shareholders, to include a complete account of the degree to which all five of these corporate goals have been achieved.

**Table of Contents**

1. Introduction.
2. The framework of Shell's policy: general developments in the energy market;
  - 2.1 The policy of the OPEC countries.
  - 2.2 The impact on the German mineral oil market.
  - 2.3 The Federal government's energy program.
  - 2.4 Obligation to maintain minimum stock levels.
  - 2.5 Structural and business activity problems of the mineral oil industry.
  - 2.6 Special levies on domestic oil and natural gas production.
  - 2.7 Long-term aspects.
3. The goals of Shell's corporate policy.
  - 4.1 Supplying the consumer on conditions determined by the market.
  - 4.2 Development of new application techniques and products.
  - 4.3 Achieving a reasonable return on investment.
  - 4.4 Taking account of our employees' interests.
  - 4.5 Paying regard to the general public welfare.
5. Explanations pertaining to the German Shareholders' Act:
  - 5.1 Explanations of the balance sheet.
  - 5.2 Explanations of the profit and loss account.
6. Tables:
  - 6.1 Social accounts.
  - 6.2 Relations with investors.
  - 6.3 Account of performance.
  - 6.4 Balance sheet.
  - 6.5 Profit and loss statement.

Item	1975	1974	1973	1972	1971
<b>ASSETS</b>					
1. Fixed assets	18	18	18	18	18
2. Current assets	18	18	18	18	18
<b>LIABILITIES</b>					
1. Equity	18	18	18	18	18
2. Liabilities	18	18	18	18	18

Figure 4.12 Extract from Atlantic Richfield Company's 1977 Social Report

**ASSETS**

**Minority Affairs**

Atlantic Richfield has worked hard to provide job opportunities for minorities. Minority group members account for 13 percent of the total work force, a ratio that ranks Atlantic Richfield at the top of the petroleum industry.

Jobs formerly restricted to men - such as refinery work - have been opened up to women.

The number of minorities and women in professional, managerial and sales positions has nearly doubled since 1970.

To aid minority economic development, Atlantic Richfield maintains deposits of over \$1 million in minority-owned financial institutions across the country.

Atlantic Richfield reported purchases of \$3.2 million from minority suppliers in 1974. This was double its 1973 purchases.

**Contributions**

Its \$5.5 million of charitable contributions in 1974 supported a large number of educational, health and cultural organizations in the United States.

Atlantic Richfield matches, dollar for dollar, employee contributions to educational institutions.

One unusual grant in 1974 was \$10,000 to the Council on Economic Priorities, an organization that monitors corporate social responsibility.

Community organizations backed by Atlantic Richfield Foundation grants include the Boy Scouts, YMCA, Junior Achievement, Urban Coalition, American Red Cross, Salvation Army and Urban League.

**Shareholder Information**

The firm's Form 10K financial report, which contains more detailed information than the annual report and which all corporations must file with the Securities and Exchange Commission, was offered free of charge to all shareholders in 1972 and 1973.

**Environment and Conservation**

Atlantic Richfield was the first company in the petroleum industry to announce that it would make a lead-free gasoline.

In the interests of what it called "America's natural beauty," the Company in 1972 cancelled its entire out-door advertising - 1,000 billboards in 36 states.

Its Cherry Point refinery in the state of Washington has been recognized as a model nonpolluter.

It has emphasized energy conservation in its own operations.

**Consumerism**

It was one of the first companies in the petroleum industry to post the octane levels of its gasolines at the pump.

**Social Management**

The Company's public affairs program in Alaska is outstanding, far surpassing any comparable effort by Atlantic Richfield in the lower 48 states both in the range and depth of activities. The Company has made its presence felt in Alaska as a concerned corporate citizen.

**CONCLUSION**

As the youngest of the petroleum giants, the Company carries less baggage from the past. As a company still in transition, it is more conscious that its future lies ahead. And that is perhaps what is most hopeful; it is a company not yet fully formed. When oil from Alaska begins to flow and Atlantic Richfield becomes even bigger than it is today, it will have a splendid opportunity to demonstrate that social concerns can be built into the day-to-day operations of a petroleum company. More than most giant companies, it has its future in its hands. It need not retrace or repeat the mistakes of the past.

**LIABILITIES**

Most minorities and women who work for Atlantic Richfield hold low-level jobs. There is not a single black or female officer.

More than 70 major U.S. companies have elected blacks to their boards of directors. Many have also named women directors. The petroleum industry has resisted this trend - and so has Atlantic Richfield. Its board is all-white, all-male, all-Christian.

The Company has not been aggressive or innovative in its support of minority enterprise. Standard Oil of Indiana, for example, requires its purchasing agents to set goals and goes out of its way to help fledgling companies. Result: Indiana Standard spends four or five times what Atlantic Richfield spends in purchases from minority suppliers.

To encourage charitable contributions, the Internal Revenue Service allows corporations a deduction of up to 5% on pretax profits. At least two companies - Davison Hudson and Cummins Engine - takes this full deduction. Other companies - Aetna Life & Casualty, for example - have sharply increased their giving. Atlantic Richfield gives away 1.3% of pretax profits.

The pattern of Atlantic Richfield's giving is in the traditional mold, with most money going to old-line, established institutions. Of the \$850,000 committed to education in 1973, for example, more than a quarter went to one school, the Massachusetts Institute of Technology.

Black colleges receive only minimal support.

The Company's annual report has been niggardly in providing meaningful details of pollution control programs or specific information about social responsibility activities. The tendency has been to substitute rhetoric for hard data. Shell Oil Company has consistently released far more information.

Atlantic Richfield was slow to comprehend the environmental problems connected with the Alaskan pipeline and for too long resisted protection measures later incorporated into the project.

The Company, while paying its respects to the conservation ethic in solving our energy problems, persists in the view that more development and more growth can solve our energy problems.

At many U.S. companies the concept of social responsibility has been institutionalized at least to the extent that new positions and/or committees have been created, some of them with high standing in the table of organization. Atlantic Richfield has floundered through a series of organizational reshuffles, with the social responsibility functions still scattered, relegated to lower levels of the Company and concerned largely with peripheral areas outside the mainstream activities.